

MANAJEMEN KURIKULUM

MANAJEMEN KURIKULUM

Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd.
Dr. H. Amiruddin MS, M.A



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana

MANAJEMEN KURIKULUM

Penulis: Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd., dan
Dr. H. Amiruddin MS, M.A.

Copyright © 2017, pada penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

PERDANA PUBLISHING

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756
E-mail: perdanapublishing@gmail.com
Contact person: 08126516306


Cetakan pertama: Nopember 2017

ISBN 978-602-5674-62-0

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian
atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau
bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

 segala puji dan syukur dipersembahkan kehadiran Allah swt yang senantiasa menganugerahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Sholawat serta salam disampaikan untuk junjungan alam, nabi Muhammad saw yang membawa risalah Islam sebagai pedoman hidup untuk meraih kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti, meraih tempat terbaik surga Jannatun Na'im.

Penulisan buku Manajemen Kurikulum dimaksudkan untuk menyediakan buku sumber bacaan bagi mahasiswa program magister dan Doktor bidang pendidikan (khususnya Manajemen Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam), bahkan bagi peminat kajian manajemen pendidikan, khususnya yang mendalami manajemen kurikulum pendidikan. Kajian dalam buku ini diharapkan dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, termasuk kajian transdisiplin yang memudahkan para ilmuan dan praktisi untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan kontemporer.

Dengan selesaikan penulisan buku ini disampaikan terima kasih kepada Rektor UIN Sumatera Utara bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag, yang memberikan kemudahan bagi penerbitan buku ini. Mudah-mudahan kehadiran buku ini bermanfaat untuk membangun budaya ilmu dan kemaslahatan untuk pengembangan pendidikan yang berkeunggulan, baik di madrasah, pesantren dan sekolah Islam serta perguruan tinggi sehingga terwujud peradaban bangsa yang memiliki daya saing lokal, nasional, regional dan global. Keunggulan pendidikan nasional yang mampu menghasilkan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksudkan adalah bermuara kepada memiliki kedalaman iman, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berbasis kepada peradaban bangsa

Indonesia yang mampu memenangkan persaingan global dan bekerjasama untuk peradaban baru bagi terwujudnya peradaban baru bangsa-bangsa.

Selain itu terima kasih kepada semua pihak yang memberikan spirit bagi penulis untuk menyelesaikan dan menerbitkan buku ini yang sudah lama diharapkan kehadirannya oleh peminat kajian manajemen kurikulum pendidikan di pentas perbukuan nasional.

Wallahu A'lam bisshowab.

Medan, 16 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar | 5 |
| Daftar Isi | 7 |
| | |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | 11 |
| A. Peluang Pengembangan Kurikulum | 11 |
| B. Kebijakan Pembaharuan Kurikulum | 16 |
| C. Relasi antara Pendidikan dan Kurikulum | 20 |
| D. Pendekatan Sistem Pendidikan | 29 |
| | |
| BAB II | |
| KONSEP DASAR MANAJEMEN KURIKULUM..... | 35 |
| A. Pengertian Manajemen Kurikulum | 35 |
| B. Kegiatan Manajemen Kurikulum | 41 |
| C. Ruang Lingkup, Prinsip dan Fungsi Manajemen Kurikulum | 42 |
| D. Karakteristik Manajemen Kurikulum | 43 |
| E. Manajemen Pengembangan Kurikulum Sentralistik | 48 |
| F. Manajemen Pengembangan Kurikulum Desentralistik | 51 |
| | |
| BAB III | |
| PERENCANAAN KURIKULUM..... | 54 |
| A. Pengertian Perencanaan Kurikulum | 54 |
| B. Sifat dan Asas Perencanaan Kurikulum | 58 |
| C. Fungsi dan Prinsip Perencanaan Kurikulum | 60 |
| D. Azas-Azas Perencanaan Kurikulum | 63 |
| E. Sifat Perencanaan dan Model Kurikulum | 64 |
| F. Organisasi Kurikulum | 66 |

BAB IV

| | |
|-------------------------------------------------------|----|
| IMPLEMENTASI KURIKULUM | 69 |
| A. Pengertian Implementasi Kurikulum | 69 |
| B. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum | 73 |
| C. Pelaksanaan Kurikulum dan Pembelajaran | 74 |
| D. Model Pelaksanaan Kurikulum dan Pembelajaran | 79 |
| E. Standar Proses | 83 |
| F. Pelaksanaan Proses Pembelajaran | 90 |
| G. Pengawasan Proses Pembelajaran | 93 |

BAB V

| | |
|----------------------------------------|-----|
| EVALUASI KURIKULUM | 101 |
| A. Pengertian Evaluasi Kurikulum | 101 |
| B. Tujuan Evaluasi Kurikulum | 106 |
| C. Proses Evaluasi Kurikulum | 109 |
| D. Fungsi Evaluasi Kurikulum | 115 |

BAB VI

| | |
|-------------------------------------------------|-----|
| PENGEMBANGAN KURIKULUM | 122 |
| A. Dasar-Dasar Pengembangan | 122 |
| B. Pengertian Pengembangan Kurikulum | 129 |
| C. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum | 132 |
| D. Pendekatan Pengembangan Kurikulum..... | 137 |

BAB VII


| | |
|----------------------------------------------------------|-----|
| KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 | 148 |
| A. Pengertian Kebijakan | 148 |
| B. Kebijakan Pendidikan | 151 |
| C. Stratifikasi Kebijakan Pendidikan | 155 |
| D. Kebijakan Kurikulum 2013 | 158 |
| E. Landasan dan Tujuan Pengembangan Kurikulum 2013 | 169 |
| F. Kurikulum 2013 berbasis Kompetensi..... | 171 |
| G. Landasan Kurikulum 2013 | 173 |
| H. Kurikulum 2013 sebagai Upaya Merealisasikan SNP | 176 |

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| I. Asumsi dan Keunggulan Kurikulum 2013 | 183 |
| J. Perbandingan Kurikulum 2013 dengan KTSP 2006..... | 186 |
| K. Perbedaan Esensial Kurikulum 2013 dengan KTSP 2006 | 189 |
| L. Kurikulum 2013 dan Tupoksi Guru | 194 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 200 |
| TENTANG PENULIS | 204 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. PELUANG PENGEMBANGAN KURIKULUM

ejatinya eksistensi dan kelangsungan hidup (survival) pada masa depan suatu bangsa ditentukan oleh efektivitas fungsi pendidikan dalam menghasilkan sumberdaya pendidikan yang memiliki daya saing lokal, nasional, regional dan global. Karena itu, pendidikan perlu senantiasa dikembangkan dalam rangka transformasi kebudayaan yang dilakukan melalui proses pendidikan dan pembelajaran dari situasi negara yang sedang berkembang sehingga dapat berubah menjadi negara maju. Sistem persekolahan memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kurikulum sebagai miniatur kebudayaan bangsa yang senantiasa mengutamakan pencerdasan kehidupan bangsa sebagai cita-cita kemerdekaan.

Sampai kini kualitas pendidikan bangsa masih cenderung kurang maksimal dalam peningkatan mutu. Persoalan mutu berkenaan dengan sistem pendidikan yang dijalankan melalui proses *input* (masukan), proses, *out put* (keluaran) dan *outcomes* (hasil). Interaksi sumberdaya dengan proses yang tertata dengan baik diharapkan akan menghasilkan kualitas pendidikan yang baik. Untuk menghasilkan pendidikan bermutu, suatu lembaga perlu memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pelanggan

utamanya adalah peserta didik dan pelanggan selanjutnya adalah pengguna hasil pendidikan antara lain adalah masyarakat dan pemerintah.¹

Dalam kondisi kekinian, tidak mungkin kebudayaan bangsa berkembang bila pendidikan di sekolah tidak efektif dalam mewujudkan pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum pendidikan nasional yang mampu mengantisipasi dan merespon dinamika kebudayaan pada era informasi melalui penyediaan sumberdaya manusia berkualitas unggul. Sejak dari pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi. Sebab dalam kurikulum, secara konseptual filosofis dan keilmuan dikemukakan semua stuktur kebudayaan bangsa, baik pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, sistem mata pencaharian, adat istiadat, dan nilai-nilai agama. Semua aspek kebudayaan ini harus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan melalui pelaksanaan sistem pendidikan berkualitas, dan berkeunggulan bagi terjaminnya eksistensi dan keberlanjutan masa depan kehidupan bangsa.

Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan.² Sistem pendidikan sebagai suatu keseluruhan yang terpadu memiliki sejumlah komponen mencakup dasar dan tujuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, manajemen, dan lembaga pendidikan yang saling berhubungan dan berfungsi untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal yang mesti direspon oleh perencana dan pelaksana pendidikan, termasuk para kepala sekolah dan guru, serta pengawas kurikulum pendidikan. Dengan begitu, maka pendidikan nasional berhadapan dengan tuntutan kebutuhan internal sekolah, baik kepala sekolah, guru-guru, tenaga kependidikan, siswa dan respon atas perubahan eksternal, yang mencakup perubahan peraturan dan perundang-undangan dalam bidang pendidikan, kemajuan sains dan teknologi, perubahan nilai-nilai kehidupan, maupun gaya hidup.

Proses pembelajaran yang kurang interaktif, kurang inspiratif,

¹ Martini Jamaris. (2013). *Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, h.10.

² Zainal Arifin. (2015). *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h.1.

membosankan, kurang menantang, kurang memberi motivasi, kepada peserta didik, untuk berpartisipasi secara aktif, kurang dapat menumbuhkan prakarsa, kreativitas, kemandirian, sesuai bakat, minat dan perkembangan peserta didik, serta kurang memberikan keteladanan perlu diperbaiki agar benar-benar bermakna dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembelajaran juga kurang efektif dan efisien. Sebagian guru yang kurang jelas dalam menentukan tugas pembelajaran. Materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar.³

Untuk pendidikan berkualitas, maka saatnya menggunakan cara berpikir tentang pembelajaran efektif dengan mempertimbangkan tiga pendekatan utama, yaitu mempertahankan pembelajaran efektif. Pendekatan pertama ini fokus terhadap dua konsep, menciptakan waktu pembelajaran aktif, dan kualitas pengajaran. Hal pertama berkenaan dengan menggunakan banyak waktu siswa dalam pembelajaran di sekolah secara aktif mengalami pembelajaran berkaitan dengan hasil pembelajaran yang diinginkan. Kemudian yang terakhir mengacu kepada kualitas pengalaman pengajaran Siswa. Kedua konsep telah mempengaruhi tujuan pengajaran efektif sehingga dapat menjelaskan mengapa seorang guru lebih efektif dari pada yang lain. Secara mikro, para guru yang mengajar harus profesional sehingga mampu melaksanakan pembelajaran efektif. Dalam esensinya guru-guru efektif adalah yang mampu memaksimalkan semua waktu menjadi pembelajaran aktif dan pengajaran berkualitas. Kedua pendekatan fokus atas pengajaran sebagai suatu aktivitas mendasarnya adalah manajerial serta harus memiliki kunci keterampilan mengajar yang melaksanakan manajemen efektif dalam pembelajaran. Pendekatan kedua fokus kepada konsep psikologis, prinsip dan proses yang memunculkan sikap terlibat pembelajaran efektif. Pendekatan ini menekankan atas psikologis siswa tentang bagaimana menghubungkan terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu aktivitas pendidikan.⁴

Bagaimanapun dalam kehidupan keseharian, bahwa konsep pem-

³ Abuddin Nata. (2012). *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada, h.331.

⁴ Chris Cypriacou, ed. (2009). *Effective Teaching in School: Theory and Practice*. UK: Stanley Thornes (Publishers) Ltd, h.19.

belajaran dipahami sebagai, proses memperoleh pengetahuan lebih banyak, mengingat dan menghasilkan ulang, menggunakan fakta atau prosedur, pemahaman, mencermati sesuatu dengan cara berbeda, perubahan bagi seorang pribadi.⁵ Pemahaman atas makna pembelajaran sebagaimana diungkapkan di atas menunjukkan bahwa siswa berperan aktif supaya esensi dari tujuan pembelajaran benar-benar dapat tercapai sebagaimana disusun dalam kurikulum, direncanakan guru pembelajarannya, dan sekaligus dievaluasi. Dengan begitu pendidikan akan semakin bermakna dalam kehidupan anak didik untuk menciptakan perubahan kepribadiannya dan memperoleh keterampilan hidup sebagai generasi penerus yang berperadaban tinggi, baik sebagai pribadi, keluarga, masyarakat dan bangsa.

Dalam konteks ini, fenomena pendidikan terkini menunjukkan bahwa permasalahan yang mengemuka dari daya saing sumberdaya manusia yang cukup mengkhawatirkan adalah angka pengangguran yang masih cukup tinggi. Ketika lembaga pendidikan menghasilkan lulusan yang banyak penganggurnya, maka satuan, jenis atau jenjang pendidikan dapat dikatakan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan nasional. Dengan banyaknya penganggur terdidik, pendidikan juga dapat dikatakan kurang mampu mendorong tumbuhnya produktivitas perekonomian nasional bahkan mungkin dapat menjadi kendala pertumbuhan, pengangguran tenaga terdidik juga menimbulkan akibat- akibat sosial lebih kompleks, seperti kenakalan, kegelisahan, kemiskinan, kriminalitas, ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah sebagai ciri masyarakat yang kurang mandiri.⁶

Tantangan terberat lingkungan pendidikan nasional adalah cepatnya dinamika lingkungan global, perkembangan sains dan teknologi, perubahan nilai, perubahan kebutuhan hidup, diferensiasi pekerjaan, dan kompetisi antar bangsa.⁷ Di sisi lain, permasalahan pendidikan Indonesia yang aktual, mendesak, berdampak nasional serta solusinya terutama yang berkaitan dengan kualitas lulusan, kualifikasi tenaga pendidik, dan

⁵ Chris Watkins, Eileen Carnell & Caroline Loodge. (2007). *Effective Learning in Classroom*. London: Paul Chapman Publishing, h.9.

⁶ Ace Suryadi.(2014). *Pendidikan Indonesia Menuju 2025*,Bandung: Rosdakarya, h.11.

⁷ H.A.R Tilaar. (2014). *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta:RinekaCipta, h.6.

kependidikan, perkembangan kurikulum, tata kelola keuangan, manajemen institusional, ketersediaan dan kesesuaian sarana dan prasarana pendidikan.⁸

Dengan perubahan zaman, maka tuntutan perubahan kurikulum dalam dunia pendidikan menjadi keniscayaan dalam tatanan sistem pendidikan nasional. Sebagaimana halnya perubahan kurikulum dari kurikulum tingkat satuan pendidikan diubah menjadi kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan saintifik merupakan keniscayaan di tengah perubahan global terutama dalam konteks eksistensi dan kemajuan bangsa. Tulisan ini berusaha menjelaskan pendidikan versus perubahan kurikulum.

Pengembangan kurikulum melibatkan pemikiran-pemikiran secara falsafati, psikologi, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya. Landasan falsafati pendidikan menelaah fungsi kurikulum secara mendalam dan radikal sehingga menemukan sifat yang hakiki (*substantive nature*) dan kurikulum dalam pendidikan dan atau pelatihan. Landasan psikologis menelaah keselarasan antara perkembangan dan kesiapan mental serta fisik peserta didik dengan kompleksitas materi pelajaran sehingga proses pembelajaran dan pelatihan menghasilkan pembelajaran yang bermanfaat selaras dengan cita-cita peserta didik. Sementara ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya merupakan sumber-sumber materi pelajaran yang perlu diatur penyampaiannya, baik pada arah horizontal, (cakupan, atau *scopes*) maupun pada arah vertikal (kontinuitas, *skuers*) agar dapat menumbuhkan kemampuan menalar dengan wawasan yang luas dan mendalam.⁹

Perubahan dalam pemikiran guru selama proses inovasi kurikulum muncul menjadi contoh khusus lebih dari proses yang umum dalam hal pembelajaran guru untuk mengajar.¹⁰ Dengan begitu, guru memerlukan perubahan cara berpikir ketika pengembangan kurikulum diimplementasikan sebagai suatu kebijakan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, kurikulum baru meniscayakan perubahan pada model pembelajaran sebagai realisasi tuntutan perubahan kurikulum yang menjadi wilayah tanggung jawab

⁸ Ace Suryadi, *op.cit*, h.13.

⁹ Tedjo Narsoyo Reksoatmodjo. (2010). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan: Teknologi dan Kejuruan*, Bandung: Adytama, h.3.

¹⁰ John O,Neill and Neil Kitson, ed,(1996). *Effective Curriculum Management*, London: Routledge, h.16.

dan kompetensi guru baik pembelajaran di dalam kelas, maupun di luar kelas, dan penerapan model pembelajaran berbasis *e-learning*.

Pendapat di atas menegaskan bahwa pengembangan kurikulum dalam dunia pendidikan merupakan satu keniscayaan. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum harus memperhatikan faktor landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan keilmuan dalam rangka memastikan bahwa pengembangan kurikulum harus menjadi kebijakan pemerintah pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota. Bahkan kebijakan sekolah secara mikro dapat mengusahakan pengembangan kurikulum, terutama untuk mendisain keunggulan sekolah, baik proses layanan maupun lulusan yang diharapkan stakeholders pendidikan.

B. KEBIJAKAN PEMBAHARUAN KURIKULUM

Kebijakan reformasi pendidikan meniscayakan perubahan atau pengembangan kurikulum pendidikan nasional. Kegiatan ini menjadi bagian dari kebijakan pendidikan. Di sini dipahami bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa tercapai.¹¹

Salah satu variabel yang mempengaruhi sistem pendidikan nasional adalah kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum harus dapat mengikuti dinamika yang ada dalam masyarakat. Kurikulum harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat luas dalam menghadapi persoalan kehidupan yang mengemuka ke permukaan dalam realitas sosial. Sudah sepatutnya kalau kurikulum itu terus diperbaharui seiring dengan realitas, perubahan, dan tantangan dunia pendidikan dalam membekali peserta didik menjadi manusia yang siap hidup dalam berbagai keadaan di masa depannya. Kurikulum harus komprehensif dan responsif terhadap dinamika sosial, relevan, tidak *overload* dan mampu mengakomodasikan keberagaman

¹¹ Dinn Wahyudin. (2014). *Manajemen Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h.38.

keperluan dan kemajuan teknologi.¹² Di sinilah peluang untuk melakukan inovasi pendidikan, khususnya pengembangan kurikulum dengan memperhatikan faktor kebutuhan anak secara internal dan faktor perubahan lingkungan eksternal, terutama kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan nilai-nilai kehidupan.

Kebudayaan bangsa menjadi bagian pokok dari isi kurikulum, meskipun dalam wujud pengetahuan, nilai-nilai, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Meskipun demikian, perubahan dan pengembangannya harus dilakukan secara sistematis dan terarah tidak asal berubah. Perubahan dan pengembangan kurikulum tersebut harus memiliki visi dan arah yang jelas mau dibawa ke mana sistem pendidikan nasional dengan kurikulum tersebut.¹³

Menurut Kunandar,¹⁴ kurikulum harus dirancang dalam rangka lebih mengembangkan segala potensi yang ada pada peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum jangan sampai membebani peserta didik, seperti beban belajar yang terlalu berat. Menurut ketua badan standarisasi nasional pendidikan (BSNP) Bambang Suhendro bahwa beban belajar di Indonesia mencapai 1.000-2.000 jam per tahun. Bahkan sekolah-sekolah tertentu menerapkan jam belajar lebih tinggi sehingga memberatkan siswa. Beban jumlah jam pelajaran seperti itu terlalu berat, apalagi selain tatap muka di kelas siswa masih harus mengikuti ekstrakurikuler dan mengerjakan pekerjaan rumah. Jika dijumlahkan jam yang dibebankan pada siswa justru membuat siswa tidak ada waktu untuk istirahat. Beban belajar siswa di Indonesia kelebihan 20% jika dibandingkan dengan beban belajar siswa di luar negeri yang beban belajar siswa berkisar 800-900 jam per tahun (Media Indonesia, 23-12-2005).

Sebagaimana diberitakan bahwa untuk merespon kondisi di atas, BSNP merekomendasikan kepada Depdiknas untuk mengurangi beban belajar sekitar 10% untuk SD/MI kelas I-III satu jam pelajaran 35 menit,

¹² Kunandar. (2011). *Guru Profesional: Implementasi KTP dan Sukses Sertifikasi*. Jakarta: Rajawali Press, h.113.

¹³ E. Mulyasa. (2014). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h.59.

¹⁴ Kunandar.*op.cit*.h.113.

dengan jumlah jam pelajaran 577-709 per tahun. Sementara itu, untuk kelas IV-VI SD/MI setahun berkisar 675-754 jam. Untuk SMP/MTs kelas VII-IX satu jam pelajaran 40 menit, dengan jumlah jam pelajaran per tahun 771-861. Sementara itu, SMA/MA kelas X-XI satu jam pelajaran 45 menit dengan jumlah jam pelajaran 969-1083. Perampangan jumlah pelajaran yang tadinya berkisar 1.000-2.000 jam per tahun ini guna menyerap usulan berbagai kalangan, termasuk keluhan orang tua murid yang merasa hak kebebasan anaknya untuk bermain terampas oleh sekolah. Belum lagi ditambah dengan pekerjaan rumah yang terasa melelahkan mental anak didik (Media Indonesia, 3-1-2006).

Dalam Kunandar, sebagaimana dikemukakan Indrajati dalam kaitan pembaharuan kurikulum, Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan menengah Depdiknas berpendapat bahwa salah satu upaya peningkatan mutu kurikulum adalah dengan pembenahan kurikulum yang dapat memberikan kemampuan dan keterampilan dasar minimal (*minimal basic skill*). Menerapkan konsep belajar tuntas (*mastery learning*) dan membangkitkan sikap kreatif, inovatif, demokratis dan mandiri bagi peserta didik. Oleh karena itu, pembaharuan kurikulum suatu keniscayaan.¹⁵

Dalam masyarakat, baik dinegara-negara maju maupun yang sedang berkembang terdapat kepercayaan bahwa pendidikan merupakan sarana pencerahan bangsa serta kesadaran adanya hubungan antara pendidikan dengan kemajuan suatu bangsa. Peserta didik dewasa ini dihadapkan pada produk-produk teknologi yang merangsang minat untuk menguasainya namun di sisi lain mereka belum menguasai prasyarat ilmu untuk mempelajarinya. Dalam hal ini diperlukan institusi pendidikan atau sekolah sebagai pihak yang diharapkan dapat membantu para peserta didik untuk dapat mencapai cita-cita mereka.¹⁶

Lebih lanjut Sidi berpendapat bahwa kurikulum pendidikan nasional harus dikembangkan berdasarkan beberapa indikator, sebagaimana dikemukakan Kunandar,¹⁷ yaitu:

Pertama, kurikulum pendidikan harus bersifat luwes, sederhana dan bisa menampung berbagai kemungkinan perubahan dimasa yang

¹⁵ *Ibid.* h.114-115.

¹⁶ Tedjo Narsoyo Reksoatmodjo. *Op.cit.* h.4.

¹⁷ Kunandar, *op.cit.* h.115-116.

akan datang sebagai dampak perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Idealnya kurikulum harus selangkah lebih maju dari perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat sehingga kurikulum (dunia pendidikan) tidak tertinggal dari dinamika masyarakat. Kurikulum harus dikembangkan secara futuristik dan mampu menjawab tantangan zaman.

Kedua, kurikulum harus bersifat pedoman pokok (*general guideline*) kegiatan pembelajaran siswa. Kurikulum tidak terlalu rinci dan dapat dikembangkan secara keadaan sumber daya pendukung, dan kondisi daerah setempat. Kurikulum hanya memberikan yang fundamental. Pengembangan yang sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat dicari sendiri oleh sekolah (guru) masing-masing dengan memperhatikan dan memanfaatkan karakteristik dan kearifan lokal. Dalam kaitan ini dibutuhkan profil guru yang memahami hakikat pendidikan dan mampu membaca keadaan, serta memiliki jiwa kreatif, inovatif dan berwawasan luas. Prinsip kurikulum seperti ini sangat relevan mengingat perubahan yang ada dalam masyarakat begitu cepat sehingga banyak hal menjadi cepat usang.

Ketiga pengembangan kurikulum selayaknya dilakukan secara simultan dengan pengembangan bahan ajar (buku dan lembar kerja peserta didik) dan media atau alat pembelajaran. Pengembangan sistem satu paket ini akan mengurangi kecenderungan deviasi tujuan pokok-pokok bahasan yang diajarkan, karena selama ini ketiga komponen penunjang pembelajaran tersebut dikembangkan secara terpisah.

Kempat, kurikulum pendidikan hendaknya berpatokan pada standar global dan regional, berwawasan nasional, dan dilaksanakan secara lokal. Dengan demikian, kualitas kurikulum pendidikan setara dengan negara-negara lain yang mempunyai wawasan keunggulan, namun dapat disesuaikan dengan kondisi lokal yang berbeda-beda.

Kelima, kurikulum pendidikan hendaknya merupakan satu kesatuan dan kesinambungan dengan satupun dan jenjang pendidikan di atasnya. Dengan demikian, kurikulum satu satuan pendidikan merupakan landasan yang kokoh bagi kurikulum pada satuan pendidikan selanjutnya.

Keenam, pengembangan kurikulum bukan lagi menjadi otoritas pemerintah pusat tetapi merupakan *shared activity* dengan pemerintah daerah, bahkan komunitas. Ke depan pemerintah cukup menangani kurikulum pendidikan yang sifatnya inti (*core curriculum*), yang umumnya

meliputi: matematika, IPA dan Bahasa, sedangkan kurikulum yang meliputi exanted disusun dan dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya.

Ketujuh, pengembangan tidak diarahkan untuk menciptakan satu kurikulum tunggal yang diberlakukan untuk semua sekolah. Kurikulum pendidikan hendaknya dapat dibedakan untuk kelompok anak rata-rata, baik karena faktor bawaan atau karena faktor ketersediaan sumber daya pendukung. Pemberlakuan kurikulum yang berbeda ini juga menuntut cara perbedaan cara mengukur tingkat pencapaian tujuan pembelajaran untuk setiap kelompok anak tersebut.

Kedelapan, kurikulum juga mesti memperhatikan pendidikan yang terjadi di keluarga dan komunitas. Pendidikan di sekolah jelas akan sulit tercapai tanpa dukungan pendidikan di keluarga dan masyarakat. Ketiga komponen (sekolah, keluarga dan komunitas) tersebut menjadi pilar pendidikan sehingga kegiatan dan proses pendidikan merupakan *shared activity* dari ketiga pilar pendidikan tersebut.

Kedelapan indikator tersebut harus dicermati sehingga para pengambil kebijakan dan pelaksananya dapat menjadi indikator tersebut dalam memaksimalkan upaya pengembangan atau perubahan kurikulum ke arah yang lebih baik. terutama suatu kurikulum yang mampu menjadi pedoman pendidikan dan pembelajaran di satu sisi dan sesuai dengan kebudayaan bangsa, dan mampu memenuhi kebutuhan anak didik untuk memaksimalkan kecerdasannya, baik kecerdasan intelektual, spiritual, estetika, dan kecerdasan emosional dan sosial. Dengan begitu kurikulum yang terus dikembangkan diharapkan mampu merespon dinamika kemajuan sains dan teknologi, dengan tetap konsisten dengan nilai agama dan moral bangsa, sekaligus memenuhi keperluan anak untuk hidup dalam zaman yang berbeda.

C. RELASI ANTARA PENDIDIKAN DAN KURIKULUM

Pendidikan merupakan gejala kebudayaan yang terus mengalami kemajuan sepanjang kehidupan umat manusia. Karena itu, pendidikan menjadi sesuatu yang khas manusia, karena kegiatannya berlangsung dalam konteks memanusiakan manusia melalui kegiatan pendidikan, dimungkinkan potensi-potensi yang dimiliki setiap pribadi anak dapat berkembang, melalui pembelajaran yang berpedoman kepada kurikulum

yang ditetapkan untuk dilaksanakan pada setiap sekolah. Karena sebagai suatu sistem, maka pendidikan memiliki komponen tujuan, anak didik, pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen, sarana dan prasarana, dan kurikulum pendidikan.

Proses pendidikan berkenaan dengan semua upaya untuk mengembangkan sumberdaya manusia sedangkan manusia yang bermutu itu pada hakikatnya telah dijabarkan dan dirumuskan secara jelas dalam rumusan tujuan pendidikan dan tujuan pendidikan itu sendiri searah dengan tujuan pembangunan secara keseluruhan.¹⁸

Dalam konteks pendidikan, maka para pengelola sekolah menempatkan kurikulum sebagai satu unsur dalam pendidikan. Dengan demikian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka mencapai upaya pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan oleh para perencana dan pengelola pendidikan.

Pendidikan harus mampu menghasilkan manusia yang unggul secara intelektual, mantap secara moral, kompetensi menguasai IPTEK, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berbagai peran sosial. Pada level makro, dibutuhkan suatu sistem pendidikan nasional yang demokratis, desentralisasi, dan berorientasi pada kemajemukan, semua itu tercermin di antaranya dalam pemerataan dan aksesibilitas kesempatan pendidikan. Desentralisasi kewenangan pendidikan yang harus disertai dengan kebijakan-kebijakan yang mengatur manajemen mutu. Pada level mikro, proses pendidikan harus terjadi dalam iklim demokratis, kesempatan melakukan diversifikasi secara profesional dalam koridor mencerdaskan kehidupan bangsa ini.¹⁹

Suatu kebijakan yang perlu terus dievaluasi adalah berkenaan dengan kurikulum pendidikan nasional. Keberadaan kurikulum dapat dipahami sebagai program mata pelajaran, seperti halnya bahasa Inggris,

¹⁸ Oemar Hamalik. (2008). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h.75.

¹⁹Hasballah.(2016). *Kebijakan Pendidikan*.Jakarta: Rajawali Press, h.5.

aljabar, sejarah, ekonomi dan lainnya termasuk ilmu pengetahuan modern, serta teknologi. Dengan kata lain kurikulum mencakup suatu daftar atau judul mata pelajaran yang disampaikan oleh sekolah. Pandangan lain menyebutkan bahwa kurikulum adalah isi mata pelajaran tertentu dalam program atau data dan informasi yang terekam dalam membimbing pelajar melalui buku catatan yang diperlukan dan disediakan dalam rencana pembelajaran. Selain itu kurikulum adalah pengalaman pembelajaran yang direncanakan sekolah. Saat belakangan ini definisi kurikulum sudah berubah dari isi mata pelajaran dan daftar mata pelajaran atau mata kuliah kepada semua pengalaman yang diberikan kepada pelajar dibawah pengawasan dan pengaturan sekolah. Sejatinya, pemahaman yang lebih luas tentang kurikulum berkenaan dengan pengalaman pelajar. Tegasnya kurikulum adalah semua pengalaman anak di bawah bimbingan guru-guru melalui pembelajaran, latihan, bimbingan dan pembinaan yang harus diikuti guna mencapai pengetahuan, kompetensi dan sikap yang diharapkan.

Kurikulum merupakan rencana pendidikan yang memberi pedoman tentang jenis, lingkup dan urutan materi, serta proses pendidikan. Di sini kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan manusia seutuhnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tegasnya tujuan yang hendak dicapai harus teruraikan dalam program yang termuat dalam kurikulum, bahkan program itulah yang mencerminkan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran berkelanjutan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan pada lembaga pendidikan.

Dalam konteks ini, kurikulum merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran pada suatu lembaga pendidikan. Segala hal yang harus diketahui, dipahami, dihayati, diamalkan, dan dialami peserta didik harus ditetapkan dalam kurikulum. Kurikulum menguraikan secara berencana bagaimana dan apa saja yang harus terjadi dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. Dengan demikian kurikulum pendidikan tidak hanya penjabaran mengenai serangkaian ilmu pengetahuan yang harus diajarkan oleh pendidik atau guru kepada peserta didik dan anak didik mempelajarinya, akan tetapi juga segala

kegiatan yang bersifat kependidikan yang dianggap perlu karena memiliki pengaruh terhadap anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Dapat disimpulkan bahwa antara pendidikan dengan kurikulum memiliki hubungan fungsional, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional diperlukan kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran sebagai kegiatan yang sangat menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Perubahan perilaku anak didik sebagai arah dan sasaran pendidikan, hanya mungkin tercapai bila kurikulum pendidikan benar-benar relevan dengan kebutuhan anak didik sesuai dengan dinamika bangsa.

Keberadaan kurikulum sangat strategis dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru dan tenaga kependidikan memiliki peran untuk mendukung maksimalisasi pencapaian tujuan pembelajaran, yang ditandai dari perubahan tingkah laku peserta didik, baik domain kognitif, afektif dan psikomotorik. Dengan begitu, peserta didik benar-benar mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan dan direncanakan oleh guru melalui proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan menuntut pengembangan kurikulum yang dapat meminimalkan angka putus sekolah dan mengulang kelas, penyelenggaraan pendidikan secara terbuka dan polivalen lintas jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem belajar jarak jauh. Pengembangan kurikulum yang berorientasi pada mutu pendidikan ditandai dengan pelaksanaan proses pembelajaran efektif, penilaian hasil belajar yang berkelanjutan dan memberdayakan peserta didik, dan penyelenggaraan pendidikan yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta sesuai dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhan.²⁰

Di satu sisi perubahan besar terjadi dengan cara derasnya penyebaran informasi yang dapat diakses dengan komputer cenderung menciptakan

²⁰ Oemar Hamalik. (2008). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h.4.

perubahan baru dalam berbagai aspek pendidikan. Pada saat ini dan masa depan, internet menjadi faktor potensial menghubungkan pelajar dengan sumberdaya pembelajaran yang signifikan dan tidak diperoleh pada masa sebelumnya. Diyakini bahwa internet akan terjadi, jika tidak ada kesiapan terhadap kemudahan yang ditawarkan internet dengan berbagai dampak yang dipublikasikannya, maka para guru perlu mendefinisikan ulang mata pelajaran dan penugasan yang diberikan kepada peserta didik. Disisi lain dalam keadaan demikian, bahwa masyarakat perlu menyiapkan generasi muda untuk memperoleh pendidikan dari sekolah. Pendidikan perlu berkomitmen bagi beragam sasaran, bahkan hal penting adalah pembelajaran menjadi sangat perlu dikembangkan. Secara fisik maka ruang sekolah akan berubah secara drastis dalam tampilannya di masa depan. Pengorganisasian dan pembiayaan bagi pembelajaran berbasis kepada masyarakat dan guru akan terus menerus menyediakan pembelajaran bagi kelompok peserta didik dalam ruang yang tidak menetap.²¹

Neil Burton dan Mark Brundrett, menjelaskan untuk mengantisipasi perubahan abad ini, ada harapan bahwa para kepala sekolah dasar perlu mendelegasikan tanggung jawab dari berbagai aspek manajemen kurikulum kepada guru dengan bidang khusus keahlian atau harapan. Sedangkan bagi sekolah menengah, ada sebagian harapan pada keseluruhan manajemen organisasi didasarkan atas hasil rumusan mata pelajaran oleh tim, yang secara natural mengarah kepada indentifikasi atau memajukan kepada tanggung jawab untuk pendelegasian pekerjaan kepada guru umum yang fokus dikenali pada usia anak.²²

Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran memberikan makna bahwa di dalam kurikulum terdapat panduan interaksi antara pendidik/guru dan peserta didik. Dengan demikian kurikulum berfungsi sebagai jantung dari proses pendidikan di sekolah untuk memberdayakan potensi peserta didik. Panduan interaksi antara guru dan peserta didik biasanya disebut pembelajaran. Dengan begitu, pembelajaran

²¹ Richard L Arends.(2004). *Learning to Teach*, New York: McGraw Hill, h.8-9.

²² Neil Burton and Mark Brundrett. (2005). *Leading the Curriculum in the Primary School*, London: Paul Chapman, h.2.

akan lebih optimal jika didukung kurikulum sebagai pedoman atau panduannya.²³

Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan kurikulum harus berorientasi pada tujuan pendidikan yang jelas, pandangan tentang anak yang tepat, pandangan tentang proses pembelajaran yang benar, pandangan tentang lingkungan yang konstruktif, konsepsi peranan guru yang efektif, dan sistem evaluasi yang valid. Dengan orientasi pengembangan kurikulum yang jelas, benar, dan tepat diharapkan pengembangan dan implementasi kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan dapat mencapai tujuan dan mutu pendidikan yang diharapkan.²⁴

Empat indikator kompetensi pengembangan kurikulum tersebut yang harus diwujudkan oleh guru secara kongkrit dan teramati dalam praktik dengan bukti sebagai berikut:

1. Guru telah menyusun RPP sesuai dengan silabus dalam kurikulum sekolah.
2. Guru menyampaikan materi pembelajaran dengan lancar, jelas, dan lengkap.
3. Guru menyesuaikan materi yang diajarkan dengan usia, latar belakang, dan tingkat perkembangan peserta didik.
4. Guru menghubungkan materi yang diajarkan dengan lingkungan dan kehidupan sehari-hari peserta didik.
5. Materi yang diajarkan guru adalah materi yang mutakhir.
6. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru mencakup berbagai tipe pembelajaran peserta didik.
7. Guru membantu mengembangkan kemampuan atau keterampilan generic peserta didik (kreativitas, berfikir kritis, berfikir inovatif, pemecahan masalah, dan sebagainya).
8. Guru menjelaskan bagaimana memanfaatkan hasil pembelajaran yang dilaksanakan untuk mengembangkan topik pembelajaran berikutnya.²⁵

²³ Teguh Triwiyanto. (2015). *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, h.4.

²⁴ Hairun Nusuf, Ed. (2014). *Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 3.

²⁵ *Ibid*

Pengakuan terhadap kurangnya perencanaan sangat sering terjadi selama pelaksanaan tugas, bahkan banyak komentar atas kegagalan pendidik untuk menghadirkan suatu tugas yang mencukupi sebab, mereka tidak memiliki kejelasan pemikiran mereka tentang apa yang harus diusahakannya. Hal itu ditandai dari ketidakpercayaan mereka tentang kejelasan tujuan kegiatan lembaga dalam pikiran mereka dan konsekuensinya para pendidik tidak mempercayai sesuatu yang baik diberikan kepada pemikiran murid-muridnya. Para pendidik menyadari bahwa perencanaan dan persiapan tidak sederhana, pengetahuan apa yang akan diberikan atau apakah memiliki materi yang sesuai untuk anak, tetapi juga pengetahuan bagaimana interaksi belajar dengan anak khususnya ketika dikenakan tugas. Hubungan yang hampir sama antara kurang jelasnya pengajaran sebagaimana halnya kurangnya pemikiran dan kurang pemahaman oleh peserta didik semuanya dicatat dalam pembelajaran hal yang juga penting adalah pencatatan terhadap latar belakang utama dalam pemahaman tentang rencana pembelajaran.²⁶

Pengertian kurikulum menurut pandangan lama atau sering disebut pandangan tradisional merumuskan, bahwa: kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah.

Implikasi dari pengertian ini adalah, bahwa:

1. Kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran. Mata pelajaran pada hakikatnya adalah pengalaman nenek moyang masa lampau. Pengalaman-pengalaman itu dipilih, dianalisa, kemudian disusun secara sistematis dan logis, sehingga timbullah matapelajaran, seperti: sejarah, ilmu bumi, ilmu hayat, ilmu sosial dan sebagainya.
2. Matapelajaran itu adalah sejumlah informasi/pengetahuan, sehingga penyampaian matapelajaran kepada para peserta didik akan membentuk mereka menjadi manusia intelektualitas.
3. Matapelajaran itu menggambarkan kebudayaan masa lampau. Pengajaran berarti penyampaian kebudayaan kepada generasi muda.

²⁶ Neville Bennett dan Clive Carre, Ed. (1993). *Learning*, London: Routledge, h. 155.

4. Tujuan mempelajari matapelajaran itu adalah untuk memperoleh ijazah, ijazah sebagai tujuan menguasai matapelajaran berarti telah mencapai tujuan belajar.
5. Terdapat aspek keharusan bagi setiap siswa mempelajari matapelajaran yang sama. Faktor minat dan kebutuhan siswa tidak dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum.
6. Sistem penyampaian yang digunakan oleh pendidik adalah sistem penuangan (imposisi). Pendidik lebih banyak aktif dalam belajar, sedangkan peserta didik lebih bersifat pasif belaka.²⁷

Sedangkan kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu *curere*, secara harfiah dipahami sebagai lapangan perlombaan lari. Lapangan tersebut adalah batas start dan batas finish. Dalam lapangan pendidikan pengertian tersebut dijabarkan bahwa bahan belajar sudah ditentukan secara pasti dari mana mulai dibelajarkan dan kapan diakhiri dan bagaimana cara untuk menguasai bahan agar dapat mencapai gelar. Dulu kurikulum pernah diartikan sebagai “Rencana Pelajaran”, yang terbagi menjadi rencana pelajaran minimum dan rencana pelajaran terurai.²⁸

Lebih lanjut dijelaskan oleh Dakir, kurikulum merupakan program pendidikan bukan sekedar program pengajaran, yaitu program yang direncanakan diprogramkan dan dirancangan yang berisi berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar baik yang berasal dari waktu lalu, sekarang maupun yang akan datang.²⁹

Seperti apa mutu lulusan pendidikan, tergambar dalam kurikulum sekolah yang salah satunya diturunkan dalam bentuk mata pelajaran.³⁰ Dengan demikian, penyusunan mata pelajaran dengan perangkat pembelajaran, baik tujuan/kompetensi, metode, media, dan evaluasi ditetapkan dalam kurikulum untuk menjadi pedoman sekolah, khususnya guru dalam mewujudkan kurikulum menjadi pembelajaran yang realistik dan bermakna bagi perubahan perilaku anak didik.

²⁷Oemar Hamalik. (1990), *Pengembangan Kurikulum Dasar-Dasar dan Pengembangannya*, Bandung: Mandar Maju, h.5.

²⁸Dakir. (2010). *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: Bum Aksara, h.2.

²⁹*Ibid*, h.3.

³⁰Jejen Musfah. (2017). *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana, h.15.

Kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistemik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.³¹

Kedudukan kepala sekolah nampak jelas sebagai faktor kunci dalam konteks keberhasilan pendidikan. Sejatinya, kepemimpinan sangat menentukan di samping manajemen sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer dalam mengarahkan perubahan, menunjukkan hal-hal berikut: (1) Keteraturan struktur, (2) Fungsi pemeliharaan dari hari demi hari, (3) Jaminan terhadap pelaksanaan pekerjaan, (4) Pemantauan terhadap hasil pekerjaan, (5) Efisiensi. Sedangkan kepemimpinan berkenaan dengan, kegiatan: yaitu: (1) perilaku pribadi dan interpersonal, (2) fokus ke masa depan, (3) perubahan dan pengembangan, (4) kualitas, dan (5) efektivitas.³²

Dengan begitu peran kepala sekolah sangat menentukan arah dan maksimalisasi pelaksanaan kurikulum sebagai bagian integral dari pengembangan kurikulum untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai melalui pembelajaran yang efektif. Itu artinya, pelaksanaan kurikulum menjadi tanggung jawab sekolah sehingga apa yang diharapkan dari proses pembelajaran untuk mencapai perubahan perilaku (kognitif, afektif dan psikomotorik) benar-benar terwujud yang ditandai dari hasil belajar yang tinggi, serta akhlak dan moral anak yang baik.

D. PENDEKATAN SISTEM PENDIDIKAN

Pendidikan adalah dipandang sebagai suatu sistem, karena memiliki sejumlah unsur/sub sistem yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan dan berfungsi untuk mencapai tujuan sistem. Dalam pendekatan sistem, maka pendidikan memiliki unsur-unsur, yaitu:

1. Unsur peserta sebagai bahan mentah (*raw input*) yang akan berubah, sebagai akibat dari proses pendidikan yang berlangsung di dalam sistem.

³¹ Dakir, *op.cit*, h.3.

³²David H. Hargreaves and David Hopkins.(1994). *Development Planning for School Improvement*, London: Cassel Viliers House, h.117.

2. Unsur tujuan pendidikan yang merupakan sasaran yang akan dicapai atau hasil proses pelatihan (*out put*) yang keluar dari sistem.
3. Unsur instrumen (instrumental input) yang menentukan hasil dari sistem pendidikan mencakup :
 - a. Kurikulum yang meliputi
 - 1) Organisasi dan pendekatan
 - 2) Administrasi dan pendekatan
 - 3) Materi dan kurikulum
 - 4) Metode dan strategi pembelajaran
 - b. Evaluasi
 - c. Pengelolaan
 - d. Ketenagaan
 - e. Bimbingan dan pembinaan
 - f. Pembiayaan
 - g. Fasilitas dan alat-alat pendidikan
4. Unsur lingkungan misalnya: lingkungan organisasi dan masyarakat serta kultural, yang merupakan faktor yang berpengaruh terhadap proses pendidikan yang sedang berlangsung.

Salah satu unsur pendekatan sistem yang banyak dikembangkan adalah "*Program Evaluation and Review Technique*" (PERT) yang merupakan mekanisme kerja secara menyeluruh yang menggambarkan kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian dari suatu program pendidikan. Mekanisme kerja tersebut dapat diterapkan dalam bidang pendidikan dengan kegiatan-kegiatan (1) pembakuan program pendidikan, (2) pencetakan dan distribusi, (3) penyusunan program kegiatan, (4) pelaksanaan penataran bagi tenaga-tenaga dalam pendidikan, (5) penataan bagi para guru (6) menyusun program penyampaian pendekatan pembelajaran.

Dalam konteks ini manajemen pendidikan menjadi sub sistem yang menentukan hasil pembelajaran, sebagai bagian integral kegiatan pendidikan.

1. Tujuan manajemen Pendidikan

Sesuai dengan uraian-uraian terdahulu yang berhubungan dengan pengertian dan hakikat manajemen pendidikan, maka tujuan manajemen pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Secara umum, manajemen pendidikan bertujuan untuk menyusun suatu sistem pengelolaan yang meliputi:
 - 1) Administrasi dan organisasi kurikulum
 - 2) Pengelolaan dan ketenagaan
 - 3) Pengelolaan sarana dan prasarana
 - 4) Pengelolaan pembiayaan
 - 5) Pengelolaan media pendidikan
 - 6) Pengelolaan hubungan dengan masyarakat, yang manajemen keterlaksanaan proses pembelajaran yang Relevan, efektif dan efisien yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan.
- b. Secara khusus manajemen manajemen pendidikan bertujuan terciptanya sistem pengelolaan yang relevan, efektif dan efisien yang dapat dilaksanakan dan mencapai sasaran dengan suatu pola struktur organisasi pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antara pimpinan/pengelola program, tenaga pelatih fasilitator, tenaga perpustakaan, tenaga teknis lainnya, tenaga tata usaha, dan tenaga pembinaan/pembimbing.
- c. Lancarnya pengelolaan program pendidikan
- d. Keterlaksanaan proses pembelajaran berdasarkan pendekatan cara belajar siswa aktif.

2. Fungsi-fungsi Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan mempunyai fungsi yang terpadu dengan proses pendidikan khususnya dengan pengelolaan proses pembelajaran. Dalam hubungan ini terdapat beberapa fungsi manajemen pendidikan sebagai berikut:

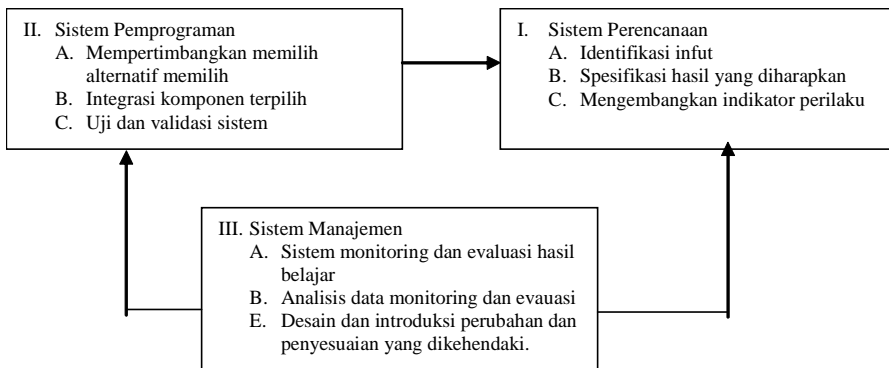
- a. Fungsi perencanaan, mencakup berbagai kegiatan menentukan kebutuhan, penentuan strategi pencapaian tujuan, menentukan isi program pendidikan dan lain-lain. Dalam rangka pengelolaan perlu dilakukan kegiatan penyusunan rencana, yang menjangkau ke depan untuk memperbaiki keadaan dan memenuhi kebutuhan dikemudian hari, menentukan tujuan yang hendak ditempuh, menyusun program yang meliputi pendekatan, jenis dan urutan kegiatan, menetapkan

rencana biaya yang diperlukan serta menentukan jadwal dan proses kerja.

- b. Fungsi organisasi, meliputi pengelolaan ketenagaan, sarana dan prasarana, distribusi tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan secara integral. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan-kegiatan seperti: mengidentifikasi jenis dan tugas tanggungjawab dan wewenang, merumuskan aturan hubungan kerja.
- c. Fungsi koordinasi, yang berupaya menstabilisasi antara berbagai tugas, tanggungjawab dan kewenangan untuk menjamin pelaksanaan dan berhasil program pendidikan.
- d. Fungsi motivasi (penggerak), yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi proses dan keberhasilan program pelatihan. Hal ini diperlukan sehubungan dengan adanya pembagian tugas dan tanggungjawab serta kewenangan tadi, sehingga terjadi peningkatan kegiatan personal, yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan keberhasilan program ini.
- e. Fungsi Kontrol, yang berupaya melakukan pengawasan, penilaian, monitoring, perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan dalam sistem manajemen pendidikan tersebut.

3. Strategi sistem dalam Pendidikan

Dari sudut pola pikir sistem dalam pendidikan, maka terdapat tiga komponen utama yang saling mendukung, yakni (1) sistem perencanaan yang berkenaan dengan identifikasi input, spesifikasi hasil yang diharapkan dan mengembangkan indikator perilaku, (2) sistem pemrograman yang berkenaan dengan memilih alternatif komponen, integrasi komponen dan uji validasi sistem, (3) sistem manajemen yang berkenaan dengan monitoring evaluasi analisis data, desain perubahan dan penyesuaian. Ketiga sistem tersebut terkait, dan sistem manajemen menunjang sistem perencanaan dan sistem pemrograman; yang merupakan strategi terpadu. Perhatikan bagan di bawah ini.



Strategi sistem dalam Pendidikan

Keberadaan kurikulum menempati fungsi strategis dalam konteks pelaksanaan pendidikan di setiap sekolah, sejak dari pendidikan pra sekolah, dasar, menengah dan pendidikan tinggi dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang unggul dalam segala aspek kepribadian manusia. Di sini dipahami bahwa kurikulum merupakan kerangka konseptual yang disusun untuk dilaksanakan dalam wujud pembelajaran yang berisikan tujuan atau kompetensi, mata pelajaran beserta isinya, metode, sumber belajar, media, dan evaluasi. Perancang dan pelaksanaannya di tingkat sekolah adalah kepala sekolah, staf, guru dan tenaga kependidikan. Karena itu, kurikulum menjadi pedoman bagi sekolah dalam membelajarkan siswa untuk mencapai hasil belajar yang berwujud perubahan tingkah laku. Untuk itu, kurikulum ditempatkan juga sebagai alat dalam mewujudkan pembelajaran. Sebagai pedoman tertulis maka peranan guru sangat strategis dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kurikulum baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

Bidang manajerial kurikulum di sekolah menjadi bagian integral dari manajemen pendidikan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dengan bekerjasama secara intensif dan berkelanjutan dengan staf, guru-guru, tatausaha, pegawai, komite sekolah dan pengawas pendidikan. Oleh sebab itu, manajemen pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas keterlaksanaan sistem proses belajar mengajar, yang meliputi manajemen/administrasi kurikulum, program ketenagaan, program sarana dan prasarana, program pembiayaan dan program hubungan dengan masyarakat. Kelima jenis program tersebut mempunyai implikasi

tertentu dalam kerangka pengembangan kurikulum. Manajemen atau administrasi kurikulum yang mencakup sistem penyampaian, media dan bimbingan diperlukan faktor pertimbangan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Manajemen atau administrasi kurikulum (dalam arti sempit) merupakan kegiatan-kegiatan yang manajerial/administratif yang bersifat teknis memberikan dukungan yang cukup besar dalam proses manajemen kurikulum, sebagaimana halnya dengan manajemen/administrasi perkantoran bersama dengan berbagai instrumen yang memadai.

Program ketenagaan, meliputi semua unsur ketenagaan yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum, baik dari lingkungan departemen/instansional, maupun dari lingkungan sistem sekolah, baik dari kelompok ahli dari berbagai bidang, dan lembaga kemasyarakatan dan orangtua. Kebutuhan ketenagaan dalam jumlah dan kualitas kemampuan dirancang dan direncanakan secara seksama. Unsur tenaga ahli kurikulum, pejabat instansi, ahli dalam bidang studi, supervisor dan administrator yang berpengalaman sangat dibutuhkan dalam rangka kegiatan dan proses perencanaan kurikulum. Administrator sekolah, pada pengawas dan guru-guru harus disiapkan sedemikian rupa agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka implementasi kurikulum di sekolah/lembaga pendidikan lainnya. Para pakar kurikulum, konsultan dan unsur-unsur terkait harus disiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas monitoring dan evaluasi kurikulum. Itu sebabnya, program ketenagaan menjadi unsur yang sangat penting dan sekaligus merupakan faktor kunci dalam pengembangan kurikulum secara keseluruhan.

Program sarana dan prasarana, berkenaan dengan semua fasilitas perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Dalam rangka kegiatan perencanaan kurikulum diperlukan dalam rangka kegiatan perencanaan kurikulum diperlukan fasilitas ruangan pertemuan serta perlengkapan perkantoran yang memenuhi persyaratan kualitas. Dalam rangka implementasi kurikulum dibutuhkan bantuan sekolah, perlengkapan dan peralatan pendidikan/pembelajaran yang layak dan dalam jumlah yang cukup memadai. Hal serupa juga bertalian dengan kebutuhan fasilitas, perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan evaluasi dan perbaikan kurikulum. Jumlah dan jenis fasilitas berkualitas, perlengkapan

dan peralatan supaya direncanakan sesuai dengan kebutuhan kurikulum yang masing-masing jenjang dan satuan pendidikan.

Program pembiayaan, merupakan unsur penunjang yang sangat penting dalam kerangka pengembangan kurikulum dan perlu direncanakan secara teliti dan seksama. Program pembiayaan itu berkenaan dengan kebutuhan biaya untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Program ini meliputi biaya unsur ketenagaan, pengadaan fasilitas, perlengkapan dan peralatan, biaya yang berarti, program pembiayaan pendidikan harus mencakup program pembiayaan pengembangan kurikulum secara menyeluruh.

Program hubungan dengan masyarakat, meliputi pengembangan kurikulum secara nasional, pengembangan kurikulum tingkat provinsi, pengembangan kurikulum tingkat daerah kabupaten, dan pengembangan kurikulum tingkat sekolah sebagai kurikulum unggulan, pada gilirannya perlu melibatkan masyarakat pada semua jenjang sosial. Hal ini perlu di program pola dan struktur hubungan, kerjasama, dan kemitraan antara lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga bisnis dan industri. Bila hubungan itu harmonis dan efektif maka pihak masyarakat bersedia memberikan kontribusi dalam proses, pengembangan kurikulum dan memberikan kemudahan untuk mensosialisasikan kurikulum kepada masyarakat.

BAB II

KONSEP DASAR MANAJEMEN KURIKULUM

A. PENGERTIAN MANAJEMEN KURIKULUM

Tntuk memahami secara lebih mendalam tentang manajemen kurikulum, maka perlu terlebih dahulu dikemukakan beberapa definisi manajemen kurikulum. Dengan pengajuan pendapat sejumlah pakar pendidikan dan kurikulum, maka dapat dijadikan dasar pemahaman yang lebih luas tentang manajemen kurikulum.

Salah satu pendapat menjelaskan bahwa manajemen kurikulum khususnya merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsip dasar manajemen kurikulum ini berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Tahapan manajemen kurikulum di sekolah dilakukan melalui empat tahap: a) perencanaan; b) pengorganisasian; c) pelaksanaan; d) pengendalian.¹

Di sini muara proses dan aktivitas manajemen adalah mencapai efektivitas. Karena itu, fungsi manajemen yang melalui sejumlah proses dan aktivitas dalam organisasi adalah mempertemukan efektivitas individu manajer dan pekerja, efektivitas kelompok (unit tugas), dan efektivitas organisasi (totalitas sistem) yang bermuara kepada pencapaian tujuan

¹ Dinn Wahyudin.(2014). *Manajemen Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 18-19.

akhir organisasi. Setidaknya tujuan yang dicapai adalah produksi berkualitas tinggi, pelayanan yang baik dan kepuasan kerja pada pegawai. Di sini diharapkan benar-benar menyatu tujuan individu, tujuan kelompok dan tujuan organisasi dalam jangka waktu lama. Jadi berbagai dimensi yang mendorong pencapaian efektivitas individu, kelompok dan organisasi saling terkait sebagai suatu kesatuan yang bersifat sistemik. Apalagi konsep organisasi sebagai sistem sosial memang telah memberikan kontribusi penting bagi kelangsungan hidup organisasi dalam berbagai jenis dan aktivitasnya untuk kesejahteraan umat manusia.

Pakar lain menjelaskan bahwa: "*Management is the attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning, organizing, leading and controlling organizational resources.*"² Itu artinya manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumberdaya organisasi.

Tegasnya, kegiatan manajemen selalu saja melibatkan alokasi dan pengendalian uang, sumberdaya manusia dan fisik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebagai ilmu, manajemen memiliki pendekatan sistemik yang selalu digunakan dalam memecahkan masalah. Pendekatan manajemen bertujuan untuk menganalisis proses, membangun kerangka konseptual kerja, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mendasarinya dan membangun teori manajemen dengan menggunakan pendekatan tersebut. Karena itu, manajemen adalah proses universal berkenaan dengan adanya jenis lembaga, berbagai posisi dalam lembaga, atau pengalaman pada lingkungan yang beragam luasnya antara berbagai persoalan kehidupan.

Apa sebenarnya peranan manajer? Meminjam pendapat Henry Mintzberg's, ada tiga peran utama manajer. Dengan demikian, paling tidak ada tiga peran utama yang diharapkan dari perilaku para manajer sebagai orang yang menjalankan kegiatan manajemen sebagai profesional, yaitu:

- 1) Peran interpersonal, mencakup hasil dari kedudukannya, yaitu: (a) sebagai tokoh, sebagai pimpinan unit kerja (bagian, departemen, atau seksi), maka seorang manajer secara rutin mengerjakan kewajiban

² Richard L. Daft.(2010). *Management*. New Jersey: Prentice Hall, h.5.

tertentu secara rutin, (b) sebagai pemimpin, seorang manajer menciptakan lingkungan, bekerja untuk meningkatkan kinerja pegawai dan mengurangi konflik, memberikan umpan balik, dan mendorong pertumbuhan individu, (c) juru bicara, bagi pimpinan atasan atau bawahan, manajer berinteraksi dengan orang lain-teman sejawat dalam bagian lain, staf ahli, atau pegawai bidang lain dan penyedia serta klien. Dalam peran ini, para manajer dalam membangun sekaligus diharuskan membangun hubungan yang baik di dalam dan di luar organisasi.

- 2) Peran informasional, sebagai hasil dari hubungan di dalam dan di luar organisasi, maka manajer biasanya memiliki lebih banyak informasi dari pada bawahan atau anggota stafnya. Ada tiga peran kunci utama dalam hal ini yang dijalankan oleh manajer, yaitu: (a) sebagai pemantau, secara tetap manajer mamantau lingkungan untuk menentukan apa yang sedang berlangsung, maka manajer mengumpulkan informasi secara langsung dengan menanyakan masalah, dan secara tidak langsung dengan menerima informasi, (b) sebagai penyebar informasi, maka manajer memberikan beberapa informasi kepada bawahan yang diperlukan mereka, (c) juru bicara, seorang manajer selalu berbicara kepada unit kerjanya kepada orang-orang luar yang bekerja dalam unit kerjanya. Kadang-kaang sebagai juru bicara memberikan informasi kepada atasan, dan kadang memberikan informasi kepada bawahan.
- 3) Peran pengambilan keputusan, dalam melaksanakan peran keempat sebagai pengambil keputusan, para manajer membuat pilihan, secara pribadi atau bersama atau mempengaruhi pilihan yang lain, yaitu: (a) *enterpreneur*, yaitu manajer membagi dan memunculkan gagasan baru atau metode yang dapat meningkatkan kualitas kinerja pada unit operasional, maka manajer dapat memainkan peran sebagai wirausaha, (b) mengatasi kehancuran, dalam hal ini manajer menangani masalah kerusakan, seorang manajer menanganinya dengan membuat daftar masalah, kegagalan peralatan, menyerang, merusakkan kontrak, dan perilaku lain dari lingkungan kerja yang mengurangi produktivitas, (c) pengalokasian sumberdaya, yaitu manajer menentukan seseorang dalam unit kerja yang mengusahakan sumberdaya, uang, fasilitas, peralatan dan akses kepada manajer, (d) negosiator, yaitu: seorang

manajer harus menghabiskan waktu signifikan untuk bernegosiasi, sebab dengan hanya manajer yang memiliki informasi dan kewenangan yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut, termasuk bernegosiasi hal kontrak, dengan penyedia, pemilik sumberdaya di luar organisasi, dan kesepakatan dengan organisasi tenaga kerja.³

Keberadaan satu organisasi sebagaimana halnya berbagai departemen pada satu pemerintahan, khususnya departemen pendidikan dan kebudayaan, sekolah, akademi, universitas dan kewenangan lain dalam bidang pendidikan atau sistem pendidikan yang dikelola para ahli yang disebut manajer. Dalam hal ini, para manajer akan melakukan, yaitu: (1) pengintegrasian sumberdaya dalam mencapai sasaran secara efektif, (2) menjadi agen/pelopor perubahan yang efektif, (3) memelihara dan mengembangkan sumberdayanya.⁴

Tegasnya manajemen adalah tugas-tugas. Manajemen adalah disiplin ilmu. Tetapi manajemen juga merupakan orang-orang yang bekerja. Setiap pencapaian/prestasi manajemen adalah prestasi manajer. Setiap kegagalan adalah sebagai kegagalan manajer. Dengan demikian, organisasi merupakan sejumlah orang yang bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama, maka manajemen adalah usaha menggerakkan orang yang ada dalam organisasi melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan.

Menurut Zais,⁵ kurikulum dapat dipahami sebagai program mata pelajaran, seperti halnya bahasa Inggris, aljabar, sejarah, ekonomi dan lainnya. Dengan kata lain kurikulum mencakup suatu daftar atau judul mata pelajaran yang disampaikan oleh sekolah. Pandangan lain menyebutkan bahwa kurikulum adalah isi mata pelajaran tertentu dalam program atau data dan informasi yang terekam dalam membimbing pelajar melalui buku catatan yang diperlukan dan disediakan dalam rencana pembelajaran. Selain itu kurikulum adalah pengalaman pembelajaran yang direncanakan sekolah. Saat belakangan ini definisi kurikulum sudah berubah dari

³ Richard L Daft dan Dorothy Marcic.(2009). *Understanding Management*, London:South Western, h.22.

⁴ K.B Everard, Geoffrey Morris, dan Ian Wilson. (2004). *Effective School Management*, London: Paul Chapman Publishing, h.4.

⁵ Robert S. Zais. (1976). *Curriculum Principles and Foundation*. New York: Harper and Row Publishers, h.7.

isi mata pelajaran dan daftar mata pelajaran atau mata kuliah kepada semua pengalaman yang diberikan kepada pelajar dibawah pengawasan dan pengaturan sekolah.

Kemudian Ornstein dan Hunkins,⁶ mengajukan definisi yang lebih luas tentang kurikulum berkenaan dengan pengalaman pelajar. Tegasnya kurikulum adalah semua pengalaman anak di bawah bimbingan guru-guru.

Dari pendapat di atas dipahami bahwa Kurikulum merupakan rencana pendidikan yang memberi pedoman tentang jenis, lingkup dan urutan materi, serta proses pendidikan. Jika dikaitkan dengan pendidikan maka kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan manusia seutuhnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Hamalik, 1995:19). Tujuan yang hendak dicapai harus teruraikan dalam program yang termuat dalam kurikulum, bahkan program itulah yang mencerminkan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran.

Manajemen kurikulum adalah kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan perkembangan kehidupan peserta didik, maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan kokoh dan kuat.⁷ Salah satu landasan memperkuat bangunan kurikulum adalah landasan manajerial, sehingga manajemen kurikulum perlu dikembangkan dalam menyusun kurikulum baru, atau mengembangkan kurikulum yang sudah dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum adalah proses mendayagunakan semua unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan.

Bidang kurikulum dan pengajaran adalah satu bagian dari manajemen operasional pendidikan di sekolah secara mikro. Manajemen pendidikan

⁶Allan C. Ornstein dan Francis P. Hunkins.(1978). *Curriculum Foundations, Principles, and Issues*. New Jersey ; Prentice Hall, Englewood Cliffs, h.6.

⁷ *Ibid*, h.190.

di sekolah menjadi faktor signifikan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi keseluruhan kegiatan pendidikan dan pembinaan siswa di sekolah. Pencapaian tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikulum dan tujuan pembelajaran, atau standar kompetensi/kompetensi inti menjadi tanggung jawab manajemen pendidikan. Oleh sebab itu, kurikulum harus dikelola dengan efektif dan efisien untuk memastikan bahwa pembelajaran berlangsung efektif.

Dengan memadukan seluruh kekuatan sumberdaya organisasi sebagaimana dikemukakan di atas, maka berbagai kegiatan dilakukan dengan bekerjasama untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sebab dengan begitu, seluruh harapan yang dituangkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai jika sumberdaya manusia, para manajer, pimpinan, staf dan pegawai yang bekerjasama mencapai tujuan pribadi dan tujuan organisasi dalam melayani *stakeholders* di masyarakat.

Dalam konteks ini dapat dikemukakan pendapat lain yang menegaskan bahwa manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum.⁸

Manajemen kurikulum berkenaan dengan bagaimana kurikulum dirancang, diimplementasikan (dilaksanakan) dan dikendalikan (dievaluasi dan disempurnakan), oleh siapa, kapan, dan dalam lingkup mana. Manajemen kurikulum juga berkaitan dengan kebijakan siapa yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan mengendalikan kurikulum. Dari sudut mana pemberian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pengembangan kurikulum. Secara umum, dibedakan antara manajemen pengembangan kurikulum terpusat (*centralized curriculum development management* atau *top down curriculum development*) dan manajemen pengembangan kurikulum tersebar (*decentralized curriculum development management* atau *bottom up curriculum development*).⁹

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum adalah proses pendayagunaan sumberdaya kurikulum yang

⁸ Rusman. (2009). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Press, h.3.

⁹ Teguh Triwiyanto. (2015). *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, h.25.

mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan.

B. KEGIATAN MANAJEMEN KURIKULUM

Dalam konteks KTSP, Tita Lestari (2006) mengemukakan tentang siklus manajemen kurikulum yang terdiri dari empat tahap berikut.

1. Tahap perencanaan; meliputi langkah-langkah sebagai: 1) analisis kebutuhan; 2) merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofi; 3) menentukan desain kurikulum; 4) membuat rencana induk: pengembangan, pelaksanaan dan penilaian.
2. Tahap pengembangan, meliputi langkah-langkah: 1) perumusan rasional atau dasar pemikiran; 2) perumusan visi, misi dan tujuan; 3) penentuan struktur dan isi program; 4) pemilihan dan pengorganisasian materi; 5) pengorganisasian kegiatan pembelajaran; 6) pemilihan sumber, alat dan sarana belajar; 7) penentuan cara mengukur hasil belajar.
3. Tahap implementasi atau pelaksanaan meliputi langkah: 1) penyusunan rencana pembelajaran; 2) penjabaran materi; 3) penentuan strategi dan metode pembelajaran; 4) penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran; 5) penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar dan 6) *setting* lingkungan pembelajaran.
4. Tahap penilaian; untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian formatif maupun sumatif. Penilaian kurikulum dapat mencakup *context*, input, proses, produk (CIPP). Penilaian produk berfokus pada mengukur pencapaian proses pada akhir program (identik dengan evaluasi sumatif).¹⁰

Tahap atau proses manajemen kurikulum sebagaimana dikemukakan di atas memberikan pemahaman bahwa langkah atau proses manajemen kurikulum mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian untuk memastikan bahwa tujuan kurikulum benar-benar dapat tercapai. Dengan demikian, manajemen kurikulum menjadi tanggung jawab

¹⁰ *Ibid.*, h. 19.

para perencana, pelaksana dan pengawas pendidikan untuk menjamin bahwa pembelajaran berlangsung dengan baik dan menghasilkan pencapaian tujuan yang diinginkan sebagaimana ditunjukkan dalam perubahan perilaku anak didik. Dalam kondisi ini, pengetahuan anak didik terus bertambah dan berkembang, keterampilannya meningkat kepada yang lebih tinggi dan sikap kepribadiannya menjadi lebih baik.

C. RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN FUNGSI MANAJEMEN KURIKULUM

Manajemen merupakan proses atau kegiatan manajerial yang ada pada setiap organisasi. Setiap manajer atau pengelola organisasi pendidikan maka dipastikan melakukan penataan terhadap semua sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, faktor kurikulum sebagai isi dan proses aktivitas kurikulum menjadi bagian integral yang harus dikelola oleh para manajer setiap lembaga pendidikan.

Menurut Dinn Wahyudin.¹¹ lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pada satuan tingkat pendidikan kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dalam bentuk standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan dimana sekolah itu berada. Sedangkan menyangkut prinsip, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yakni sebagai berikut.

1. Produktivitas, hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum.
2. Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum.

¹¹ Dinn Wahyudin. *Op.cit.* h.20-21.

3. Kooperatif, untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum perlu adanya kerja sama positif dari berbagai pihak yang terlibat.
4. Efektivitas dan efisiensi, rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum.
5. Mengarahkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Ada beberapa fungsi dari manajemen kurikulum, diantaranya: 1) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum; 2) meningkatkan keadilan dan kesepakatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal; 3) meningkatkan relevansi dan efektifitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik; 4) meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas peserta didik; 5) meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar; 6) meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan.¹²

D. KARAKTERISTIK MANAJEMEN KURIKULUM

Manajemen kurikulum dalam konteks karakteristiknya dapat dilihat berdasarkan lingkup yang terbatas pada pelaksanaan kurikulum di suatu sekolah dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Aktivitas manajerial sebagaimana dimaksudkan mencakup pekerjaan yang sangat luas terutama proses menyiapkan naskah konseptual kurikulum. Adapun karakteristik perencanaan kurikulum, sebagai berikut:

1. Karakteristik Perencanaan Kurikulum

Karakteristik dalam hal perencanaan kurikulum terdiri dari:

- 1) Pengertian perencanaan kurikulum;
- 2) Fungsi perencanaan kurikulum;
- 3) Model perencanaan kurikulum;
- 4) Desain kurikulum.

¹² *Ibid.*, h. 20-21.

Secara lebih terperinci, karakteristik perencanaan kurikulum adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas,
- b. Perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komperhensif,
- c. Perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipasi.
- d. Tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat.
- e. Rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkret,
- f. Masyarakat luas mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengetahui berbagai hal,
- g. Dengan keahlian profesional mereka, pendidikan berhak dan bertanggung jawab mengidentifikasi program sekolah yang akan membimbing siswa,
- h. Perencanaan dan pengembangan kurikulum paling efektif jika dikerjakan secara bersama-sama,
- i. Perencanaan kurikulum harus memuat artikulasi program sekolah dan siswa pada jenjang dan tingkatan sekolah,
- j. Program sekolah harus dirancang untuk mengkoordinasikan semua unsur dalam kurikulum kerangka kerja pendidikan,
- k. Partisipasi kooperatif harus dilaksanakan dalam kegiatan perencanaan kurikulum,
- l. Dalam perencanaan kurikulum harus diadakan evaluasi secara kontiniu,
- m. Berbagai jenjang sekolah, dari TK sampai Perguruan Tinggi hendaknya merespons dan mengakomodasi perubahan, pertumbuhan dan perkembangan siswa.¹³

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik perencanaan kurikulum perlu diperhatikan perencana kurikulum, baik dalam kerangka penyusunan kurikulum yang benar-benar baru (perumusan awal), maupun dalam rangka pengembangan kurikulum agar sasaran

¹³ *Ibid.*, h. 22-23.

perencanaan kurikulum memenuhi harapan *stakeholders* pendidikan dan pertumbuhan dan perkembangan anak didik.

2. Karakteristik Pengorganisasian Kurikulum

Ada beberapa bentuk organisasi kurikulum yang masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu:

- a. Kurikulum mata pelajaran; memiliki ciri: 1) terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang terpisah; 2) tidak berdasarkan kebutuhan, minat, dan masalah yang dihadapi siswa; 3) bentuk kurikulum yang tidak dipertimbangkan kebutuhan, masalah, dan tuntutan masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang;
- b. Kurikulum dengan mata pelajaran berkorelasi; memiliki ciri: 1) berbagai mata pelajaran dikorelasikan satu dengan yang lainnya; 2) sudah dimulai adanya usaha yang merelevansikan pelajaran dengan permasalahan kehidupan sehari-hari; 3) metode penyampaian menggunakan metode korelasi.
- c. Kurikulum bidang studi; memiliki ciri-ciri: 1) kurikulum terdiri atas suatu bidang pengajaran, 2) sistem penyampaian bersifat terpadu, 3) minat, masalah, serta kebutuhan siswa dan masyarakat dipertimbangkan sebagai dasar penyusunan kurikulum.
- d. Kurikulum integrasi; memiliki ciri-ciri antara lain: 1) berdasarkan psikologi belajar, 2) berdasarkan kebutuhan, minat dan tingkat perkembangan siswa, 3) sistem penyampaian menggunakan sistem pengajaran unit, 4) peran guru sama aktifnya dengan peran siswa.
- e. Kurikulum inti; memiliki dua ciri-ciri yakni ciri-ciri pokok dan ciri-ciri umum. Ciri-ciri pokok antara lain core pelajaran meliputi pengalaman-pengalaman yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan semua siswa. Adapun ciri-ciri umum antara lain: a) perencanaan oleh guru-guru secara kooperatif; b) pengalaman belajar disusun dalam unit-unit yang luas komprehensif berdasarkan tantangan, minat, kebutuhan, dan masalah dari kalangan siswa dan masyarakat sekitarnya; c) guru dan siswa saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik;

d) pengalaman-pengalaman belajar bersifat fungsional serta melibatkan banyak kegiatan dan tanggung jawab terhadap para siswa.¹⁴

Kegiatan manajemen kurikulum berkaitan dengan dua hal, yaitu: (a) berkaitan dengan tugas guru, dan (b) berkaitan dengan proses pembelajaran.

a. Kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru.

Kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru ini meliputi:

- 1) *Pembagian tugas membelajarkan*, pembagian tugas biasanya dilakukan dalam rapat guru pada awal tahun pembelajaran atau menjelang awal semester baru.
- 2) *Pembagian tugas membina kegiatan ekstrakurikuler*. Kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan tambahan diluar kurikulum yang berlaku ini seperti kegiatan pramuka, koperasi, unit kesehatan sekolah, olahraga, kesenian, dan lain-lain.

b. Kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran.

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran meliputi:

- 1) *Penyusunan jadwal pembelajaran*. Jadwal pembelajaran merupakan penjabaran dari seluruh program pembelajaran di sekolah jadwal pembelajaran merupakan pedoman bagi guru bahwa dia akan membelajarkan dikelas mana dan hari apa saja, serta jam berapa saja.
- 2) *Penyusunan program pembelajaran*, kegiatan penyusunan program pembelajaran ini meliputi: (a) menghitung jumlah pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang harus disampaikan dalam jangka waktu tertentu (semester atau caturwulan); (b) menghitung jumlah jam pelajaran yang tersedia menurut kurikulum yang berlaku; (c) menghitung jumlah jam yang efektif pada semester atau caturwulan berdasarkan kalender akademik yang berlaku; (d) membuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk satu jangka waktu tertentu (satu semester atau caturwulan).
- 3) *Pengisian daftar kemajuan kelas*, menggambarkan tentang kemajuan kelas tentang penguasaan materi pelajaran.

¹⁴ *Ibid.*, h. 23-24.

- 4) *Kegiatan mengelolah kelas.* Merupakan upaya yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran bisa tercapai secara efektif dan efisien. Hal ini menyangkut strategi pembelajaran, pemanfaatan media, tempat duduk, dan lain-lain.
- 5) *Penyelenggaraan evaluasi hasil belajar.* Evaluasi hasil belajar berguna untuk mendapatkan umpan balik bagi guru tentang tercapainya tujuan pembelajaran.
- 6) *Laporan hasil pembelajaran.* Hasil belajar yang diperoleh oleh siswa harus dilaporkan kepada orang tua atau wali murid. Laporan kepada orang tua atau wali murid ini bisa disebut rapor.
- 7) *Kegiatan bimbingan dan penyuluhan.* Kegiatan bimbingan dan penyuluhan ditujukan bagi seluruh peserta didik disekolah tanpa terkecuali. Bimbingan dan penyuluhan tidak hanya untuk siswa yang bermasalah saja tetapi semua siswa, termasuk siswa yang berprestasi.

Sebagaimana dikemukakan Kemp dalam pusat kurikulum (2007:20) menegaskan bahwa kurikulum (desain kurikulum) dapat bervariasi mulai dari yang sepenuhnya standar (seluruh komponen dirumuskan secara tuntas oleh pusat), sebagian besar komponen (komponen dasar dan komponen utama), sebagian komponen dirumuskan oleh tim pusat, sedangkan komponen lainnya (penjabarannya) dikembangkan oleh daerah atau satuan satuan pendidikan, sampai dengan yang seluruh komponennya dikembangkan oleh satuan pendidikan. Kurikulum yang seluruh komponennya dikembangkan oleh pusat pengelolaannya sepenuhnya sentralistik, sedangkan kurikulum yang seluruh komponennya dikembangkan oleh satuan pendidikan pengelolaannya sepenuhnya desentralistik, dan kurikulum yang sebagian komponen dirumuskan oleh pusat dan sebagian oleh satuan pendidikan terletak diantaranya atau sentral-desentral. Manajemen sentral-desentral tersebut masih bervariasi, lebih berat kearah sentralisasi atau desentralisasi atau seimbang antara keduanya.

Berdasarkan pendapat di atas, manajemen pengembangan kurikulum dapat dilakukan melalui dua jenis, yaitu manajemen pengembangan kurikulum sentralistik dan manajemen pengembangan kurikulum desentralistik. Berikut uraian dari masing-masing jenis tersebut.

E. MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM SENTRALISTIK

Manajemen pengembangan kurikulum sentralistik berarti terpusat, yaitu pengembangan kurikulum berasal dari pusat (pemerintah). Pada negara yang bersifat kesatuan seperti Indonesia, sentralisasi ini berada pada tingkat pemerintah pusat, sedangkan pada negara federal sentralisasi berada pada tingkat pemerintah federal (pusat) atau tingkat negara bagian. Dalam manajemen pengembangan kurikulum yang terpusat atau sentralistik, bukan hanya tugas, wewenang dan tanggung jawab pengembangan kurikulum yang dipegang oleh pejabat pusat, tetapi juga inisiatif, gagasan, bahkan model kurikulum yang akan dikembangkan dapat berasal dari pemegang kekuasaan di pusat. Biasanya daerah atau sekolah sebagai penyelenggara pendidikan hanya mengembangkan kurikulum yang sudah ada.

Manajemen kurikulum sentralistik menghasilkan kurikulum nasional, satu kurikulum yang berlaku diseluruh wilayah negara. Dalam manajemen kurikulum sentralistik, bisa jadi seluruh perangkat kurikulum, mulai dari landasan atau dasar-dasar pengembangan kurikulum, struktur dan sebaran mata pelajaran, silabus atau garis besar program pembelajaran, rincian materi dan kegiatan pembelajaran, buku, media, alat-alat penunjang, penilaian hasil belajar beserta pedoman-pedoman pelaksanaannya disusun oleh pusat. Di pihak lain, bisa saja yang disusun oleh pusat. Di pihak lain, bisa saja yang disusun hanya landasan atau dasar-dasar penyusunan kurikulum, struktur dan sebaran mata pelajaran, sedangkan penjabaran lebih lanjut dalam silabus, satuan pelajaran, rincian materi, buku, media dan alat pembelajaran dikembangkan oleh daerah atau satuan pendidikan (sekolah).

- a. Kurikulum seragam untuk seluruh daerah dan sekolah, dapat dikembangkan standar kemampuan dan tingkat pencapaian yang bersifat nasional.
- b. Lebih mudah dalam pengendalian atau pengawasan dan evaluasinya karena kurikulum seragam.
- c. Pembinaan para pelaksana kurikulum lebih mudah karena pengetahuan dan keterampilan yang dituntut untuk melaksanakannya hampir sama.

- d. Penyediaan media dan sumber belajar lebih mudah karena jenisnya sama untuk setiap daerah dan satuan pendidikan dan
- e. Memungkinkan diadakan penilaian hasil belajar yang bersifat nasional karena desain atau rancangan kurikulum dan sasaran belajarnya sama untuk seluruh daerah dan satuan pendidikan.

Tabel 1
Ciri sentralistik pada kurikulum yang berlaku di Indonesia

| No. | Nama Kurikulum | Ciri Sentralistik |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Rencana Pelajaran 1960 | Rumusan Keputusan MPRS Nomor II/MPRS/1960 mengenai manusia sosialis Indonesia sebagai suatu bagian dari sosialisme Indonesia yang menjadi tujuan pembangunan nasional semesta berencana, yaitu tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Dalam pelaksanaannya di berbagai sekolah sesuai dengan jiwa dari keputusan MPRS tersebut. Kurikulum yang berlaku tunggal dari pusat sampai daerah. |
| 2. | Kurikulum 1968 | Awal masa Orde baru terdapat TAP MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, dan kebudayaan, dirumuskan mengenai tujuan pendidikan sebagai pembentuk manusia pancasilais sejati berdasarkan ketetapan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh pembukaan dan isi UUD 1945. Lembaga pendidikan dan strukturnya disederhanakan, perkembangan pramuka sangat diperhatikan pemerintah. Kurikulum yang berlaku tunggal dari pusat sampai daerah. |
| 3. | Kurikulum 1975 | Tujuan-tujuan pendidikan dijabarkan secara sentralistik yang dijabarkan melalui tujuan intruksional umum, tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus dan berbagai dan berbagai rincian lainnya sehingga jelas apa yang akan dicapai melalui kurikulum tersebut. Kurikulum yang berlaku tunggal dan seragam dari pusat sampai daerah. |
| 4. | Kurikulum 1984 | Masa ini ditandai dengan tiga ciri kebijakannya, yaitu semesta, menyeluruh dan terpadu. Kebijakan ini menghendaki satu sistem dan pengelola tunggal terhadap sistem tersebut. Kurikulum seragam pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. |
| 5. | Kurikulum 1994 | Kurikulum 1994 merupakan respons terhadap UU Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. UU ini memiliki semangat sentralistik yang kuat, kurikulum di atur secara nasional. Tujuan, isi, metode dan evaluasi kurikulum, serta pembelajaran masih ditentukan oleh pemerintah pusat. |

| | | |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | Kurikulum 2013 | Pemerintah bertanggung jawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum. Pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara asional. Kurikulum seragam pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Perencanaan, Pelaksanaan dan evaluasi masih diatur oleh pusat. |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber: Pusat Kurikulum, 2007, Hidayat dan Kemendikbud 2013

Tabel di atas memperlihatkan bahwa hampir semua kurikulum yang berlaku di Indonesia (kecuali kurikulum 2006) yang merupakan kurikulum sentralistik. Bahkan kurikulum 2013 masih mempertahankan ciri sentralistiknya. Selain kelebihan, terdapat beberapa kekurangan dari manajemen kurikulum sentralistik, yaitu:

- a. Wilayah yang cukup luas memiliki keragaman dalam kondisi, kebutuhan dan tingkat kemajuannya, kurikulum yang bersifat nasional tidak dapat mengakomodasi keragaman kondisi tersebut.
- b. Pemahaman dan penguasaan kurikulum nasional oleh para pelaksana diseluruh wilayah tanah air membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan
- c. Penerapan satu jenis kurikulum untuk wilayah yang cukup luas dapat menghadapi banyak hambatan dan kemungkinan penyimpangan.

Kelebihan dan kekurangan jenis manajemen pengembangan kurikulum sentralistik memang sangat tergantung pada keragaman kondisi sosial, politik, budaya dan ekonomi suatu negara atau daerah. Keragaman tersebut dapat juga menjadi kekuatan dan sekaligus kelemahan yang seharusnya dapat dikelola demi terlaksananya kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan.

F. MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM DESENTRALISTIK

Dalam manajemen kurikulum desentralistik, penyusunan desain, pelaksanaan, dan pengendalian kurikulum (evaluasi dan penyempurnaan), dilakukan secara lokal oleh satuan pendidikan. Penyusunan desain kurikulum

dilakukan oleh guru-guru, melibatkan ahli, komite sekolah/madrasah dan pihak-pihak lain di masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap kurikulum. Pengembangan kurikulum demikian disebut pengembangan kurikulum berbasis sekolah (*School Based Curriculum Development* atau SBCD) atau biasa disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum disusun pada setiap satuan pendidikan sesuai dengan jenis, jalur dan jenjang pendidikannya.

Penyusunan jenis kurikulum SBCD dapat mencakup seluruh komponen kurikulum atau hanya sebagian komponen. Penyusunannya dapat dilakukan oleh seorang, sekelompok atau seluruh guru dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan/program satuan pendidikan dan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan dan masyarakat sekitarnya. SBCD merupakan pengembangan kurikulum yang berbeda bahkan dapat berlawanan dari pengembangan kurikulum birokratis (mengikuti gagasan, konsep pemegang kebijakan, hierarkis dari sekolah dasar sampai menengah).

Dalam pengembangan SBCD, desain kurikulum yang meliputi sarana atau tujuan kurikulum, materi atau isi kurikulum, model pembelajaran dan penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kebutuhan, tantangan, karakteristik dan tahap perkembangan sekolah dan masyarakat tempat sekolah berada. Kurikulum menjadi lebih bermakna karena bertolak dari situasi dan kondisi setempat dan diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan, tuntutan, dan perkembangan setempat. Pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan akan menghasilkan desain kurikulum yang beragam, tetapi lebih mudah dipahami, dikuasai, dan dilaksanakan oleh guru sebab mereka yang mengembangkan atau minimal ikut serta dalam pengembangannya.

Tabel 2
Ciri Desentralistik Kurikulum 2006 (KTSP)

| No. | Komponen Kurikulum | Ciri Desentralistik |
|-----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tujuan | Kurikulum satuan pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, dibawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab dibidang pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK serta departemen yang menangani urusan pemerintahan dibidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK. Penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada paduan yang disusun oleh badan standar Nasional Pendidikan (BSNP). |
| 2. | Isi | Latar belakang (dasar pemikiran penyusunan KTSP), tujuan pengembangan KTSP, prinsip pengembangan KTSP sesuai dengan karakteristik sekolah. |
| 3. | Metode | Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh tiap-tiap satuan pendidikan. Sekolah dan kepala sekolah mengembangkan KTSP dan silabus berdasarkan kerangka dasar kurikulum, dan standar kompetensi di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan kabupaten/kota dan/atau provinsi. |
| 4. | Evaluasi | Evaluasi pembelajaran berbasis kelas, proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru melalui sejumlah bukti untuk membuat keputusan tentang pencapaian hasil belajar/kompetensi siswa. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. |

Sumber: Pusat Kurikulum, 2007

Pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

- a. Kurikulum sesuai dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik dan perkembangan satuan pendidikan dan masyarakat setempat sehingga

satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung dapat membantu perkembangan masyarakat dan

- b. Lebih mudah dilaksanakan karena desain kurikulum disusun oleh guru-guru sendiri dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendukung pelaksanaan yang ada di sekolah dan masyarakat sekitar.


Pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

- a. Tidak semua guru memiliki keahlian atau kecakapan dalam pengembangan kurikulum, atau tidak semua satuan pendidikan/daerah memiliki guru atau orang yang ahli atau cakap dalam pengembangan kurikulum
- b. Kurikulum dapat bersifat lokal, lulusannya kurang memiliki kemampuan atau daya saing secara nasional
- c. Desain kurikulum sangat beragam, dapat menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan evaluasi kurikulum dan evaluasi hasil belajar secara nasional dan
- d. Kepindahan peserta didik dari satu sekolah atau daerah ke sekolah atau daerah lain dapat menimbulkan kesulitan.

BAB III

PERENCANAAN KURIKULUM

A. PENGERTIAN PERENCANAAN KURIKULUM

alah satu fungsi yang mendasar dari manajemen adalah perencanaan, selain pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Dalam kajian ini, dipahami bahwa perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumberdaya manusia (*human resources*), sumberdaya alam (*natural resources*) dan sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan.¹

Ada beberapa definisi tentang perencanaan yang rumusnya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Veithzal Rivai dan Sylviana Murni mengemukakan bahwa perencanaan ialah suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²

Perencanaan adalah proses penyusunan, penetapan, dan pemanfaatan sumber-sumber daya secara terpadu dan rasional agar kegiatan-kegiatan

¹ H.B Siswanto.(2015).*Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. h.42.

² Veithzal Rivai dan Sylviana Murni.(2010). *Education Managemen Analisis Teori dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 2, h.207.

yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan.³

Dalam suatu organisasi perencanaan memiliki peran penting untuk menentukan langkah- langkah melaksanakan kegiatan sehingga tercapai tujuan. Kematangan dan kesalahan dalam perencanaan akan memberi pengaruh positif dan negatif pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, suatu perencanaan yang dibuat manajer satu organisasi harus memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjang yang mungkin terjadi di masa depan.

Adapun pengertian perencanaan secara umum menurut Waterson dalam Sudjana menuliskan bahwa perencanaan pada hakikatnya adalah usaha sadar, terorganisasi, dan terus menerus yang dilakukan untuk memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif tindakan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu.⁴

Dalam konteks ini perencanaan memiliki tiga karakteristik, yaitu:

1. Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang
2. Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi yaitu serangkaian tindakan di masa akan datang dan akan diambil oleh perencana
3. Masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi, serta organisasi merupakan unsur yang penting dalam setiap perencanaan.⁵

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan pada masa akan datang dalam mencapai tujuan yang akan dicapai dengan mendayagunakan berbagai sumberdaya organisasi.

Sedangkan kurikulum adalah semua pengalaman yang diharapkan dikuasai peserta didik di bawah bimbingan guru. Pengalaman tersebut dapat bersifat intra kurikulum, ko kurikuler, dan ekstra kurikuler.⁶

³ Zainal Arifin. (2014). *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Rosdakarya, h.25.

⁴ Nana Sudjana. (2002). *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, h.46

⁵ H.B Siswanto. *Op.cit.* 42.

⁶ Sukiman. (2015). *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h.4.

Itu artinya hakikat kurikulum adalah seluruh pengalaman belajar yang direncanakan dan dilaksanakan dalam pengawasan sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan terwujudnya perubahan perilaku siswa ditandai pencapaian kompetensi yang diharapkan.

Perencanaan merupakan bagian konsep manajemen, sedangkan kurikulum bagian dari konsep dalam ilmu pendidikan. Dengan kata lain, perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui situasi mengajar-belajar, serta telaah keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Tanpa perencanaan kurikulum, sistematika berbagai pengalaman belajar tidak akan saling berhubungan dan tidak mengarah pada tujuan yang diharapkan.⁷

Perencanaan kurikulum menjadi bagian kegiatan awal untuk menyusun konsep kurikulum yang menjadi program pendidikan di sekolah, tidak hanya rencana pembelajaran, tetapi rencana atas konsep kurikulum yang akan diajarkan di sekolah. Itu artinya perencanaan kurikulum mencakup spektrum yang sangat luas, baik rencana tentang tujuan, materi/isi mata pelajaran, metode, media, dan evaluasi ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kurikulum dalam wujud pembelajaran.

Dapat disimpulkan bahwa perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik.

Kegiatan pengembangan kurikulum harus dilakukan berdasarkan ilmu manajemen karena pengembangan kurikulum menuntut adanya perencanaan sampai dengan pengawasan bahkan termasuk monitoring dan evaluasi.⁸

Perencanaan kurikulum dan pembelajaran terkait dengan fungsi atau proses manajemen kurikulum dan pembelajaran. Fungsi atau proses tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum

⁷ Oemar Hamalik, *Op.cit.*h. 171

⁸ Zainal Arifin. *Op.cit.* h.25.

dan pembelajaran. Fungsi atau proses manajemen kurikulum tersebut terkait dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran.⁹

Perencanaan kurikulum merupakan proses menetapkan tujuan, sasaran, dan program kurikulum yang menjadi pedoman pelaksanaan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan kurikulum dan pembelajaran terkait dengan fungsi atau proses manajemen kurikulum dan pembelajaran. Fungsi atau proses tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum dan pembelajaran. Fungsi atau proses manajemen kurikulum tersebut terkait dengan pengembangan kurikulum dan pembelajaran.¹⁰

Proses perencanaan kurikulum dan kemudian diharapkan prosesnya dari perencanaan dan langkah rancangan kepada pelaksanaan aktual dengan lebih mudah, setelah peninjauan ulang dengan sejumlah proyek inovatif.¹¹

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan penataan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai produktivitas pendidikan. Produktivitas pendidikan dimaknai sebagai efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan pendidikan.¹²

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan kurikulum adalah proses menetapkan rancangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada masa akan datang dalam praktik pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebagai langkah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Adapun tujuan perencanaan kurikulum, yaitu:

- a. Sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- b. Standar pengawasan dalam pelaksanaan kurikulum, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaan.

⁹ Teguh Triwiyanto. (2015). *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, h.86.

¹⁰ *Ibid.* h.86.

¹¹ Allan C. Ornstein dan Francis P. Hunkins. (1978). *Curriculum Foundations, Principles, and Issues*. New Jersey ; Prentice Hall, Englewood Cliffs, h. 223

¹² Teguh Triwiyanto. *Op.cit.* h.23.

- c. Mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasinya), baik kualifikasinya maupun kuantitasnya untuk mencapai tujuan pendidikan.
- d. Merupakan gambaran kurikulum yang sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerjaan, dan
- e. Menimbulkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, serta menghemat biaya, tenaga dan waktu.¹³

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan kurikulum merupakan langkah awal dalam pengelolaan kurikulum pendidikan yang diharapkan menghasilkan wujud kurikulum sebagaimana diharapkan sehingga manajemen kurikulum berfungsi di setiap pelaksanaan manajemen pendidikan di sekolah. Dalam perencanaan ada sejumlah langkah yang mencakup perumusan standar kompetensi lulusan, isi dan proses pembelajaran sebagai pelaksanaan kurikulum, dan menyusun perangkat evaluasi. Hal tersebut harus didukung manajer, guru, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan pembiayaan. Sebab untuk persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum memerlukan dukungan sumberdaya manusia (pimpinan, pendidik dan tenaga kependidikan), serta sarana dan prasarana serta pembiayaan.

B. SIFAT DAN ASAS PERENCANAAN KURIKULUM

Perencanaan kurikulum menjadi bagian integral dari manajemen kurikulum. Untuk itu perencanaan berarti menyiapkan langkah pelaksanaan kurikulum di masa akan datang berdasarkan kebutuhan anak pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Dengan kata lain, setiap satuan pendidikan perlu disusun kurikulumnya dengan memperhatikan faktor anak didik dan keadaan bangsa di tengah perubahan zaman. Suatu perencanaan kurikulum memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Bersifat strategis, karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
- b. Bersifat komprehensif, yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

¹³ *Ibid*, h.103.

- c. Bersifat integratif, yang mengintegrasikan rencana yang mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas.
- d. Bersifat realistik, berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat.
- e. Bersifat humanistik, menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia, baik kuantitatif maupun kualitatif.
- f. Bersifat futuristik, mengacuh jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju.
- g. Merupakan bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistemik.
- h. Perencanaan kurikulum mengacu kepada pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional.
- i. Bersifat spesifikasi untuk melayani keragaman peserta didik.
- j. Bersifat desentralistik, karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

Perencanaan kurikulum disusun berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. **Objektivitas**
Perencanaan kurikulum memiliki tujuan yang jelas dan spesifik berdasarkan tujuan pendidikan nasional, data input yang nyata sesuai dengan kebutuhan.
- b. **Keterpaduan**
Perencanaan kurikulum memadukan jenis dan sumber dari semua disiplin ilmu, keterpaduan sekolah dan masyarakat, keterpaduan internal, serta keterpaduan dalam proses penyampaian.
- c. **Manfaat**
Perencanaan kurikulum menyediakan dan menyajikan pengetahuan dan keterampilan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan dan tindakan, serta bermanfaat sebagai acuan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan.
- d. **Efisiensi dan efektivitas**
Perencanaan kurikulum disusun berdasarkan prinsip efisiensi dana, tenaga, waktu dan efektif dalam mencapai tujuan dan hasil pendidikan.

e. Kesesuaian

Perencanaan kurikulum disesuaikan dengan sasaran peserta didik, kemampuan tenaga kependidikan, kemajuan IPTEK, dan perubahan/perkembangan masyarakat.

f. Keseimbangan

Perencanaan kurikulum memperhatikan keseimbangan antara jenis bidang studi, sumber yang tersedia, serta antara kemampuan dan program yang akan dilaksanakan.

g. Kemudahan

Perencanaan kurikulum memberikan kemudahan bagi para pemakainya yang membutuhkan pedoman berupa bahan kajian dan metode untuk melaksanakan proses pembelajaran.

h. Berkesinambungan

Perencanaan kurikulum ditata secara berkesinambungan sejalan dengan tahapan-tahapan dan jenis dan jenjang suatu pendidikan.

i. Pembakuan

Perencanaan kurikulum dibakukan sesuai dengan jenjang dan jenis suatu pendidikan, sejak dari pusat, provinsi, kabupaten/kotamadya.

j. Mutu

Perencanaan kurikulum memuat perangkat pembelajaran yang bermutu, sehingga turut meningkatkan mutu proses belajar dan kualitas lulusan secara keseluruhan.

C. FUNGSI DAN PRINSIP PERENCANAAN KURIKULUM

Untuk mengarahkan perubahan, maka para manajer yang menjalankan kepemimpinan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi, perlu menyusun rencana dengan jelas dan menyiapkan sumberdaya pendukung termasuk sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Dengan demikian, manajer atau pimpinan perlu menyusun perencanaan kurikulum secara cermat, teliti, menyeluruh dan rinci, karena memiliki multi fungsi sebagai berikut:

Seorang perencana kurikulum dituntut untuk memiliki ketelitian dan kecermatan yang tinggi dalam merencanakan kurikulum baik secara

menyeluruh maupun secara rinci karena perencanaan kurikulum memiliki multi fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan kurikulum sebagai pedoman atau alat manajemen, yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber daya, serta sebagai sistem kontrol.
2. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai penggerak roda organisasi lembaga pendidikan dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan lembaga pendidikan(organisasi) tersebut.
3. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal.¹⁴

Sementara itu ada delapan prinsip yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan kurikulum, yaitu:

1. Perencanaan yang dibuat harus memberikan kemudahan dan mampu memicu pemilihan dan pengembangan pengalaman belajar yang potensial sesuai dengan hasil (tujuan) yang diharapkan sekolah.
2. Perencanaan hendaknya dikembangkan oleh guru sebagai pihak yang langsung bekerja sama dengan siswa.
3. Perencanaan harus memungkinkan para guru menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih dan memajukan kegiatan-kegiatan belajar di sekolah.
4. Perencanaan harus memungkinkan para guru menyesuaikan pengalaman-pengalaman dengan kebutuhan-kebutuhan pengembangan, kesanggupan, dan taraf kematangan siswa (*level of pupils*).
5. Perencanaan harus menggiatkan para guru untuk mempertimbangkan pengalaman belajar sehingga anak-anak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di dalam dan di luar sekolah.
6. Perencanaan harus merupakan penyelenggaraan suatu pengalaman belajar yang kontiniu sehingga kegiatan-kegiatan belajar siswa dari sejak awal sungguh mampu memberikan pengalaman.

¹⁴ Oemar Hamalik. (2006). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya, h.152.

7. Kurikulum harus direncanakan sedemikian rupa sehingga mampu membantu pembentukan karakter, kepribadian, dan perlengkapan pengetahuan dasar siswa yang bernilai demokratis dan yang sesuai dengan karakter kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perencanaan harus realistis, fleksibel (dapat dikerjakan), dan *acceptable* (dapat diterima dengan baik).¹⁵

Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen, yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaiannya, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol dan evaluasi, peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen organisasi.

Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Perencanaan kurikulum yang matang besar sumbangannya terhadap pembuatan keputusan oleh pimpinan, dan oleh karenanya perlu memuat informasi kebijakan yang relevan, disamping seni kepemimpinan dan pengetahuan yang telah dimilikinya.

Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil optimal.

Adapun didalam referensi lain dikemukakan bahwa prinsip-prinsip perencanaan kurikulum yakni semua jenis perencanaan kurikulum terjadi pada semua tingkat pendidikan dan disesuaikan dengan tingkatan kelas. Secara umum, sebuah perencanaan kurikulum yang realistis disusun berdasarkan prinsip-prinsip berikut, ¹⁶ yaitu:

1. Perencanaan kurikulum berkenaan dengan pengalaman-pengalaman siswa.
2. Perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses.
3. Perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan tentang berbagai isu dan topik.
4. Perencanaan kurikulum melibatkan banyak kelompok.

¹⁵ <http://www.media-guru.co.cc/2010/06/manajemen-perencanaan-kurikulum.html>

¹⁶ *Ibid.*,

5. Perencanaan kurikulum dilaksanakan pada berbagai tingkatan.
6. Perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkelanjutan.

Pendapat di atas menegaskan bahwa perencanaan kurikulum dirumuskan dengan mempertimbangkan prinsip yang luas dan komprehensif, yaitu berkenaan dengan pengalaman siswa, berisikan konten/proses, memuat adanya topik-topik, penyusunan melibatkan kelompok/tim, mendistribusikan materi untuk semua tingkatan dan sifatnya berkelanjutan. Dengan demikian prinsip perencanaan kurikulum berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan tugas perkembangan anak didik yang mengakomodir tercapainya berbagai kompetensi sebagai dasar kedewasaan anak.

D. AZAS-AZAS PERENCANAAN KURIKULUM

Dalam menyusun kurikulum (konseptual/program), maka ada beberapa azas yang harus diperhatikan para penyusun kurikulum pendidikan. Paling tidak, sebuah perencanaan kurikulum disusun berdasarkan azas-azas sebagai berikut,¹⁷ yaitu:

1. **Objektivitas**

Perencanaan kurikulum memiliki tujuan yang jelas dan spesifik berdasarkan tujuan pendidikan nasional, data input yang nyata sesuai dengan kebutuhan.

2. **Keterpaduan**

Perencanaan kurikulum memadukan jenis dan sumber dari semua disiplin ilmu, keterpaduan sekolah dan masyarakat, keterpaduan internal, serta keterpaduan dalam proses penyampaian.

3. **Manfaat**

Perencanaan kurikulum menyediakan dan menyajikan pengetahuan dan keterampilan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan dan tindakan, serta bermanfaat sebagai acuan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan.

¹⁷ Oemar Hamalik, *op.cit.* h. 155-156

4. Efisiensi dan Efektivitas
Perencanaan kurikulum disusun berdasarkan prinsip efisiensi dana, tenaga, dan waktu dalam mencapai tujuan dan hasil pendidikan.
5. Kesesuaian
Perencanaan kurikulum disesuaikan dengan sasaran peserta didik, kemampuan tenaga kependidikan, kemajuan IPTEK, dan perubahan/perkembangan masyarakat.
6. Keseimbangan
Perencanaan kurikulum memperhatikan keseimbangan antara jenis bidang studi, sumber yang tersedia, serta antara kemampuan dan program yang akan dilaksanakan.
7. Kemudahan
Perencanaan kurikulum memberikan kemudahan bagi para pemakainya yang membutuhkan pedoman berupa bahan kajian dan metode untuk melaksanakan proses pembelajaran.
8. Berkesinambungan
Perencanaan kurikulum ditata secara berkesinambungan sejalan dengan tahapan, jenis, dan jenjang satuan pendidikan.
9. Pembakuan
Perencanaan kurikulum dibakukan sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikan, sejak dari pusat sampai daerah.
10. Mutu
Perencanaan kurikulum memuat perangkat pembelajaran yang bermutu, sehingga turut meningkatkan mutu proses belajar dan kualitas lulusan secara keseluruhan.

E. SIFAT PERENCANAAN DAN MODEL KURIKULUM

Suatu perencanaan kurikulum memiliki sifat-sifat sebagai berikut:¹⁸

1. Bersifat strategis karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

¹⁸ Dakir.(2004). *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*, Jakarta:Rineka Cipta, h. 117-118.

2. Bersifat komprehensif yang mencakup keseluruhan aspek-aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.
3. Bersifat integratif yang mengintegrasikan rencana yang luas, mencakup pengembangan dimensi kualitas dan kuantitas.
4. Bersifat realistik, berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat.
5. Bersifat humanistik yaitu menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia, baik kuantitatif maupun kualitatif.
6. Bersifat futuristik yaitu mengacu jauh ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju.
7. Bersifat desentralistik karena dikembangkan oleh daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

Perencanaan kurikulum merupakan kegiatan yang kompleks yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Maka dalam mendiskusikan dan mengkoordinasikan proses diperlukan model-model dalam penyajiannya, yakni berdasarkan asumsi-asumsi rasionalitas tentang pemrosesan informasi atau data secara cermat.

Adapun model-model dalam perencanaan kurikulum yang disebutkan oleh Oemar Hamalik adalah:¹⁹

1. Model Perencanaan Rasional Deduktif atau Rasional Tyler.
Model ini menitikberatkan logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan (*Goals and Objectives*). Namun model ini cenderung mengabaikan masalah-masalah dalam lingkungan tugas. Model ini dapat diterapkan pada semua tingkat pembuatan keputusan namun lebih cocok digunakan untuk sistem pendidikan yang sentralistik yang menitikberatkan pada sistem perencanaan pusat, dimana kurikulum dianggap sebagai suatu alat untuk mengembangkan atau mencapai tujuan di bidang sosial ekonomi.
2. Model Interaktif Rasional (*The rasional-interactive model*).
Model ini memandang rasional sebagai tuntutan kesepakatan antara pendapat-pendapat yang berbeda, yang tidak mengikuti urutan logika. Model ini seringkali dinamakan model situasional. asumsi rasionalitasnya

¹⁹ Oemar Hamalik, *op.cit.* h. 154.

menekankan pada respons fleksibel kurikulum yang tidak memuaskan dan inisiatif pada tingkat sekolah atau tingkat lokal. *Implementasi* perencanaan merupakan fase krusial dalam pengembangan kurikulum, dimana diperlukan saling beradaptasi antara perencana dan pengguna kurikulum.

3. *The Disciplines Model.*

perencanaan ini menitikberatkan pada guru-guru, mereka sendiri yang merencanakan kurikulum berdasarkan pertimbangan sistematis tentang relevansi pengetahuan filosofis, sosiologi dan psikologi.

4. Model tanpa perencanaan (*non planning model*)

Ini merupakan suatu model perencanaan kurikulum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan intuitif guru-guru didalam ruang kelas sebagai bentuk pembuatan keputusan.

Secara umum dalam sebuah perencanaan kurikulum dapat mengandung keempat tipe diatas, namun untuk membedakannya antara satu dengan yang lain, diperlukan analisis variabel kebermaknaan bagi praktik perencanaan.²⁰ Dalam konteks ini perencanaan kurikulum tidak bisa dilaksanakan oleh setiap orang atau sembarangan, sebab proses penyusunan awal dan pengembangan kurikulum selain berkenaan dengan kebijakan pemerintah, juga memerlukan para ahli baik dari segi pengalaman dalam bidang praktik pendidikan dan pembelajaran sekaligus memang memerlukan pakar dalam bidang pendidikan.

F. ORGANIASI KURIKULUM

Untuk memastikan bahwa isi kurikulum disusun dengan baik supaya anak didik mudah menerima bahan yang disampaikan oleh guru, maka diperlukan struktur organisasi yang jelas dari kurikulum yang direncanakan atau disusun. Menurut Sukiman, organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk pengaturan unsur-unsur atau komponen-komponen kurikulum yang disusun dan disampaikan kepada peserta didik. Organisasi kurikulum merupakan struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik

²⁰ *Ibid.* h. 156.

guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Organisasi kurikulum merupakan asas yang sangat penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan penyampaian bahan pembelajaran, menentukan isi bahan pembelajaran, menentukan cara menyampaikan bahan pembelajaran, menentukan bentuk pengalaman yang akan disajikan kepada terdidik dan menentukan peranan pendidik dan terdidik dalam implementasi kurikulum.²¹

Kemudian menurut Rusman, organisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan yang ada dalam kurikulum, sedangkan yang menjadi sumber bahan pelajaran dalam kurikulum adalah nilai budaya, nilai sosial, aspek siswa dan masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum, diantaranya berkaitan dengan ruang lingkup (*scope*), urutan bahan (*sequence*), kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan (*integrated*)

1. Ruang lingkup (*scope*) dan urutan bahan pelajaran merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam suatu kurikulum. Setiap pola kurikulum memiliki ruang lingkup materi pelajaran yang berbeda. Organisasi kurikulum berdasarkan mata pelajaran lingkup materi pelajarannya cenderung menyajikan bahan pelajaran yang bersumber dari kebudayaan dan informasi atau pengetahuan hasil temuan masa lalu yang telah tersusun secara logis dan sistematis. Sementara itu, organisasi kurikulum integritas lingkup materi pelajarannya diambil dari masyarakat maupun dari aspek siswa. (minat bakat dan kebutuhan) tidak hanya lingkup materi pelajaran yang harus diperhatikan dalam organisasi kurikulum, tetapi bagaimana urutan (*sequence*) bahan tersebut harus disajikan dalam kurikulum.
2. Kontinuitas kurikulum dalam organisasi kurikulum perlu diperhatikan terutama berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa, jangan sampai terjadi pengulangan ataupun loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya. Pendekatan spiral merupakan salah satu upaya dalam menerapkan faktor ini. Artinya materi yang dipelajari siswa semakin lama semakin mendalam yang dikembangkan berdasarkan keluasaan secara vertikal maupun horizontal

²¹ Sukiman, *op.cit.* h.58.

3. Keseimbangan bahan pelajaran perlu dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum. Semakin dinamis perubahan dan perkembangan dalam ilmu pengetahuan, sosial budaya maupun ekonomi akan berpengaruh terhadap dimensi kurikulum. Ada dua aspek yang harus diperhatikan dalam keseimbangan pada organisasi kurikulum: (1) keseimbangan terhadap substansi bahan atau isi kurikulum dan (2) keseimbangan yang berkaitan dengan cara atau proses belajar. Keseimbangan substansi isi kurikulum harus dilihat secara komprehensif untuk kepentingan siswa sebagai individu, tuntutan masyarakat maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek estetika, intelektual, moral, sosial-emosional, personal, religius, seni apresiasi dan kinestetik, semuanya harus terakomodasi dalam isi kurikulum
4. Alokasi waktu yang dibutuhkan dalam kurikulum harus menjadi bahan pertimbangan dalam organisasi kurikulum.²²


Berdasarkan pendapat di atas jelas dapat dipahami bahwa organisasi kurikulum sejatinya merupakan bagian dari perencanaan kurikulum. Sebab yang dimaksudkan dengan organisasi kurikulum adalah pengaturan materi/isi kurikulum, khususnya berkaitan dengan bahan mata pelajaran. Hal ini penting diperhatikan para perencana kurikulum agar guru mudah mengajarkan, dan anak didik juga mudah memahami atau menguasai keterampilan yang disampaikan guru kepada anak didik.

²² Rusman. (2009). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Press, h.60.

BAB IV

IMPLEMENTASI KURIKULUM

A. PENGERTIAN IMPLEMENTASI KURIKULUM

 etelah perencanaan kurikulum selesai disusun, maka pemerintah menyiapkan atau menetapkan kebijakan untuk memberlakukan atau melaksanakan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum berarti proses mewujudkan kurikulum dalam realisasi pembelajaran di sekolah-sekolah.

Untuk pelaksanaan kurikulum, maka guru dituntut untuk secara profesional merancang pembelajaran efektif dan bermakna (menyenangkan), mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan, dan pembentukan kompetensi secara aktif serta menerapkan kriteria keberhasilan.¹

Secara etimologi kata kurikulum diambil dari bahasa Yunani, *Curere* berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari mulai atau *start* sampai *finish*. Pengertian inilah yang kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan. Dalam bahasa Arab, kurikulum sering disebut dengan istilah *al-manhaj* yang berarti jalan yang terang yang dilalui manusia dalam bidang kehidupannya.²

Berdasarkan pengertian tersebut, kurikulum jika dikaitkan dengan

¹ E. Mulyasa. (2014). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, h.99.

² Nana Sudjana. (2002). *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, h. 2

pendidikan. Menurut Muhaimin kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai-nilai.³

Keberhasilan proses pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan tidak bisa terlepas dari kurikulum. Dalam konteks ini, kurikulum mempunyai kedudukan yang sentral dalam proses pendidikan karena kurikulum mengarahkan segala bentuk aktifitas pendidikan dengan tujuan tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum memberikan rancangan pendidikan yang berfungsi memberikan pedoman dalam proses pendidikan.⁴

Sedangkan dalam terminologi, terdapat perbedaan pengertian kurikulum. Dalam pengertian lama kurikulum didefinisikan sebagai sejumlah materi pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik untuk memperoleh sejumlah pengetahuan, yang telah tersusun secara sistematis dan logis. Pendefinisian ini walau terasa kurang tepat, tetapi memang ada benarnya jika ditarik dari asal kata kurikulum di atas tadi, yakni *curere* yang biasa diartikan dengan jarak yang harus ditempuh oleh pelari.⁵

Berdasarkan pengertian ini, sebetulnya ingin dikatakan bahwa kurikulum lebih menekankan pada isi pelajaran dari sejumlah mata pelajaran yang berada di sekolah atau madrasah yang harus ditempuh para peserta didik untuk mencapai suatu ijazah. Kurikulum juga merupakan keseluruhan mata pelajaran yang disajikan oleh suatu lembaga pendidikan. Pengertian ini terasa masih sangat sempit, karena kurikulum tidak lain hanya sejumlah materi saja.

Dalam pengertian lain Ramayulis mendefinisikan bahwa kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting menentukan dalam suatu sistem pendidikan, karena itu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan.⁶

³ Muhaimin. (2005). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.1.

⁴Nana Saodih Sukmadinata. (2004). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosda Karya, h. 4

⁵Oemar Hamalik. (2007). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 1

⁶ Ramayulis. (2005). *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, h. 9.

Sedangkan menurut M. Arifin mendefinisikan kurikulum adalah seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam satu sistem institusional pendidikan.⁷ Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran atau kegiatan yang mencakup program pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Definisi tersebut kemudian berkembang sesuai dengan tuntutan dan dinamika zaman.

Kegiatan pengembangan kurikulum harus dilakukan berdasarkan ilmu manajemen karena pengembangan kurikulum menuntut adanya perencanaan sampai dengan pengawasan bahkan termasuk monitoring dan evaluasi.⁸

Sebuah kurikulum lembaga pendidikan yang diatur dan dikembangkan dengan baik akan menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar mengajar. Kurikulum dipandang sebagai program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan dalam mencapai tujuan pendidikan yang memerlukan sebuah inovasi dan pengembangan. Karenanya kurikulum selalu bersifat dinamis, selalu berubah, menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka yang belajar. Hal ini dikarenakan masyarakat dan siapa saja yang belajar mengalami perubahan juga.

Pengembangan rencana pembelajaran dan pelaksanaan bimbingan merupakan bagian dari isi kurikulum, isi kurikulum bukan hanya mata pelajaran saja, tetapi ditambah dengan proses pembelajaran di luar mata pelajaran semisal kerja keras, kedisiplinan, kebiasaan belajar, dan jujur dalam belajar. Semua itu merupakan tanggung jawab sekolah yang wajib diberikan kepada peserta didik.

Dalam pengertian tersebut terlihat jelas, bahwa kegiatan-kegiatan kurikulum tidak terbatas dalam ruang kelas saja melainkan juga mencakup kegiatan di luar kelas. Dengan demikian tidak ada pemisahan tegas antara intra dan ekstra kurikulum. Singkatnya, semua kegiatan yang memberi

⁷ M. Arifin. (1996). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, h.183

⁸ Zainal Arifin. (2012). *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h.25.

pengalaman dalam proses pendidikan atau belajar bagi peserta didik, pada hakikatnya adalah kurikulum. Oleh karenanya, dalam pengertian yang sangat luas ini kurikulum sering dimaknai dengan sejumlah pengalaman belajar yang didapat oleh peserta didik baik di dalam maupun di luar kelas.

Dari beberapa definisi di atas, terdapat berbagai penafsiran dan pemahaman tentang kurikulum, sehingga kita peroleh penggolongan kurikulum sebagaimana dikatakan Majid sebagai berikut:

1. Kurikulum dapat dilihat sebagai produk, yakni sebagai hasil karya pengembangan kurikulum, biasanya dalam suatu panitia. Hasilnya dituangkan dalam bentuk buku atau pedoman kurikulum, misalnya berisi sejumlah mata pelajaran yang harus diajarkan. Inilah yang disebut dengan dokumen kurikulum.
2. Kurikulum dapat pula dipandang sebagai program, yakni alat yang dilakukan oleh sekolah atau madrasah untuk mencapai tujuannya. Ini dapat berupa mengajarkan berbagai mata pelajaran, tetapi dapat juga meliputi segala kegiatan yang dianggap dapat mempengaruhi perkembangan siswa. Misalnya perkumpulan sekolah, pertandingan, pramuka, warung sekolah dan lain-lain.
3. Kurikulum dapat pula dipandang sebagai hal-hal yang diharapkan agar dapat dipelajari oleh siswa yakni pengetahuan, sikap, keterampilan tertentu. Apa yang diharapkan akan dipelajari tidak selalu sama dengan apa yang benar-benar dipelajari.
4. Kurikulum sebagai pengalaman siswa. Ketiga pandangan di atas berkenaan dengan perencanaan kurikulum. Sedangkan pandangan yang keempat ini mengenai apa yang secara aktual menjadi kenyataan pada setiap siswa. Ada kemungkinan, bahwa apa yang diwujudkan pada diri anak berbeda dengan apa yang diharapkan menurut rencana.⁹

Dari berbagai macam pengertian kurikulum di atas, secara garis besar kurikulum dapat disimpulkan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang

⁹ Abdul Majid.(2006), *Perencanaan Pembelajaran dalam Mengembangkan Kompetensi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 34

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

B. PRINSIP PELAKSANAAN KURIKULUM

Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.
2. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu (1) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, (2) belajar untuk memahami dan menghayati (3) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (4) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, (5) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
3. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang dimensi ketuhanan, keindividualan, kesosialan dan moral.
4. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab terbuka dan hangat dengan prinsip *tutwuri handayani, ing madia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada* (dibelakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh teladan)
5. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan kedekatan multi strategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip *alam takambang jadi guru* (semua yang terjadi, tergelar dan

berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).

6. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
7. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan.¹⁰

Untuk itu, dalam mengimplementasikan kurikulum tidak dapat hanya dengan memandang satu aspek saja, akan tetapi aspek-aspek di atas harus saling berkaitan dan harus diperhatikan.

C. PELAKSANAAN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

Sesungguhnya kurikulum memang merupakan alat dalam pencapaian tujuan pendidikan. Namun jika tidak tersedia kurikulum yang merupakan hasil penyusunan kurikulum maka tidak ada pedoman melakukan pembelajaran oleh guru. Itu artinya kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan anak didik melalui tindakan awal dengan rancangan kurikulum. Oleh sebab itu, didalam kurikulum terdapat sejumlah pernyataan kompetensi yang dibuat dan perlu dicapai secara tuntas (belajar tuntas) setiap kali dilakukan pembelajaran. Dalam hal ini kurikulum dilaksanakan dalam rangka membantu dan memudahkan peserta didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial-emosional, kognitif, bahasa, fisik/motorik, kemandirian dan seni yang dibawanya sejak dari lahir. Potensi-potensi tersebut hanya akan dapat berkembang secara maksimal jika dikembangkan melalui pengalaman belajar.

Pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran merupakan perwujudan kurikulum yang masih bersifat dokumen tertulis menjadi aktual dalam

¹⁰ Kunandar. (2011). *Guru Profesional: Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi guru*. Jakarta: Rajawali Press, h.142-143.

serangkaian aktivitas pembelajaran. Perencanaan kurikulum dan pembelajaran (yang berupa kebijakan) tidak akan memberikan makna apapun apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan dalam bentuk program kurikuler dan kegiatan pembelajaran. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, rekomendasi kebijakan yang telah dirumuskan perlu dimasukkan kedalam program kurikulum atau kegiatan pembelajaran.

Bagaimanapun, proses pengembangan kurikulum nasional dituangkan dalam kebijakan pendidikan. Di sini dipahami bahwa penyusunan kebijakan pendidikan, harus dengan dukungan hasil penelitian lapangan, sehingga atas dasar itu maka dapat disusun suatu program kurikulum untuk dilaksanakan oleh kebanyakan pendidik. Bahkan pelaksanaan kurikulum oleh guru untuk membelajarkan peserta didik sehingga kurikulum terlaksana dalam sistem kelas dan anak didik dapat mengikuti program yang disajikan dalam kurikulum tingkat pendidikan tertentu.

Perencanaan untuk penyusunan kebijakan membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan masukan agar produk yang dihasilkan dapat mengakomodasi banyak kalangan. Semakin banyak yang dilibatkan, semakin baik sebuah produk kebijakan. Produk kebijakan yang dihasilkan juga dapat dijadikan sebagai deseminasi dalam pelaksanaan yang nantinya akan lebih mudah.

Dalam kerangka melaksanakan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dan pembelajaran harus sesuai dengan perencanaan, maka dibutuhkan kesiapan, terutama kesiapan pelaksanaan. Apapun desain atau perencanaan kurikulum dan pembelajaran yang dimiliki, maka keberhasilan pelaksanaan pembelajaran sangat tergantung pada pelaksana sebagaimana halnya tugas kepala sekolah, guru, atau pengawas. Meskipun kurikulum masih sederhana, apabila guru memiliki kemampuan, semangat dan dedikasi yang tinggi maka hasilnya akan lebih lanjut dari pada desain kurikulum yang hebat, tetapi kemampuan, semangat dan dedikasi guru rendah. Itu artinya guru profesional menjadi syarat bagi efektivitas pelaksanaan kurikulum pada tingkat pembelajaran yang unggul.

Sumber daya pendidikan yang lain seperti sarana, prasarana, biaya, organisasi dan lingkungan juga merupakan kunci keberhasilan pendidikan, namun guru merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan keberhasilan kurikulum. Dengan sarana, prasarana, dan biaya yang terbatas namun memiliki guru yang kreatif dan berdedikasi tinggi, untuk dapat mengembangkan program, kegiatan, dan alat bantu pelajaran yang inovatif. Keber-

adaan guru sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran menjadikan guru harus selalu ditingkatkan kompetensinya. Dengan kata lain, pemberdayaan kompetensi pendidik secara maksimal akan berpengaruh terhadap kinerja pendidik dan kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran sejalan dengan kebijakan standar pendidikan nasional, terutama sebagai dasar atau standar dalam proses pendidikan sehingga pelaksanaannya menyesuaikan dengan standar pendidikan nasional. Dasar atau landasan tersebut digunakan untuk menjadikan lulusan sesuai atau bahkan lebih dari standart kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Kurikulum merupakan salah satu komponen pendidikan yang strategis karena merupakan sperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan strategi dan pendekatan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran dalam usaha mencapai tujuan yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan daerah dan sekolah, memerlukan pelaksanaan yang terprogram dan sistematis.

Institusi yang menangani provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan pusat kurikulum lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP), pusat pengembangan penataran guru (PPPG), badan penelitian dan pengembangan (BLITBANG), KEMDIGBUD, badan penelitian dan pengembangan daerah (BALITBANGDA), badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA), kementerian agama, kantor wilayah kementerian agama, kantor wilayah perwakilan wilayah kementerian agama, perguruan tinggi, dewan pendidikan, organisasi profesi, komite sekolah, musyawarah kerja kepala sekolah/madrasah (MKKS/M), Musyawarah mata pembelajaran (MGMP), dan kelompok kerja guru (KKG).

Pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran secara sinergi dapat mempercepat dan menghasilkan pencapaian sesuai dengan tujuan pendidikan. Layanan yang diberikan dan aktivitas pelaksanaan dari institusi-institusi di atas dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 3
Pelaksanaan kurikulum an pembelajaran untuk berbagai institusi

| Aspek | Institusi/ Layanan | Aktivitas Pelaksanaan |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurikulum dan pembelajaran | Ruang lingkup | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pertukaran informasi kurikulum dan pembelajaran - Adanya pertukaran narasumber kurikulum dan pembelajaran. - Adanya program pendampingan kurikulum dan pembelajaran - Adanya kerjasama - Adanya pendampingan pengelola sekolah - Hasil pengembangan kurikulum |
| Pelaksanaan program/ kegiatan | BAPPEDA | <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat fasilitas kegiatan - Memasukkannya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan pendidikan di daerah |
| | Dinas pendidikan kota | <ul style="list-style-type: none"> - tingkat peran sebagai pembina - Intensitas pengarah - Mengeluarkan surat keputusan/ SK tentang kurikulum dan pembelajaran - Adanya dukungan dana - Adanya dukungan sarana - Adanya dukungan prasaran untuk kelancaran kegiatan |
| | LPMP | <ul style="list-style-type: none"> - Intensitas sebagai lembaga yang memberikan pendampingan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran yang sinergis |
| | PPPG | <ul style="list-style-type: none"> - Intensitas sebagai lembaga yang memberikan pendampingan dalam pengembangan kurikulum pembelajaran kurikulum yang sinergis |
| | Perguruan tinggi | <ul style="list-style-type: none"> - intensitas membina kurikulum dan pembelajaran - kedekatan sebagi mitra kerja dalam melaksanakan peran pembinaan kurikulum dan pembelajaran - kedekatan mitra kerja dalam melaksanakan tugas pembinaan kurikulum an pembelajaran |

| | | |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Dewan pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> - intensitas mitra dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran - kemauan menampung informasi - kemauan menyampaikan informasi, serta aspirasi masyarakat berkaitan dengan kurikulum pembelajaran |
| | Komite sekolah | <ul style="list-style-type: none"> - Kedekatan mitra sekolah dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran - Frekuensi komite sekolah mengidentifikasi kebutuhan lokal - Frekuensi komite sekolah mengidentifikasi keunggulan lokal - Kemauan mengakomodasi kebutuhan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran - Kemauan mengakomodasi keunggulan lokal untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. |
| | MKKS | <ul style="list-style-type: none"> - Intensitas mitra dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran |
| | MGMP | <ul style="list-style-type: none"> - Intensitas mitra dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran |
| | Organisasi profesi | <ul style="list-style-type: none"> - Intensitas mitra kurikulum dan pembelajaran untuk memberikan masukan sesuai dengan profesi dalam pengembangan kurikulum - Intensitas kurikulum dan dan pembelajaran memberikan masukan sesuai dengan bidang keilmuannya dalam pengembangan kurikulum |
| Program kerja | Peningkatan kemampuan | <ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi mengadakan lokakarya, seminar, pelatihan, penataran, studi banding, penelitian dan pengembangan - Tingkat kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain yang terkait - Tingkat pertukaran ide, pengalaman, informasi - Kelengkapan penyediaan kepustakaan |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pendamping-an pengembangan kurikulum | <ul style="list-style-type: none"> - Terkajinya dokumen kebijakan nasional dan daerah - Terkajinya karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan daerah/ sekolah - Terlaksananya analisis SWOT terhadap kondisi sekolah - Terlaksanakannya perumusan standar kompetensi dan kompetensi dasar program muatan lokal |
| Layanan Teknis | <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan narasumber pelatihan/loka karya/seminar tentang optimalisasi peran - Ketersediaan narasumber pelatihan/loka karya/seminar tentang optimalisasi peran - Ketersediaan narasumber pelatihan/loka karya/seminar tentang berbagai kebijakan-kebijakan kurikulum - Ketersediaan narasumber pelatihan/loka karya/seminar tentang implementasi kurikulum. |
| Layanan Konsultasi | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya layanan konsultasi pelaksanaan (<i>implementasi</i>) kurikulum dan pembelajaran - Adanya narasumber untuk membantu mengembangkan kurikulum dan pembelajaran |
| Pemantauan kurikulum | <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pemantauan terhadap pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran secara periodik. |
| Evaluasi kurikulum | <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran secara periodik |
| Penyempurnaan kurikulum | <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya penyempurnaan kurikulum dan pembelajaran. |

Sumber: Pusat Kurikulum, 2007

D. MODEL PELAKSANAAN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

Menurut Rusman,¹¹ menggolongkan model-model pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran sebagai berikut:

¹¹ Rusman. *Op.cit.* h.77.

1. *The Concerns-Based Adoption Model (CBAM)*

CBAM adalah sebuah model deskriptif yang dikembangkan melalui identifikasi tingkat kepedulian guru terhadap inovasi kurikulum. Perubahan dalam inovasi ini dibagi menjadi dua dimensi, yaitu tingkatan-tingkatan kepedulian terhadap inovasi dan tingkatan-tingkatan penggunaan inovasi. Perubahan yang terjadi merupakan proses, bukan peristiwa yang terjadi ketika program baru diberikan kepada guru, merupakan pengalaman pribadi dan individu melakukan perubahan.

Model ini menjadikan guru sebagai agen dalam melakukan inovasi kurikulum. Kurikulum yang merupakan dokumen dalam pelaksanaannya sebenarnya membutuhkan guru untuk melaksanakan (pembelajaran). Proses (pembelajaran) ini tentu saja banyak dipengaruhi oleh pengalaman pribadi guru. Oleh karena itu, perlu disiapkan sungguh-sungguh guru yang akan melaksanakan kurikulum ini, terutama memperkuat kepedulian guru untuk melakukan inovasi kurikulum.

2. *Model Leithwood*

Model ini difokuskan pada guru. Asumsi yang mendasari model ini antara lain (a) setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda (b) pelaksanaan merupakan proses timbal balik dan (c) pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap-tahap individu untuk identifikasi. Mengembangkan profil yang merupakan hambatan untuk perubahan dan bagaimana para guru dapat mengatasi hambatan tersebut.

Model ini tidak hanya menggambarkan hambatan dan pelaksanaan, tetapi juga menawarkan cara dan strategi kepada para guru dalam mengatasi hambatan yang dihadapi. Setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda ketika akan melaksanakan kurikulum sehingga perlu adanya persiapan-persiapan ketika akan melaksanakan kurikulum. Persiapan-persiapan dapat dilakukan melalui aktivitas pembelajaran mandiri, pelatihan, seminar dan magang.

3. *Model Teori*

Model ini dimaksudkan untuk menggugah masyarakat dalam mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat (*interest*)

dalam diri guru untuk memanfaatkan perubahan. Esensi model teori yaitu:

- a. *Trusting*-menumbuhkan kepercayaan diri;
- b. *Opening*-menumbuhkan dan membuka keinginan
- c. *Realizing*-mewujudkan, dalam arti setiap orang bebas berbuat dan mewujudkan keinginannya untuk perbaikan; dan
- d. *Interpending*-saling ketergantungan dengan lingkungan

Model ini memfokuskan pada perubahan sosial. Model ini menyediakan suatu skala yang membantu guru mengidentifikasi, bagaimana lingkungan akan menerima ide-ide baru sebagai harapan untuk mengimplementasikan inovasi dalam praktik, serta menyediakan beberapa petunjuk untuk menyediakan perubahan.

Model-model pelaksanaan kurikulum di atas menunjukkan pelaksanaan kurikulum dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada pada saat pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum sangat terkait dengan perubahan dan penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berubah. Kesiapan dan pelaksanaan kurikulum akan berdampak terhadap keberhasilan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. Sebagai perbandingan, berikut perbedaan pelaksanaan KTSP 2006 dengan kurikulum 2013 pada tabel 4:

Tabel 4
Perbandingan Pelaksanaan Kurikulum dan Pembelajaran

| No. | Pelaksanaan Kurikulum 2006 | Pelaksanaan Kurikulum 2013 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Materi disusun untuk memberikan pengetahuan kepada siswa | Materi disusun seimbang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan |
| 2. | Pendekatan pembelajaran adalah siswa diberitahu tentang materi yang harus dihafal (siswa diberitahu) | Pendekatan pembelajaran berdasarkan pengamatan, pertanyaan, pengumpulan data, penalaran dan penyajian hasilnya melalui pemanfaatan berbagai sumber belajar (siswa mencari tahu) |

| | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Penilaian pada pengetahuan melalui ulangan dan ujian</p> | <p>Penilaian autentik pada aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan portofolio</p> |
| | <p>Penilaian pada pengetahuan melalui ulangan dan ujian</p> | <p>Prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum dilaksanakan melalui pendekatan <i>scientific</i>:</p> |
| | <p>Prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum melalui:</p> <p>(a) Siswa harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan;</p> <p>(b) Menegakkan 5 pilar belajar;</p> <p>(c) Peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan dan percepatan</p> <p>(d) Suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka dan hangat</p> <p>(e) Menggunakan pendekatan multi strategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar</p> <p>(f) Mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya, serta kekayaan daerah dan</p> <p>(g) Diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis, serta jejang pendidikan</p> | <p>(a) Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda atau dongeng semata</p> <p>(b) Penjelasan guru, respon siswa dan interaksi edukatif guru siswa terbebas dari prasangka serta merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis</p> <p>(c) Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah dan mengaplikasikan materi pembelajaran</p> <p>(d) Mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotesis dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran</p> <p>(e) Mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon materi pembelajaran</p> <p>(f) Berbasis pada konsep, teori dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan</p> <p>(g) Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas namun menarik sistem penyajiannya</p> |

Sebagai contoh pelaksanaan KTSP, penelitian Pathuddin (2013:122) di Sulawesi Tengah menunjukkan pelaksanaan kurikulum berdasarkan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada pada saat pelaksanaan kurikulum. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa;

- a. kebijakan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam membentuk jaringan kurikulum belum sepenuhnya sesuai dengan panduan jaringan kurikulum belum sepenuhnya sesuai dengan panduan jaringan kurikulum yang dikeluarkan oleh pusat kurikulum;
- b. Syarat anggota jaringan kurikulum ditingkat kabupaten/kota, yaitu bagi yang pernah mengikuti *Training of trainer* (TOT) tingkat nasional dan belum ada anggota dari perguruan tinggi dari unsur masyarakat;
- c. Pemahaman kepala sekolah dan guru tentang panduan pengembangan kurikulum yang dikeluarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) masih rendah;
- d. Masih banyak guru dan kepala sekolah mengalami masalah dalam mengembangkan kurikulum terutama dalam membuat silabus dan Rancangan Program Pembelajaran (RPP);
- e. Masalah yang dialami dalam mengembangkan materi sesuai kondisi daerah dan kurangnya sumber belajar; dan
- f. Masalah yang dialami sekolah dalam mengembangkan muatan lokal adalah tidak adanya guru yang sesuai.

E. STANDAR PROSES

Berdasarkan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013, standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dengan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Untuk itu, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan

proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas capaian kompetensi lulusan. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi maka prinsip pembelajaran yang digunakan antara lain:

1. Dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu;
2. Dari pendidik sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar;
3. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan pengguna pendekatan ilmiah;
4. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi;
5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;
6. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi;
7. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;
8. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik (*hard skills*) dan keterampilan mental (*soft skills*);
9. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;
10. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ing madyo mangun karso*), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*);
11. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah dan masyarakat;
12. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah pendidik, siapa saja adalah kelas;
13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan
14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.

Terkait dengan prinsip di atas dikembangkan standar proses yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada

standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Sementara itu, standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi.

Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan Pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologi) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, menghargai, menghayati dan mengamalkan. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyanyi dan mencipta. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta memengaruhi karakteristik standar proses.

Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (*scientific*), tematik terpadu (tematik antar mata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/inquiry learning*). Untuk mendorong kemampuan peserta didik dalam menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*).

Table 5
Rincian Gradasi Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan

| Sikap | Pengetahuan | Keterampilan |
|--------------|--------------------|---------------------|
| Menerima | Mengingat | Mengamati |
| Menjalankan | Memahami | Menanya |
| Menghargai | Menerapkan | Mencoba |
| Menghayati | Menganalisis | Menalar |
| Mengamalkan | Mengevaluasi | Menyaji |
| | | Mencipta |

Sumber: Kemendigbud, 2013

Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di SD/MI, SLB/Paket A disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Pembelajaran tematik terpadu di SMP/MTs/SMPLB/Paket B disesuaikan dengan karakteristik kompetensi yang mulai memperkenalkan mata pelajaran dengan mempertahankan tematik terpadu pada IPA dan IPS. Karakteristik proses pembelajaran di SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/Paket C kejuruan secara keseluruhan berbasis mata pelajaran, meskipun pendekatan tematik masih dipertahankan. Sementara itu, standar proses pada SDLB, SMPLB dan SMALB diperuntukkan bagi tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras yang intelegensinya normal.

Secara umum, pendekatan belajar yang dipilih berbasis pada teori tentang taksonomi tujuan pendidikan yang dalam lima dasawarsa terakhir secara umum sudah dikenal luas. Berdasarkan teori taksonomi tersebut, capaian pembelajaran dapat dikelompokkan dalam tiga ranah, yaitu ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Pencapaian teori taksonomi dalam tujuan pendidikan di berbagai Negara dilakukan secara adaptif sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional telah mengadopsi taksonomi dalam bentuk rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara utuh/holistic, artinya pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya. Dengan demikian, proses pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi yang mencerminkan keutuhan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Standar proses pada suatu kurikulum dapat dilihat melalui pengertian, cakupan, prinsip, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran dan pengawasan pembelajaran. Dengan demikian, dapat dibandingkan keberadaan standar proses dan dapat diukur tinggi rendahnya kualitas pembelajaran dengan menjadikan standar proses sebagai dasar.

Tabel 6
Perbandingan Standar Proses KTSP 2006 dan Kurikulum 2013

| Aspek | KTSP 2006 | Kurikulum 2013 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengertian | Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan | Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. |
| Cakupan | Standar proses mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. | Standar proses mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran |
| Prinsip | Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. | Prinsipnya terdiri atas (1) Dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu (2) Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar (3) Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah (4) Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi (5) Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu (6) Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang sebenarnya multi-dimensi |

| | | |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> (7) Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif (8) Peningkatan dan keseimbangan antara menetapkan keterampilan fisik (<i>hard skills</i>) dan keterampilan mental (<i>soft skill</i>) (9) Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat (10) Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (<i>ing ngarso sung tulodo</i>), membangun kemauan (<i>ing madyo mangun karso</i>) dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (<i>tut wuri handayani</i>) (11) Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah dan di masyarakat. (12) Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa dan dimana saja adalah kelas (13) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran dan (14) Pengakuan atas perbedaan individu dan latar belakang budaya peserta didik. |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Perencanaan Pembelajaran</p> | <p>Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar.</p> | <p>Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario Pembelajaran. Penyusunan silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan.</p> |
| <p>Pelaksanaan Pembelajaran</p> | <p>Pelaksanaan proses pembelajaran harus memerhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis</p> | <p>Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.</p> |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Penilaian Pembelajaran</p> | <p>Penilaian hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Teknik penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi tes praktik dan penguasaan perseorangan atau kelompok. Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester</p> | <p>Penilaian pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik (<i>authentic assessment</i>) yang menilai kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya dan perolehan belajar siswa atau bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional (<i>instructional effect</i>) dan dampak pengiring (<i>nurturant effect</i>) dari pembelajaran. Hasil penilaian autentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Sesuai dengan standar penilaian pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan angket, catatan, observasi, anekdot dan refleksi.</p> |
| <p>Pengawasan Pembelajaran</p> | <p>Pengawas proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan</p> | <p>Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas.</p> |

Sumber:Kemendikbud, 2013

F. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

Pelaksana kurikulum secara langsung dan operasional adalah para guru yang diberikan amanah menjadi guru, baik guru kelas, maupun guru mata pelajaran. Karena itu tugas atau pekerjaan mengajar adalah profesi yang menuntut pemenuhan kompetensi utama guru, baik kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi

profesional. Berdasarkan pengertian profesi, dapat dipahami bahwa profesi merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian yang dipelajari. Ada beberapa ciri pekerjaan profesional,¹² yaitu:

Pertama; setiap profesi dapat dipastikan adanya imbalan atau penghargaan yang diberikan akibat pekerjaan yang dilakukannya. Imbalan yang diberikan bukan atas dasar belas kasihan seseorang akan tetapi didasarkan atas tindakan tertentu atau pekerjaannya.

Kedua; pekerjaan profesional bukan sekedar pekerjaan, melainkan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang spesial. Artinya pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain yang tidak memiliki profesi tersebut.

Ketiga; pengetahuan dan kemampuan itu diperoleh melalui pendidikan tertentu. Artinya, pekerjaan profesional didapatkan dari pendidikan dan latihan baik formal maupun non formal.

Keempat; pekerjaan profesional dibingkai oleh kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi. Artinya, dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, seorang profesional tidak akan terlepas dari aturan yang jelas sebagai prosedur standar pelayanan.

Kelima; suatu profesi selain dibutuhkan oleh masyarakat juga memiliki dampak sosial kemasyarakatan, sehingga masyarakat memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap setiap efek yang ditimbulkannya dari pekerjaan profesi itu.

Dalam konteks ini pelaksana kurikulum adalah guru yang diberikan amanah bertugas mengajar dan mendidik siswa. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Berikut penjelasan dari tiap-tiap kegiatan.

1. Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, pendidik sebaiknya:

- a. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran.

¹² Wina Sanjaya dan Andi Budimanjaya.(2017).*Paradigma Baru Mengajar*; Jakarta: Prenada, h.32-33.

- b. Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional
- c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari.
- d. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dan
- e. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

2. Kegiatan inti

Kegiatan inti merupakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik, tematik terpadu, saintifik, inquiry dan penyingkapan (*discovery*) dan/ atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.

a. Sikap

Sesuai dengan karakteristik sikap maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas tersebut.

b. Pengetahuan

Dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi hingga mencipta. Karakteristik aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan *scientific*, termasuk terpadu dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/inquiry Learning*). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual, maupun kelompok, disarankan menggunakan pendekatan

pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*).

c. Keterampilan

Keterampilan dapat diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan subtopik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong siswa untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery incuiry Learning*) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based Learning*).

3. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi:

- a. Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung.
- b. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran,
- c. Melakukan kegiatan tidak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok,
- d. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

G. PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas. Pengawas proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Secara berurutan, pengertian dari kelima kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Pemantauan adalah aktivitas mengamati proses pembelajaran yang berlangsung.

2. Supervisi adalah bantuan yang memberikan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Supervisi diperlukan untuk pertumbuhan profesional (*professional growth*), dan merupakan satu dari dimensi pemberdayaan guru, yang meliputi pertumbuhan profesional (*professional growth*) pengambilan keputusan (*decision making*), status, efikasi diri (*self efficacy*), otonomi (*autonomy*), dan pengaruh (*imfact*).
3. Evaluasi adalah pengukuran keberhasilan atau kegagalan berdasarkan pelaksanaan dari perencanaan pembelajaran.
4. Pelaporan adalah upaya untuk mengkomunikasikan, menjelaskan, mempengaruhi, dan melakukan suatu tindakan sebagai bagian dari pengawasan proses pembelajaran.
5. Tindak lanjut adalah upaya perbaikan atas dasar evaluasi.

Pengawas proses pembelajaran dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan dan menetapkan peringkat akreditasi.

Dalam proses pembelajaran, sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan dan lembaga penjaminan mutu pendidikan diwujudkan dalam bentuk evaluasi diri sekolah (EDS). Kepala sekolah, pengawas, dan lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan mutu. Selain itu, kepala sekolah dan pengawas juga melakukan pengawasan dalam bentuk supervisi akademik dan supervisi manajerial.

Proses pengawasan dapat dilakukan dengan cara berikut.

1. Pemantauan
Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi.
2. Supervisi
Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan melalui pemberian contoh, diskusi, konsultasi atau pelatihan.

3. Pelaporan

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi dan evaluasi proses pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak lanjut pengembangan profesionalitas pendidik secara berkelanjutan.

4. Tindak Lanjut

Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk:

- a) Penguatan dan penghargaan kepada pendidik yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar; dan
- b) Pemberian kesempatan kepada pendidik untuk mengikuti program pengembangan profesionalitas berkelanjutan.

Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah dan tingkat kelas. Dalam tingkat sekolah yang berperan adalah kepala sekolah dan tingkat kelas yang berperan adalah pendidik. Walaupun dibedakan antara tugas kepala sekolah dan tugas guru dalam pelaksanaan kurikulum serta diadakan perbedaan tingkat dalam pelaksanaan administrasi, yaitu tingkat kelas dan tingkat sekolah, namun antara kedua tingkat dalam pelaksanaan administrasi kurikulum tersebut senantiasa bergandengan dan bersama-sama bertanggungjawab melaksanakan proses administrasi kurikulum.

Pada tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggungjawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Dia berkewajiban melakukan kegiatan-kegiatan yakni menyusun rencana tahunan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat dan membuat notulen rapat, membuat statistik dan menyusun laporan.

Adapun *Curriculum implementation*, membicarakan seberapa jauh kurikulum dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, yang perlu dipantau adalah proses pelaksanaannya atas dasar evaluasi perlu tidaknya kurikulum direvisi untuk penyempurnaan.¹³

a. Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin

Tanggung jawab kepala sekolah adalah memimpin sekolah melaksanakan

¹³ Dakir. (2010). *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta, h.15.

dan membina serta mengembangkan kurikulum. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang-orang lain atau kelompok agar mereka berbuat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berbagai cara dilakukan seorang pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya seperti: *persuasive*, mempengaruhi atau dengan cara lain. Cara-cara ini sering digunakan oleh seorang pemimpin dalam usahanya memotivasi bawahannya agar mereka bertindak kearah tujuan yang diharapkan itu. Cara-cara ini sering digunakan oleh seseorang pemimpin dalam usahanya memotivasi bawahannya agar mereka bertindak kearah tujuan yang diharapkan itu. Cara-cara inipun sering digunakan kepala sekolah didalam melaksanakan kepemimpinannya dalam rangka melaksanakan kurikulum di sekolah.

Pengangkatan seseorang menjadi kepala sekolah dilakukan berdasarkan beberapa kemungkinan:

- a. Karena memiliki kepribadian yang baik atau yang menonjol sehingga dihormati dan memiliki kewibawaan sebagai pemimpin.
- b. Karena dia mempunyai prestasi kerja dan prestasi pendidikan yang tinggi. Dan ada kelompok yang berpendapat, bahwa pengangkatan seseorang menjadi kepala sekolah akan yakin memajukan sekolah tersebut dan berhasil melaksanakan program sekolah sebaik-baiknya.
- c. Telah memiliki pengalaman kerja yang cukup, dan berkat pengalaman itu diharapkan mampu memecahkan berbagai masalah, khususnya dalam pelaksanaan kurikulum.

Pada umumnya seorang pemimpin (termasuk kepala sekolah) harus memiliki sifat/sikap/tingkah laku tertentu yang justru merupakan kelebihan dibandingkan orang lain/bawahannya yang dipimpin. Sifat/sikap/tingkah laku tersebut antara lain:

1) Mampu mengelola sekolah (*managerial skills*)

Kemampuan ini ditandai dengan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengelola pelaksanaan kurikulum, misalnya organisasi guru bidang studi, pembentukan regu-regu guru dan koordinator bidang studi, pemberian tugas pada guru, mendorong, mengawasi dan menilai kegiatan guru dalam pelaksanaan program sekolah sesuai dengan tuntutan kurikulum yang ada.

- 2) Kemampuan profesional atau keahlian dalam jabatannya
Keahliannya ini memungkinkan kepala sekolah tersebut untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas-tugas administrasi yang dibebankan kepadanya. Sebagai kepala sekolah dia juga sebagai guru, yang harus memiliki kemampuan profesional kependidikan, termasuk penguasaan dalam bidang program pendidikan keguruan.
- 3) Bersikap rendah hati dan sederhana
Sikap rendah hati berarti tidak pernah menyombongkan diri tentang kemampuan, pengetahuan dan kelebihan-kelebihannya dalam bidang pendidikan. sikap ini menuntut pemimpin/ kepala sekolah atau yang lebih banyak mendengarkan, memikirkan dan bertahta/mencari informasi, bukan memerintah atau menyuruh, kendatipun bertindak demikian dalam situasi tertentu tidak dilarang sepenuhnya.
- 4) Selain dari sikap-sikap tersebut, maka kepala sekolah sebaiknya memiliki ciri-ciri kepribadian, antara lain:
 - a. Bersikap suka menolong
 - b. Sabar dan memiliki kestabilan emosi
 - c. Percaya pada diri sendiri
 - d. Berfikir kritis, dan sebagainya.

b. Perilaku Seorang Administrator

Prilaku seorang administrator penting sekali dalam hubungan dengan perencanaan program, pengorganisasian staf, pergerakan semua pihak yang perlu dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan supervisi, penilaiia terhadap personal sekolah.

Pendapat Castetter dikemukakan Hamalik, bahwa ada beberapa perilaku yang perlu dikembangkan oleh seorang administrator dalam kegiatan sehari-harinya diantaranya:

1. *Respond to day in day out for assistance subordinate.*
2. *Render intellectual out emotional support member of his group in carrying out the program educational*
3. *Permits attitude to subordinate in performing their responsibilities*
4. *Encourages subordinates in participate in planning*
5. *Makes him self available to staff for solving problems*

6. *Exhibits integrity in performance appraisal*
7. *Get feedback from individuals*
8. *Is motivates to help other to help themselves*

c. Penyusunan Rencana Tahunan

Perencanaan berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan manajerial sekolah. Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan terdiri dari rencana jangka panjang (minimal rencana untuk 5 sampai 10 tahun) dan jangka pendek (rencana tahunan, bulanan) berdasarkan garapan seorang administrator sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab membuat rencana-rencana, yaitu:

- 1) Perencanaan bidang kemuridan/kesiswaan.
- 2) Perencanaan bidang personal/tenaga kependidikan.
- 3) Perencanaan bidang sarana kependidikan.
- 4) Perencanaan bidang ketatausahaan sekolah.
- 5) Perencanaan bidang pembiayaan/anggaran pendidikan.
- 6) Perencanaan bidang Organisasi sekolah.
- 7) Perencanaan bidang hubungan kemasyarakatan/komunikasi pendidikan.¹⁴

Rencana-rencana tersebut perlu disusun secara menyeluruh yang mencakup semua bidang garapan dalam berbagai jenjang perencanaan.

- 1) Dalam menyusun perencanaan tersebut, kepala sekolah harus memperhatikan persyaratan-persyaratan, bahwa rencana disusun dengan kerjasama dan musyawarah antara kepala sekolah dengan guru-guru. Keterlibatan para guru sangat penting untuk menimbulkan rasa tanggung jawab dalam mensukseskan pelaksanaan semua rencana.
- 2) Perencanaan disusun berdasarkan tujuan yang jelas. Tujuan ini harus sesuai dengan tujuan-tujuan institusional dan tujuan kurikuler.
- 3) Perencanaan disusun berdasarkan realitas sebenarnya, rumusan rencana sederhana, jangan muluk-muluk dan mudah dilaksanakan.
- 4) Perencanaan dibuat secara terinci. Tujuan yang spesifik dan operasional, kegiatan-kegiatan yang jelas dan berurutan, perincian alat/perlengkapan

¹⁴ Oemar Hamalik, *op.cit*, h.176.

dan prosedur penilaian yang akan ditempuh, sehingga menjadi pedoman yang lebih mudah untuk dilaksanakan.

- 5) Perencanaan harus luwes, jadi mudah diadakan penyesuaian dengan kebutuhan, masalah dan tuntutan lingkungan sekolah dan sekitarnya, bilamana diperlukan.
- 6) Perencanaan memuat bidang garapan yang berkesinambungan satu sama lain berdasarkan prinsip bertahap dan bergilir dilihat dari prinsip prioritas.
- 7) Perencanaan hendaknya memperhatikan prinsip faktor efisiensi dimana adanya penghematan tenaga, biaya dan waktu, serta penggunaan sumber-sumber yang telah tersedia dengan baik sehingga tercapainya tujuan-tujuan rencana secara maksimal.
- 8) Perencanaan harus mencegah adanya duplikasi dalam pelaksanaannya karena itu perencanaan disusun secara kritis, dan diadakan pemeriksaan ulang sebelum dilaksanakan rencana-rencana yang diputuskan pada setiap sekolah.¹⁵

Dalam konteks ini manajemen dan organisasi kelas merupakan susunan keterampilan dan pendekatan guru berguna untuk membangun dan pemeliharaan, keteraturan, dan lingkungan pembelajaran produktif.¹⁶

Ada sedikit gangguan dan perilaku tugas dalam efektivitas guru di kelas. Guru efektif mengusahakan lingkungan kelas yang positif bagi siswa mereka dengan kerjasama untuk menjamin bahwa rutinitas, prosedur dan pengharapan mereka jelas, bahkan para guru memiliki waktu yang lebih pada saat memulai tahun pelajaran untuk bekerjasama dengan siswa atas upaya menciptakan iklim kelas positif yang memungkinkan pribadi siswa terpelihara dengan rasa hormat dan adil, mengajar para siswa secara aktif, memberikan penjelasan dan arahan, sebagai pengharapan siswa dan memberikan mereka guru berkualitas dan terpilih. Di dalam kelas ada peluang keberhasilan mencapai harapan-harapan. Bila isu tentang disiplin terjadi, guru efektif tidak berpikir tentang apa yang dilakukan,

¹⁵ Oemar Hamalik, *Ibid*, h.176.

¹⁶ James H. Stronge dan Jennifer L. Hindman. (2006). *The Teacher Quality Index*. Alexandria: ASCD, h.13.

mereka memberikan respon dalam keadaan perilaku siswa yang dapat diprediksi. Dalam lingkungan pembelajaran produktif yang sudah tertata, guru efektif mampu menangkap waktu pengajaran yang selalu kehilangan dalam aktivitas administratif, disiplin dan transisi. Siswa yang terlibat secara aktif dalam pembelajaran teratur dan kelas yang positif sebagai suatu lingkungan pembelajaran positif adalah berhubungan dengan pencapaian prestasi lebih tinggi.

BAB V

EVALUASI KURIKULUM

A. PENGERTIAN EVALUASI KURIKULUM

Penggunaan kata “evaluasi” sering dijumpai dalam kegiatan pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar, atau dalam manajemen sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan. Karena itu, sesungguhnya evaluasi merupakan bagian dari proses pengawasan yang dilaksanakan para manajer atau pimpinan organisasi. Sebagai bagian fungsi manajemen, maka pengawasan organisasi mengacu kepada proses yang sistematis dari pengaturan aktivitas organisasi untuk membuat mereka konsisten dengan pengharapan yang tersusun dalam rencana, target dan standar kinerja.¹

Evaluasi adalah proses pemantauan untuk memastikan derajat pencapaian tujuan yang ditetapkan melalui proses perencanaan dalam satu organisasi. Organisasi pendidikan secara makro adalah Departemen atau Kementerian Pendidikan Nasional. Sedangkan secara meso pengaturan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Secara mikro pengaturan kurikulum pendidikan dilakukan oleh sekolah, madrasah atau pesantren, termasuk perguruan tinggi.

Proses pembuatan keputusan sebagaimana dilakukan dalam perencanaan tidak sempurna jika tidak dilakukan terhadap evaluasi proses atau evaluasi

¹ Richard L Daft. (2008). *New Era of Management*, New Jersey: South Western, h.378.

hasil terhadap suatu kegiatan sebagai pelaksanaan program. Jika hasil yang diinginkan tidak tercapai atau jika yang diharapkan tidak terwujud atau terjadi dalam kenyataan menjadi hal yang tidak diinginkan. Dengan begitu, diperlukan satu tindakan perbaikan yang harus dilakukan. Dalam konteks ini evaluasi adalah bentuk pengawasan manajerial. Kegiatan tersebut mencakup pengumpulan data untuk mengukur hasil kinerja dan membandingkan dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan. Jika hasil yang dicapai kurang dari pada apa yang diinginkan maka perlu waktu menilai ulang dan kembali kepada langkah sebelumnya/awal. Di sinilah pengambilan keputusan berjalan dan berproses terus menerus menjadi dinamis dalam proses manajemen. Evaluasi adalah selalu suatu yang mudah bila pada tahap sasaran yang jelas, target terukur dan terjadwal ketika menyusunnya.²

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Masukan adalah segala sesuatu sumber dan/atau daya yang diperlukan dalam sistem pendidikan untuk menciptakan hasil-hasil pendidikan. Proses adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mengolah masukan pendidikan, seperti pembelajaran, pengembangan tenaga kependidikan dan kurikulum. Out put adalah salah satu jenis hasil pendidikan, ketika peserta didik belum sampai pada klasifikasi hasil pendidikan. Evaluasi dilaksanakan terhadap pelaksanaan rencana untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program atau kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam program atau kegiatan.³

Tegasnya evaluasi adalah penyediaan informasi untuk kepentingan memfasilitasi pembuatan keputusan dalam berbagai langkah pengembangan kurikulum. Informasi berkaitan dengan program sebagai kesatuan utuh atau hanya berkenaan dengan beberapa komponen. Evaluasi juga mengaplikasikan pemilihan kriteria, sekumpulan data dan analisis.⁴

Para ahli mendefinisikan evaluasi kurikulum dengan beragam pengertian. Menurut Sukmadinata, evaluasi kurikulum memegang peranan penting

² John R. Schermerhorn. (2010). *Introduction to Management*, New Jersey :John Willey & Sons, Inc, h.165.

³ Teguh Triwiyanto. (2015). *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, h.183.

⁴ Rusman. (2009). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Press, h.98.

baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya, maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Evaluasi menurut Tyler yang dikutip oleh Wahyudin adalah “*the process for determining the degree to which these change in behavior are actually taking place*”, evaluasi berfokus pada upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar (behavior). Evaluasi kurikulum sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu.⁵

Sedangkan menurut Nasution, evaluasi kurikulum merupakan hal yang kompleks karena banyaknya aspek yang harus dievaluasi, banyaknya orang yang terlibat, dan luasnya kurikulum yang harus diperhatikan. Disamping itu, evaluasi kurikulum juga berhubungan dengan definisi kurikulum yang diberikan, apakah berupa bahan pelajaran menurut disiplin ilmu ataukah dalam arti yang luas meliputi pengalaman anak di dalam maupun di luar kelas.⁶

Istilah evaluasi biasanya merujuk kepada proses membuat penilaian, menetapkan nilai atau memutuskan yang baik.⁷ Selain itu, evaluasi dilakukan untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program atau kegiatan.

Efisiensi adalah pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas sehingga mencapai hasil yang optimal. Efektivitas adalah keberhasilan suatu organisasi pendidikan dalam mencapai tujuannya. Manfaat adalah nilai atau hasil lebih yang diperoleh dari hasil pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang sudah dilakukan. Selanjutnya, dampak adalah hasil atau keuntungan sebagai akibat dari program atau kegiatan yang dilaksanakan.⁸

Keberadaan kurikulum sebagai kumpulan konseptual tentang tujuan, materi, metode, media dan evaluasi proses dan hasil menjadi pedoman pelaksanaan pembelajaran bagi anak didik, khususnya yang dijadikan guru sebagai pedoman untuk membelajarkan anak didik, sehingga

⁵ Dinn Wahyudin. (2014). *Manajemen Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 27.

⁶ Sukiman. *Op.cit*, 194.

⁷ Richard L Arends. (2004). *Learning to Teach*, New York: McGraw Hill, h.218.

⁸ Teguh Triwiyanto, *op.cit*, h.183.

potensi mereka berkembang secara maksimal. Oleh sebab itu, kurikulum dari waktu ke waktu menghadapi lingkungan internal dan eksternal. Karena dalam manajemen pendidikan, bidang kurikulum merupakan bagian integral dari manajerial yang harus mendapat peninjauan terus menerus sejalan dan dinamika perkembangan zaman. Dalam pengembangan kurikulum evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan kurikulum. Hasil yang diperoleh dapat dijadikan balikan (*feed back*) bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum.⁹

Pemantauan dan penilaian kurikulum merupakan salah satu fungsi manajemen kurikulum sebagai tugas yang harus dikerjakan seorang manajer mulai dari tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai perancang, pelaksana, dan evaluator sistem pendidikan nasional, tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta kecamatan dalam ruang lingkup kewilayahan pendidikan, pada semua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal.¹⁰

Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para perencana, dan pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijaksanaan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah dan para pelaksana pendidikan lainnya, dalam memahami dan membantu perkembangan siswa, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian serta fasilitas pendidikan lainnya. Sukmadinata juga berpendapat bahwa evaluasi kurikulum sukar dirumuskan secara tegas, hal itu disebabkan beberapa faktor:

1. Evaluasi kurikulum berkenan dengan fenomena-fenomena yang terus berubah.
2. Objek evaluasi kurikulum adalah sesuatu yang berubah-ubah sesuai dengan konsep kurikulum yang digunakan.

⁹Zainal Arifin.(2012).*Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remajarosdakarya, h.263.

¹⁰Oemar Hamalik.(2008). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya.h.217.

3. Evaluasi kurikulum merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia yang sifatnya juga berubah.¹¹

Menurut S Hamid Hasan yang dikutip oleh Rusman, evaluasi kurikulum dan pendidikan memiliki karakteristik yang tak terpisahkan. Karakteristik itu adalah lahirnya berbagai definisi untuk suatu istilah teknis yang sama. Demikian dengan evaluasi yang diartikan oleh berbagai pihak dengan berbagai pengertian. Hal tersebut disebabkan filosofi keilmuan yang dianut seseorang berpengaruh metodologi evaluasi, tujuan evaluasi, dan pada gilirannya terhadap pengertian evaluasi. Sementara itu menurut Morrison evaluasi adalah perbuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini ada tiga faktor utama yaitu: 1) pertimbangan; 2) deskripsi objek penilaian; 3) kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan.¹²

Menurut Sukmadinata, evaluasi dan kurikulum merupakan dua disiplin yang berdiri sendiri. Ada pihak lain yang berpendapat antara keduanya tidak ada hubungan, tetapi ada pihak lain yang menyatakan keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Pihak yang memandang ada hubungan, hubungan tersebut merupakan hubungan sebab akibat. Perubahan dalam kurikulum berpengaruh pada pelaksanaan kurikulum. Hubungan antara evaluasi dengan kurikulum bersifat organis, dan prosesnya berlangsung secara evolusioner. Pandangan-pandangan lama yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman, secara berangsur-rangsur diganti dengan pandangan baru yang lebih sesuai.¹³

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses menilai keberhasilan dari suatu program yang dilaksanakan, apakah sudah mencapai tujuan atau belum dalam rangka memberikan masukan dan membuat keputusan untuk perbaikan program yang dilaksanakan lebih lanjut. Dengan begitu, evaluasi kurikulum dapat dilakukan oleh semua level manajemen kementerian pendidikan nasional, termasuk yang diberikan kewenangan adalah Pusat Kurikulum Nasional sebagai unit pelaksana teknis penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan.

¹¹ Nana Syaodih Sukmadinata. *Op.cit.* h. 172.

¹² Rusman. (2010). *Manajemen Kurikulum*, Jakarta: Raja Grafindo, h, 91.

¹³ Nana Syaodih Sukmadinata.*op.cit*, h. 172.

Tim pengembang kurikulum pada tingkat satuan pendidikan melaksanakan pengembangan kurikulum dengan berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi acuan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas relevansi dan program pendidikan nasional pada semua jenjang pendidikan, tidak terkecuali satuan pendidikan yang dikembangkan dan dalam tanggung jawab Kementerian Agama RI.

B. TUJUAN EVALUASI KURIKULUM

Kurikulum hanyalah sebagai benda mati berupa kumpulan konseptual yang dihasilkan manusia berdasarkan pikiran, pengalaman, peradaban, sejarah, dan nilai-nilai maupun dokumen tentang rencana, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran anak didik di dalam maupun di luar kelas (perpustakaan, laboratorium, atau praktik lapangan, observasi, studi proyek, dll). Pada tingkat pelaksanaan kurikulum sebagaimana kegiatannya diwujudkan dalam pembelajaran anak didik, dan evaluasi terhadap praktik pembelajaran, tidak bisa serta merta diketahui hasilnya kecuali dilakukan evaluasi oleh evaluator, baik pejabat bidang pendidikan, maupun kepala sekolah, pengawas dan guru.

Untuk menilai kebaikan suatu kurikulum yang dipraktikkan dalam lembaga pendidikan maka perlu diadakan evaluasi kurikulum. Suatu evaluasi yang baik dilakukan secara komprehensif mencakup semua langkah kegiatan, dan komponen kurikulum, menilai dari dokumen kurikulum, pelaksanaan, hasil yang telah dicapai, fasilitas penunjang serta para pelaksana kurikulum.¹⁴

Ada beberapa model evaluasi kurikulum. Upaya mengembangkan model diskrepensi (*Discrepancy Model*) dengan menilai *discrepancy* atau kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang dilaksanakan. Stake, mengembangkan model kontingensi-kontingensi (*contingency-congruence Model*). Model ini pada prinsipnya juga membandingkan yang diharapkan dengan yang dilaksanakan, tetapi selanjutnya para pelaksana kurikulum

¹⁴Nana Syaodih Sukmadinata.(2007). *Kurikulum dan Pembelajaran* dalam Muhammad Ali, dkk, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: Pedagogiana Press, h.457.

membuat rancangan untuk mendekati harapan dan pelaksanaan tersebut sehingga cocok/sesuai dengan kegiatan belajar siswa.

Stufflebeam mengembangkan model CIPP atau *context, input, process* dan *product*. Evaluasi ini bersifat menyeluruh, seluruh komponen dari kurikulum dievaluasi, mulai dari *context* atau tujuan dalam keterkaitannya dengan tuntutan masyarakat atau lapangan; *input* atau masukan yaitu siswa sebagai subjek yang belajar guru sebagai subjek yang mengajar, desain kurikulum sebagai rancangan pembelajaran, media dan sarana-prasarana sebagai alat bantu pengajaran; *proses* atau aktivitas siswa belajar dengan arahan, bantuan dan dorongan dari guru, *product* atau hasil, baik hasil yang dapat dilihat dalam jangka pendek pada akhir pendidikan atau hasil jangka panjang setelah belajar atau belajar pada jenjang yang lebih tinggi lagi.¹⁵

Tujuan evaluasi adalah mengukur capaian kegiatan, yaitu sejauh mana kegiatan dapat dilaksanakan. Arikunto, sebagaimana dikemukakan oleh Teguh Triwiyanto,¹⁶ menyatakan bahwa agar pengukuran tujuan dapat diketahui secara cermat dan teliti sampai diketahui bagian mana dari kegiatan yang dapat diimplementasikan dan bagian mana yang tidak dapat diimplementasikan beserta penyebabnya sehingga tujuan evaluasi tersebut perlu dirinci. Untuk dapat mengadakan rincian terhadap tujuan evaluasi, evaluator harus mampu mengenali komponen-komponen kegiatan.

Dengan melakukan evaluasi dapat diketahui sejauh mana tujuan pendidikan melalui komponen kurikulum telah dicapai. Dalam konteks ini, evaluasi yang dikembangkan berdasarkan pandangan filosofis fenomenologi yang melahirkan pendekatan kualitatif dalam evaluasi kurikulum bertujuan untuk menekankan cita-cita demokratis karena segenap anggota masyarakat dan *stakeholders* lain memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dari evaluasi. Itu artinya evaluasi bukan milik sekelompok orang yang dinamakan pengambil keputusan tetapi dimiliki setiap orang yang memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap kurikulum.¹⁷

¹⁵ Mohammad Ali dkk. (2007). *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Bandung: Pedagogiana Press, h. 457.

¹⁶ Teguh Triwiyanto. *Op.cit.* h.183.

¹⁷ S. Hamid Hasan. *Op.cit.* h.46.

Dengan demikian, evaluasi kurikulum menjadi proses penting untuk menentukan hasil yang dicapai. Di sini dapat ditegaskan bahwa keberadaan evaluasi dapat menjadi proses untuk meninjau ulang kemajuan pendidikan dan melakukan inovasi dan gagasan baru untuk mengembangkan kurikulum selanjutnya. Posisi hasil evaluasi kurikulum tidak dapat diabaikan begitu saja sampai dilakukan kembali evaluasi berikutnya. Dipahami bahwa harus ada tindak lanjut yang dilakukan para evaluator dan perancang kurikulum bahkan sampai kepada guru sebagai wujud dari tanggung jawab dalam mengelola sekolah sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dengan kata lain, hasil evaluasi merupakan balikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja sekolah. Fungsi utama dari kegiatan evaluasi, yaitu diagnosis, prediksi, seleksi dan penetapan peringkat atau nilai dari tugas atau kegiatan yang telah dikerjakan para praktisi pendidikan.

Di sisi lain dipahami bahwa evaluasi kurikulum adalah menyempurnakan kurikulum dengan cara mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria, indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi dan kelayakan program.¹⁸

Dalam konteks kurikulum, evaluasi kurikulum didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), proses, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar kurikulum. Oleh sebab itu, evaluasi kurikulum berfungsi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu kurikulum yang diterapkan pada pendidikan. Evaluasi kurikulum bertujuan untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu kurikulum.

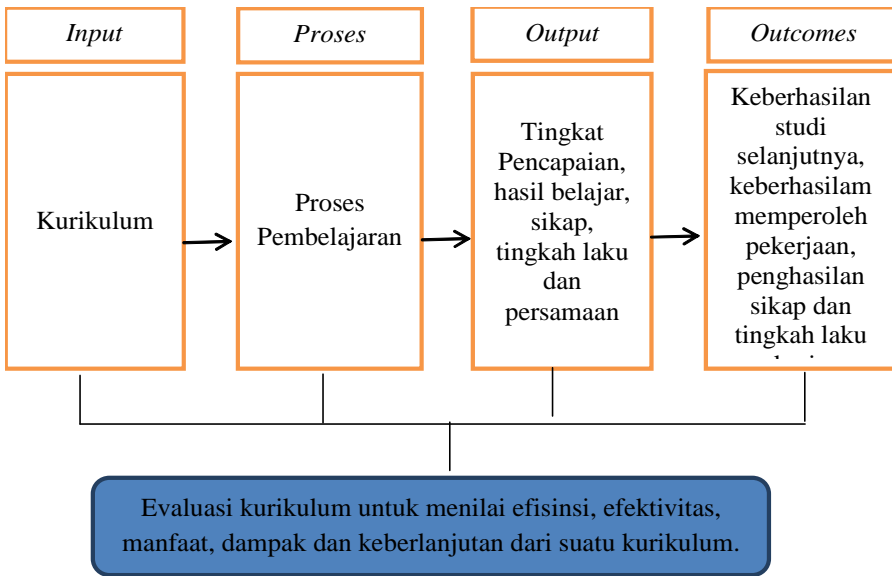
Evaluasi kurikulum menjadi tugas para manajer, perencana, pengembang dan pengawas pendidikan. Menurut Hamid Hasan, tujuan evaluasi kurikulum adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi mengenai pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan suatu kurikulum sebagai masukan bagi pengambilan keputusan.

¹⁸ Dinn Wahyudin. (2014). *Manajemen Kurikulum*, Bandung: Remajarosdakarya, h.148.

2. Menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam suatu lingkungan tertentu.
3. Mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum.
4. Memahami dan menjelaskan karakteristik suatu kurikulum dan pelaksanaan suatu kurikulum.

Tujuan evaluasi kurikulum adalah mengukur capaian kurikulum yaitu, sejauh mana kurikulum dapat dilaksanakan. Proses evaluasi kurikulum dan sampai pembelajaran dapat digambarkan sebagaimana dalam gambar berikut:



Komponen Evaluasi Kurikulum dan pembelajaran

C. PROSES EVALUASI KURIKULUM

Sebagai suatu sistem keberadaan kurikulum dalam dunia pendidikan diyakini bermanfaat bagi perubahan perilaku anak didik jika kurikulum tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh para manajer pendidikan pada tingkat makro (menteri pendidikan, dirjen pendidikan dasar dan menengah, para direktur), tingkat meso

(Gubernur, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, kabupaten/kota) maupun tingkat mikro (kepala sekolah/madrasah, wakil kepala sekolah/madrasah, pengawas, dan guru-guru) di dalam sistem persekolahan. Karena itu, penyelenggara pendidikan bertanggung jawab terhadap pencapaian keberhasilan pelaksanaan kurikulum yang ditetapkan. Oleh sebab itu, program penilaian merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dalam rangka penilaian kurikulum sebagai alat pengelola dan evaluator dalam menyelenggarakan penilaian kurikulum. Program penilaian kurikulum memuat hal-hal berikut:

- a. Penentuan tujuan program penilaian
- b. Penilaian terhadap instrumen penilaian
- c. Pengadministrasian penilaian
- d. Pengolahan data
- e. Penganalisaan penafsiran
- f. Pendayagunaan hasil penilaian
- g. Pencatatan dan pelaporan.¹⁹

S. Hamid Hasan,²⁰ proses yang dapat dilalui oleh seorang evaluator dalam melaksanakan evaluasi adalah:

- a. Kajian terhadap evaluasi, yaitu langkah pertama yang harus dilakukan evaluator terhadap kurikulum atau bentuk kurikulum yang menjadi evaluannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman terhadap karakteristik kurikulum. Evaluator harus mempelajari secara mendalam latar belakang kelahiran suatu kurikulum, landasan filosofis dan teoretis kurikulum tersebut, ide kurikulum, model kurikulum yang digunakan untuk dokumen kurikulum, proses pengembangan dokumen kurikulum, proses implementasi kurikulum dan evaluasi hasil belajar.
- b. Pengembangan proposal evaluasi, berdasarkan kajian yang dilakukan pada langkah pertama maka evaluator kemudian mengembangkan proposalnya. Untuk itu maka evaluator memutuskan pendekatan dan jenis evaluasi yang akan dilakukan. Evaluator dapat menentukan apakah

¹⁹ Oemar Hamalik. (2008). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h.217.

²⁰ S. Hamid Hasan. *Op.cit.* h.160.

yang akan digunakannya adalah evaluasi kuantitatif ataukah evaluasi kualitatif.

- c. Pertemuan dan diskusi, dengan pengguna jasa evaluasi merupakan langkah penting dan menentukan. Hasil diskusi dengan pengguna jasa akan menentukan apakah proposal yang diajukan akan dapat ditindaklanjuti atau tidak. Jika evaluator berhasil meyakinkan calon pengguna jasa evaluasi maka proposal yang diajukan mungkin akan disetujui dan pekerjaan evaluasi akan dapat dilaksanakan. Sebaliknya, jika pada pertemuan tersebut evaluator tersebut tidak berhasil meyakinkan calon pengguna jasa evaluasi maka proposal tersebut tidak terlaksana. Artinya, tidak ada pekerjaan evaluasi yang dilakukan berdasarkan proposal tersebut.
- d. Revisi proposal, tidak lanjut dari hasil pertemuan antara pengguna jasa evaluasi dengan evaluator. Apabila dalam pertemuan dan pembicaraan tersebut berbagai komponen harus direvisi maka adalah kewajiban evaluator untuk melakukan revisi tersebut. Hasil revisi harus diperlihatkan kembali kepada pengguna jasa evaluasi dan disetujui.
- e. Rekrutmen personalia, kegiatan ini bisa saja dilakukan ketika proposal disusun.
- f. Pengurusan persyaratan administrasi, setiap kegiatan yang berkenaan dengan evaluasi kurikulum memerlukan berbagai formalitas administrasi. Evaluator harus mendapatkan persetujuan dari pengguna kurikulum, pimpinan sekolah atau atasannya dan mungkin juga dari pejabat yang terkait dengan masalah keamanan sosial politik.
- g. Pengorganisasian pelaksanaan, suatu kegiatan manajemen yang tingkat kerumitannya ditentukan oleh ruang lingkup pekerjaan evaluasi dan jumlah evaluator yang terlibat. Semakin luas objek yang harus dievaluasi maka semakin banyak jumlah evaluator yang dibutuhkan dan akan semakin rumit pula pekerjaan manajemen yang harus dilakukan.
- h. Analisis data, merupakan tindak lanjut setelah proses pengumpulan data evaluasi berhasil dilakukan. Ketika model yang digunakan adalah model kuantitatif dan dengan demikian data utama evaluasi adalah data kuantitatif. Proses selanjutnya dalam pengelolaan data pada umumnya menggunakan jasa komputer. Analisis data adalah pekerjaan professional dan harus dilakukan oleh evaluator utama beserta evaluator

tim. Analisis data merupakan bentuk tanggungjawab profesional dan memerlukan wawasan dan pemahaman terhadap evaluasi untuk menghasilkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

- i. Penulisan laporan, merupakan langkah yang harus dilakukan oleh evaluator dan para tim. Pada umumnya ada dua jenis laporan yang dapat dijadikan sebagai bentuk dalam penulisan hasil laporannya, diantaranya adalah (1) laporan eksekutif, yaitu model laporan yang ditulis dan dikembangkan untuk dibaca oleh para eksekutif yang pada umumnya memiliki waktu yang terbatas, (2) laporan lengkap, yaitu model laporan yang dikembangkan untuk dibaca oleh orang yang memiliki waktu yang luang.
- j. Pembahasan laporan dengan pengguna jasa, pembahasan ini diperlukan untuk melihat kelengkapan laporan. Dalam pembahasan ini jika pengguna jasa memerlukan tambahan informasi yang memang tercantum dalam kontrak maka adalah kewajiban evaluator untuk melengkapi laporan tersebut.
- k. Penulisan laporan akhir, sebagai hasil dari revisi yang harus dilakukan evaluator ketika terjadi pembahasan laporan dengan pengguna jasa. Jika dalam pembahasan tersebut pihak pengguna sudah tidak mengajukan revisi maka laporan awal dapat langsung dijadikan laporan akhir. Jika dari hasil pembahasan diperlukan berbagai revisi maka evaluator harus menulis laporan akhir berdasarkan revisi tersebut.

Dalam konteks ini, evaluasi kurikulum yang dilaksanakan akan menghasilkan tindak lanjut dengan melakukan pembentukan ulang dan pelaksanaan ulang kurikulum. Proses yang ditempuh ini mensyaratkan pengaturan ulang dan penyesuaian kebiasaan pribadi cara guru mengajar, cara bekerja, penekanan program, ruang kelas untuk pembelajaran, dan penjadwalan program kurikulum. Itu berarti para penduduk berusaha untuk mengganti dari program sekarang dengan program baru dengan memodifikasi program baru yang dapat mencapai apa yang diinginkan dengan temuan bahwa ada penolakan besar atas kurikulum sebelumnya.

Meskipun pengalaman para pemimpin pendidikan dalam aktivitas kurikulum telah diwujudkan bahwa implementasi adalah suatu aspek pengembangan kurikulum, hanya *sepuluh* atau *tujuh belas* tahun belakangan persoalan pelaksanaan menjadi kepedulian utama pendidik. Bila evaluasi

pelaksanaan diperlukan pertimbangan berbagai asumsi pendidikan dalam pelaksanaannya, banyak asumsi bahwa pelaksanaan/kurikulum adalah hal yang sederhana dari langkah lain.

Dalam konteks ini, evaluasi kurikulum menjadi tahap penentuan apakah suatu program kurikulum masih dapat dipertahankan secara argumentatif untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, tujuan institusi, maupun tujuan kurikulum, dan tujuan mata pelajaran sebagai langkah progresif dalam mencapai kompetensi dan profil lulusan setiap satuan pendidikan nasional.

Evaluasi kurikulum dilakukan dengan mencermati capaian tujuan kurikulum yang ditetapkan. Evaluasi kurikulum dilakukan melalui beberapa prinsip berikut:

1. Prinsip relevansi, artinya relevan antara pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Prinsip relevansi berkaitan dengan tiga segi, yaitu relevansi pendidikan dengan lingkungan peserta didik; relevansi dengan perkembangan kehidupan masa sekarang dan masa depan; dan relevansi pendidikan dengan tuntutan dunia kerja.
2. Prinsip efektivitas, artinya sejauh mana sesuatu yang direncanakan atau diinginkan dapat terlaksana atau tercapai. Prinsip efektivitas belajar peserta didik.
3. Prinsip efisiensi, artinya perbandingan antara hasil yang dicapai (*output*) dan usaha yang telah dikeluarkan (*input*). Prinsip efisiensi dapat ditinjau dari waktu, tenaga, peralatan dan biaya.
4. Prinsip kesinambungan, artinya saling hubung atau jalin-menjalin antara berbagai tingkat dan jenis pendidikan. Kesinambungan antara berbagai tingkat sekolah harus mempertimbangkan bahwa (a) bahan pelajaran pada tingkat sekolah selanjutnya hendaknya sudah diajarkan pada tingkat sekolah sebelumnya; dan (b) bahan pelajaran yang sudah diajarkan pada tingkat sekolah lebih rendah tidak perlu diajarkan pada tingkat sekolah yang lebih tinggi. Kesinambungan antara berbagai bidang studi harus memperhatikan urutan penyajian dan terjalin dengan baik.
5. Prinsip fleksibilitas, artinya ada ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam bertindak (tidak kaku). Fleksibilitas mencakup fleksibilitas peserta

didik dalam memilih program pendidikan, serta fleksibilitas pendidikan dalam mengembangkan program pembelajaran.

Dalam konsep yang luas, evaluasi kurikulum merupakan proses komprehensif yang di dalamnya meliputi pengukuran. Evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan suatu nilai dari suatu objek. Keputusan evaluasi (*value Judgement*) tidak hanya didasarkan pada pengukuran (*quantitative description*), dapat pula didasarkan pada hasil pengamatan (*qualitative description*). Baik yang didasarkan pada hasil pengukuran (*measurement*) maupun bukan pengukuran (*nonmeasurement*) pada akhirnya menghasilkan keputusan nilai tentang suatu program/kurikulum yang dievaluasi.²¹

Permendikbud 159 Tahun 2014 menjelaskan bahwa evaluasi kurikulum adalah serangkaian kegiatan terencana, sistematis dan sistemik dalam mengumpulkan dan mengolah informasi, memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menyempurnakan kurikulum. Evaluasi kurikulum dilakukan melalui pendekatan, strategi dan model evaluasi kurikulum sesuai dengan tujuan atau sasaran evaluasi. Pendekatan evaluasi kurikulum merupakan cara pandang dalam mengevaluasi kurikulum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif.

1. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang menggunakan penilaian ahli berdasarkan kriteria sesuai dengan model yang diterapkan untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan.
2. Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang menggunakan instrumen yang sudah divalidasi sesuai dengan model yang diterapkan untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan.

Selain pendekatan, evaluasi kurikulum juga dilakukan dengan menggunakan strategi dan model evaluasi kurikulum. Strategi evaluasi kurikulum dilakukan secara deduktif atau induktif dengan langkah-langkah sistematis dan sistemik yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan valid. Sementara itu, model evaluasi kurikulum merupakan

²¹ Rusman, *op.cit.* h. 94.

kerangka konseptual dan operasional yang digunakan untuk mengevaluasi perangkat dokumen, buku, pelatihan, pendampingan dan monitoring untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Model evaluasi kurikulum yang digunakan dalam pendekatan kualitatif antara lain evaluasi bebas tujuan, analisis kesesuaian atau kesenjangan, studi, kasus, iluminatif dan responsif. Dalam pendekatan kuantitatif model evaluasi kurikulum yang digunakan antara lain evaluasi bebas tujuan, pendekatan sistem, dan penilaian akuntabilitas.

D. FUNGSI EVALUASI KURIKLUM

Evaluasi kurikulum berfungsi sebagai upaya penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan pada tingkat nasional, daerah dan satuan pendidikan. Evaluasi kurikulum bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai;

1. Kesesuaian antara ide kurikulum dan desain kurikulum;
2. Kesesuaian antara desain kurikulum dan dokumen kurikulum;
3. Kesesuaian antara dokumen kurikulum dan implementasi kurikulum; dan
4. Kesesuaian antara ide kurikulum, hasil kurikulum dan dampak kurikulum.

Ide kurikulum merupakan pikiran pokok kurikulum yang terdiri atas dasar filosofis, sosiologis, psiko-paedagogis, teoritis, yuridis, sistem, dan model kurikulum yang digunakan sebagai landasan dan kerangka dan pengembangan kurikulum. Rancangan perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran disebut dengan desain kurikulum, yang di buat untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sementara itu, yang dimaksud dengan dokumen kurikulum adalah sekumpulan dokumen yang berfungsi sebagai perangkat operasional kurikulum yang meliputi:

- 1) Dokumen kurikulum setiap satuan pendidikan atau program program pendidikan;
- 2) Dokumen kurikulum setiap mata pelajaran;
- 3) Pedoman implementasi kurikulum;
- 4) Buku teks pelajaran;

- 5) Buku panduan guru; dan
- 6) Dokumen kurikulum lainnya.

Agar mencapai tujuan yang nyata, ide, desain dan dokumen yang telah ditentukan harus diimplementasikan. Dalam hal ini implementasi kurikulum merupakan proses realisasi desain kurikulum yang diterjemahkan dalam aspek-aspek penyediaan perangkat dokumen, buku, pelatihan, pendampingan dan monitoring untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Implementasi dari ide, desain, dan dokumen diharapkan dapat menghasilkan perubahan dalam kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai capaian pembelajaran yang diwujudkan dalam bentuk kualitas pribadi dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hasil tersebut diharapkan dapat berdampak pada perubahan sikap perilaku kolektif masyarakat di sekitarnya.

Evaluasi kurikulum dilakukan terhadap pengembangan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, hasil kurikulum dan dampak kurikulum, yang mencakup hal-hal berikut :

- 1) Pengembangan dokumen kurikulum dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian antara substansi dokumen kurikulum dan desain kurikulum.
- 2) Evaluasi implementasi kurikulum dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian antara implementasi kurikulum dan dokumen kurikulum. Evaluasi implementasi kurikulum mencakup:
 - a. Evaluasi implementasi kurikulum terbatas, yaitu evaluasi terhadap muatan atau mata pelajaran untuk tingkat kelas atau untuk satuan pendidikan tertentu; dan
 - b. Evaluasi implementasi kurikulum penuh, yaitu evaluasi terhadap muatan pembelajaran atau mata pelajaran untuk seluruh tingkat kelas atau seluruh satuan pendidikan.
- 3) Evaluasi terhadap hasil kurikulum dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian antara capaian pembelajaran dengan kompetensi inti dan standar kompetensi lulusan.
- 4) Evaluasi dampak kurikulum dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai implikasi pemerolehan kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik terhadap perubahan sikap perilaku kolektif masyarakat disekitarnya.

Evaluasi kurikulum dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kementerian agama, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, kantor wilayah kementerian agama, kantor kementerian agama kabupaten/kota, komite satuan pendidikan /dewan pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam melaksanakan evaluasi kurikulum, terdapat beberapa tahapan yang dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Evaluasi reflektif, dilakukan pada saat pengembangan dokumen kurikulum. Evaluasi reflektif digunakan untuk pengambilan keputusan perbaikan proses pengembangan dokumen kurikulum.
- 2) Evaluasi formatif, dilakukan setelah implementasi kurikulum secara terbatas atau penuh. Evaluasi formatif digunakan untuk pengambilan keputusan perbaikan implementasi kurikulum.
- 3) Evaluasi sumatif, dilakukan setelah implementasi kurikulum secara penuh paling sedikit lima tahun. Evaluasi sumatif digunakan untuk pengambilan keputusan penyempurnaan kurikulum.

Ulfatin (2014:335) menawarkan evaluasi, termasuk kurikulum 2013 juga perlu untuk dilakukan perbaikan. Tiga bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam evaluasi kurikulum antara lain makna kurikulum, organisasi dan struktur kurikulum dan kompetensi lulusan. Pertama, makna kurikulum bisa bervariasi, mulai kurikulum yang dipandang secara programatik. Kurikulum 2013 hendaknya dipandang secara programatik sehingga mampu menjelaskan seberapa luas program-program yang menjadi tanggung jawab sekolah. Kedua, organisasi kurikulum 2013 sudah mencerminkan keterpaduan komponen-komponen kurikulum, namun keterpaduan tersebut hanya tampak antar submata pelajaran dalam struktur kurikulum, belum pada keseluruhan kegiatan sekolah termasuk ekstrakurikuler. Ketiga, rumusan standar kompetensi lulusan masih tampak parsial yang menggambarkan satuan domain pengetahuan, sikap dan keterampilan, serta menggambarkan bahwa rumusan kompetensi lulusan berada pada tingkat domain standar kebutuhan perkembangan anak secara teoretis pendidikan.

Penilaian kurikulum harus mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh dan proporsional, sesuai dengan kompetensi inti yang telah ditentukan. Penilaian aspek pengetahuan, dapat dilakukan

dengan ujian tulis, lisan, dan daftar isian pertanyaan. Penilaian aspek keterampilan dapat dilakukan dengan ujian praktik, analisis keterampilan dan analisis tugas, serta penilaian oleh peserta didik sendiri. Adapun penilaian aspek sikap, dapat dilakukan dengan daftar isian sikap (pengamatan pribadi) dari diri sendiri, dan daftar isian sikap yang disesuaikan dengan kompetensi inti.

Dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penataan standar Nasional Pendidikan dikemukakan beberapa ketentuan tentang penilaian/evaluasi kurikulum sebagai berikut:

1. Evaluasi kurikulum merupakan upaya mengumpulkan dan mengolah informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kurikulum pada tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan.
2. Evaluasi kurikulum dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan/atau masyarakat.
3. Evaluasi muatan nasional dan muatan lokal dilakukan oleh pemerintah.
4. Evaluasi muatan lokal dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
5. Evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat.
6. Evaluasi muatan nasional, muatan lokal, dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh masyarakat.
7. Evaluasi Kurikulum digunakan untuk penyempurnaan kurikulum.

Untuk mendapatkan data yang lengkap, utuh, dan menyeluruh tentang penilaian kurikulum dapat dilakukan dengan menilai rancangan kurikulum dan menilai pengembangan kurikulum di kelas. Kedua hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Menilai Rancangan Kurikulum

Rancangan kurikulum harus diarahkan dan diprioritaskan terhadap program pembelajaran, dan layanan sebagai kerangka kerja untuk perencanaan kelas. Ketika membangun suatu rancangan kurikulum, guru harus dilibatkan secara langsung dalam proses dialog. Inilah garis besar yang menjadi poin-poin referensi di masa depan, yang dapat dibandingkan kemajuannya dengan kriteria dari kurikulum yang paling baik.

- a. Keputusan evaluasi seharusnya dibuat oleh setiap orang yang terlibat dalam perencanaan. Dalam hal ini anggota sekolah, orangtua, administrator, anggota masyarakat, dan barangkali orang-orang dari perguruan tinggi setempat dalam membentuk tim evaluasi kurikulum. Jika dalam kelompok tersebut tidak ada yang terlatih dalam hal evaluasi, maka langkah pertama adalah mengadakan pelatihan.
- b. Beberapa pertanyaan berikut perlu dijawab dalam kaitannya dengan evaluasi kurikulum: (1) Siapa yang harus dan tidak harus dilibatkan dalam perancangan kurikulum? (2) Masalah dan isu apa yang perlu dijadikan sasaran? (standar, tujuan, asumsi, organisasi kunci, ilustrasi skenario) (3) Bagaimanakah kelompok membagi tugas dengan anggota sekolah dan masyarakat dalam menganalisis rancangan, rancangan alternatif, standar kompetensi nasional dan lokal, serta kaitannya dengan pemuda sekarang dan masa depan? (4) Bagaimanakah rancangan draft dipadukan dengan anggota sekolah lain, dan dengan masyarakat? (5) Apakah asumsi, konsep, dan kesan tentang peserta didik, belajar, pengetahuan, pembelajaran, kurikulum, dan persekolahan dipertimbangkan dalam analisis rancangan dan praktik kurikulum, proposal, dan pernyataan rancangan kurikulum akhir? (6) Apakah asumsi dan prinsip yang berkaitan dengan kesimpulan dari peserta didik tertentu yang dipertimbangkan dan digunakan? (7) Dalam cara apakah peserta didik dan guru berhubungan? (8) Dalam cara dan untuk apa persamaan, keadilan, dan pelayanan terhadap seluruh peserta didik dipertimbangkan? (9) Bagaimanakah pandangan alternatif yang menyenangkan, bagaimanakah konflik dipecahkan, untuk apakah partisipan merasakan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan bijaksana? Serta (10) Kapanakah perhatian direfresentasikan?
- c. Pengumpulan data dilakukan untuk mendeskripsikan sebuah rancangan kelompok termasuk observasi dan rekaman dari setiap pertemuan. Menganalisis data mentah, termasuk mengidentifikasi isu-isu rancangan khusus mencakup hal-hal berikut: (1) Platform: standar kompetensi, tujuan, asumsi, inklusi, kenyamanan, kekuasaan, rasa percaya diri peserta didik, dan civik agensi; (2) Pengorganisasian kurikulum: jenis pegorganisasian, kapasitas untuk peserta didik, kemenarikan, kapasitas materi, dan sebagainya; (3) Isi: perspektif materi kurikulum yang dikembangkan; (4) Penjabaran organisasi terhadap kegiatan yang berlebihan;

cakupan dan urutan; (5) Bahan-bahan: peralatan seperti komputer dan program komputer, atau peralatan laboratorium untuk matematika dan sains, misalnya.

Kriteria yang digunakan untuk menafsirkan dan memutuskan data merupakan pernyataan yang mendeskripsikan tentang kualitas. Kriteria untuk menafsirkan dan memutuskan data mencakup: kejelasan bahasa dan pikiran, cakupan yang komprehensif, kelayakan, koherensi, efisiensi, kenyamanan, keaslian, keterlibatan, efektivitas, keinklusifan, dan kesamaan. Sehubungan dengan itu, pengolah data, pembuat keputusan, dan pengguna keputusan tentang evaluasi sebuah rancangan kurikulum memerlukan beberapa orang yang harus dilibatkan dalam menganalisis data.

Tujuan utama pelibatan anggota sekolah dalam perancangan kurikulum adalah untuk menciptakan kondisi umum terhadap perencanaan kurikulum. Karena perbedaan antara perancangan dengan perencanaan tidak terlalu mencolok dalam pengembangan kurikulum, banyak pertimbangan dalam perancangan kurikulum juga digunakan untuk mengevaluasi perencanaan kurikulum. Tantangannya disini adalah bahwa pemecahan masalah dan pemikiran guru sering merupakan kegiatan pribadi, padahal semua itu akan memengaruhi dalam pengembangan kurikulum; mengapa mereka menekankan pada suatu informasi atau bahan tertentu, atau bagaimana mereka memandang peserta didiknya dalam kaitannya dengan penafsiran terhadap rancangan kurikulum.

Beberapa hal yang harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menilai rancangan kurikulum adalah sebagai berikut.

- a. Pemain utama dalam evaluasi adalah guru; tetapi kepala sekolah, supervisor, dan konsultan juga memiliki kepentingan dalam proses evaluasi, karena itu mereka perlu memahami hubungan antara perancangan, perencanaan guru, dan kondisi kelas secara khusus.
- b. Pertimbangkanlah beberapa pertanyaan berikut ini; (1) Bagaimanakah guru menafsirkan tujuan, rasional, dan konsep kunci terhadap rancangan kurikulum, (2) Bagaimanakah guru menafsirkan minat dan kesiapan peserta didik dalam memahami materi dan membentuk kompetensi? (3) Apakah guru merasa nyaman dengan kompetensi dasar dan materi standar, dan strategi belajar yang digunakan?

- c. Analisis dan pengumpulan data dapat dilakukan dengan (1) melakukan analisis isi terhadap jurnal untuk mengidentifikasi ide-ide yang dipertimbangkan, dan kriteria yang digunakan, serta (2) mewawancarai guru tentang alasan mereka memilih menjadi guru, dan apa yang mereka lakukan dalam kegiatan pembelajaran.
- d. Kriteria yang digunakan untuk menilai kualitas guru dalam perencanaan kurikulum sama dengan kriteria yang disarankan dalam perancangan kurikulum.
- e. Pengolah data, pembuat keputusan, dan pengguna keputusan bertugas mengumpulkan data. Dalam melaksanakan tugasnya mereka harus melibatkan guru, karena informasi yang dihasilkan adalah untuk guru dalam menilai pembelajaran yang dilakukannya.²²

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi kurikulum melibatkan banyak komponen sumberdaya manusia dalam pelaksana kurikulum. Perencana dan pengembangan kurikulum, atau Pusat Kurikulum Nasional sebagai unit manajerial yang melakukan evaluasi kurikulum, dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi, kabupaten dan kota, serta pihak sekolah. Dengan demikian, upaya untuk memastikan keberhasilan kurikulum dalam praktik pembelajaran, berarti ada pula evaluasi proses (formatif) dan evaluasi hasil (sumatif). Karena itu, dalam proses evaluasi kurikulum dalam rangka perbaikan atau pengembangan kurikulum, maka diperlukan data atau informasi untuk pengambilan keputusan sebagaimana dimaksudkan dalam kerangka perbaikan.

²² E. Mulyasa.(2014). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h.135-141.

BAB VI

PENGEMBANGAN KURIKULUM

A. DASAR-DASAR PENGEMBANGAN

Pengembangan kurikulum sebagai bagian dari ilmu pendidikan meniscayakan adanya keinginan atau inisiatif para pengelola pendidikan untuk memastikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan tuntutan perubahan internal dan eksternal dunia pendidikan. Semua segmen *stakeholders* pendidikan (orang tua, masyarakat, dunia usaha dan industri) khususnya pengguna jasa lulusan menjadi faktor yang harus diperhatikan kebutuhannya terhadap pendidikan yang disediakan para pengelola pendidikan, sejak dari perencanaan, pelaksanaan program sampai kepada evaluasi program kurikulum.

Kegiatan pengembangan kurikulum harus dilakukan berdasarkan ilmu manajemen karena pengembangan kurikulum menuntut adanya perencanaan sampai dengan pengawasan bahkan termasuk monitoring dan evaluasi.¹

Hasil evaluasi kurikulum sejatinya memerlukan pengembangan atau bahkan perubahan kurikulum pendidikan. Itu artinya hasil evaluasi kurikulum meniscayakan upaya mengembangkan kurikulum. Menurut Sukiman, setiap pengembangan kurikulum hendaknya menggunakan landasan yang kuat sehingga akan melahirkan kurikulum yang sesuai

¹ Zainal Arifin. (2012). *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h.25.

dengan kebutuhan. Adapun yang dimaksud dengan landasan kurikulum di sini adalah bidang-bidang yang dapat dijadikan dasar pokok keputusan tentang kurikulum karena berdasarkan landasan-landasan tersebut dapat dijawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti: 1) bagaimanakah tujuan hidup manusia, 2) hal-hal apakah harus diajarkan kepada generasi muda agar dapat membimbing mereka kehidupan yang baik; 3) seberapa jauh peranan dan tanggungjawab sekolah dalam hal ini, 4) relevansi pendidikan terhadap kebutuhan dan struktur masyarakat, 5) peranan teknologi dan struktur keluarga terhadap praktik kependidikan di sekolah, 6) pemenuhan kebutuhan dasar manusia jalur pendidikan di sekolah, dan 7) relevansi struktur kurikulum dengan tahap-tahap perkembangan kedewasaan anak didik, dan masih banyak lagi pertanyaan yang relevan. Melalui kajian terhadap bidang-bidang yang menjadi landasan pengembangan kurikulum ini, hal-hal yang bersifat normatif dan ideal yang menjadi tumpuan tujuan penyelenggaraan pendidikan dapat dianalisis, dan ini sangat bermanfaat untuk mencegah agar program pendidikan yang lahir tidak mudah goyah dan berubah-ubah karena rapuhnya pondasi yang mendasarinya.²

Salah satu aspek yang berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan pendidikan nasional adalah aspek kurikulum. Di sini keberadaan kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan. Kurikulum dipahami sebagai sistem program pembelajaran yang diimplementasikan untuk mencapai tujuan pendidikan (institusional dan Kurikulum) yang memungkinkan pencapaian mutu sekolah.³

Pencapaian mutu pendidikan yang unggul menjadi sasaran program pendidikan yang mengakar pada kurikulum. Pelayanan pendidikan yang bermutu merupakan refleksi dari penerapan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai etika, nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pendidikan. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan proses pemanusiawian manusia sehingga perlu menghormati kebebasan peserta didik untuk menjadi dirinya sendiri.⁴ yang menjadi faktor penting diperhatikan dalam pengembangan kurikulum pendidikan.

² Sukiman. (2015). *Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Rosda Karya, h. 25-26

³ Rusman.(2009). *Manajemen Kurikulum*, Jakarta: Rajawali Press, h.1.

⁴ Martini Jamaris.(2013). *Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h.13.

Namun mutu pendidikan yang diharapkan harus dibarengi peningkatan yang berkelanjutan melalui pengembangan model pembelajaran sebagai implementasi dari kurikulum, sehingga umpan balik dari evaluasi terhadap pelaksanaan meniscayakan adanya pengembangan kurikulum pendidikan yang dapat dibuat perubahannya dalam rentang waktu tertentu.

Dalam perkembangannya bidang studi pengembangan kurikulum dewasa ini telah diakui sebagai ilmu terapan. Sebagai ilmu terapan, pengetahuan tentang pengembangan kurikulum harus dapat digunakan untuk menciptakan kurikulum bidang studi pada jenjang pendidikan tertentu yang efektif. Dengan demikian, pengembangan kurikulum harus berorientasi kepada kebutuhan bidang studi dan jenjang pendidikan tertentu serta disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak didik.⁵

Menurut James A. Beane, et al, ada tiga fondasi atau landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filsafat, sosiologi dan psikologi. Senada dengan ini, Nana Sudjana menyebutkan adanya tiga landasan, yaitu landasan filosofis, landasan sosial budaya, dan landasan psikologis. S. Nasution menambahkan satu lagi, yaitu landasan organisatoris, diuraikan sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dimaksudkan, pentingnya filsafat dalam mengembangkan kurikulum lembaga pendidikan. Pendidikan berintikan interaksi antara manusia, terutama antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan, dalam interaksi tersebut banyak persoalan yang bersifat mendasar, seperti apakah yang menjadi tujuan pendidikan, siapa pendidik dan peserta didik, apa isi pendidikan dan bagaimana proses interaksi pendidikan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang mendasar yang esensial, yaitu jawaban-jawaban filosofis.

2. Landasan Psikologis

Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum yang dimaksud adalah faktor-faktor psikologis yang harus dijadikan dasar pertimbangan

⁵ Tedjo Narsoyo Reksoatmodjo. (2010). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi Kejuruan*, Bandung: Refika Aditama, h.7.

dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai program pendidikan secara umum terdiri empat unsur, yaitu, tujuan, materi atau bahan pelajaran, strategi pembelajaran dan penilaian. Menurut S. Nasution, landasan psikologis ini dalam pengembangan kurikulum sangat diperlukan, terutama dalam: 1) seleksi dan organisasi bahan pelajaran, 2) menentukan kegiatan belajar yang paling serasi, dan 3) merencanakan kondisi belajar yang optimal agar tujuan belajar tercapai.

3. Landasan Sosial Budaya

Landasan sosial budaya adalah pentingnya aspek-aspek sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum. Hal ini berangkat dari satu premis bahwa pendidikan lahir dari, oleh, dan untuk masyarakat dan budaya. Di sini ada hubungan timbal balik yang harmonis antara pendidikan, masyarakat dan budaya

4. Landasan Agama

Landasan agama ini muncul terutama dari pemikir pendidikan Islam, yang umumnya mempunyai pendirian bahwa segala sistem yang ada dalam masyarakat, termasuk sistem pendidikan harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada ajaran-ajaran agama yang pokok adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan sumber lainnya adalah ijtihad. Dari sumber-sumber inilah aspek-aspek atau unsur-unsur pendidikan dikembangkan, seperti perumusan tujuan pendidikan, materi dan strategi pelaksanaannya.

5. Landasan Organisatori

Landasaan ini berkenaan dengan masalah, dalam bentuk yang bagaimana bahan pelajaran dalam kurikulum akan disusun, dikelompokkan dan disajikan?. Apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang dikerjakan misalnya dalam bentuk broad-field. Ataukah diusahakan hubungan secara lebih mendalam dengan menghapuskan segala batas-batas mata pelajaran, jadi dalam bentuk kurikulum yang terpadu. Tidak sedikit jenis organisasi kurikulum yang dikembangkan oleh para ahli

kurikulum. S. Nasution mengelompokkan organisasi kurikulum menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Kurikulum berdasarkan mata pelajaran (*subject curriculum*), yang meliputi:
 - a) Kurikulum mata pelajaran terpisah-pisah (*separate subject curriculum*)
 - b) Kurikulum mata pelajaran gabungan (*correlated curriculum*)
- 2) Kurikulum terpadu (*integrated curriculum*), yang diantara lain meliputi
 - a) Kurikulum inti (*core curriculum*)
 - b) Kurikulum pengalaman (*activity curriculum*)⁶

Bagaimanapun, Jenis organisasi yang akan digunakan biasanya dipengaruhi oleh aliran psikologi (khusus psikologi belajar) yang dianut. Bagi yang mengikuti paham psikologi sosiologi yang berpendirian bahwa keseluruhan sama jumlah bagian-bagiannya cenderung memilih kurikulum yang *subject-centered*, atau yang berpusat pada mata pelajaran, yang dengan sendirinya kan terpisah-pisah. Sebaliknya psikologi Gestalt lebih mengutamakan keseluruhan, karena keseluruhan itu bermakna dan lebih relevan dengan kebutuhan anak dan masyarakat.

Perlu dipahamami di sini bahwa tidak ada jenis organisasi kurikulum yang baik dan tidak baik. Setiap organisasi kurikulum mempunyai kebaikan atau kelebihan, tetapi tidak lepas dari kekurangan ditinjau dari segi-segi tertentu. Selain itu bermacam-macam organisasi kurikulum dapat dijalankan secara bersama di satu sekolah bahkan dapat membantu atau melengkapi yang satu dengan yang lain.

Sementara menurut Sukmadinata, dalam pengembangan kurikulum banyak pihak yang turut berpartisipasi, yaitu administrator pendidikan, ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli bidang ilmu pengetahuan, guru-guru, dan orangtua murid, serta tokoh-tokoh masyarakat. Dari pihak-pihak tersebut yang secara terus menerus terlibat dalam pengembangan kurikulum adalah administrator, guru, dan orangtua. Pertama, peranan administrator pendidikan. Para administrator pendidikan ini terdiri atas: direktur bidang pendidikan, pusat pengembangan kurikulum, kepala kantor wilayah, kepala kantor kabupaten dan kecamatan serta kepala sekolah. Peranan para administrator ditingkat pusat (direktur dan kepala

⁶ Sukiman. *op.cit*, h. 33.

pusat) dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar serta program inti kurikulum. Kerangka dasar dan program inti tersebut akan menentukan minimum *course* yang dituntut.⁷

Pemerintah pusat, atau administrator tingkat pusat bekerja sama dengan para ahli pendidikan dan ahli bidang studi di Perguruan Tinggi serta meminta persetujuannya terutama dalam menyusun kurikulum sekolah dalam memajukan peradaban bangsa. Bertolak dari kerangka dasar dan program inti tersebut para administrator daerah (kepala kantor wilayah) dan administrator lokal (kabupaten, kecamatan dan kepala sekolah) mengembangkan kurikulum sekolah bagi daerahnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Para kepala sekolah mempunyai wewenang dalam membuat operasionalisasi sistem pendidikan pada masing-masing sekolah. Para kepala sekolah ini, sesungguhnya yang secara terus menerus terlibat dalam mengembangkan kurikulum sendiri, tetapi dalam pelaksanaannya sering harus didorong dan dibantu oleh para administrator. Administrator lokal harus bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengkomunikasikan sistem pendidikan kepada masyarakat, serta mendorong pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru di kelas. Peranan kepala sekolah lebih banyak berkenaan dengan implementasi kurikulum di sekolahnya. Kepala sekolah juga mempunyai peranan kunci dalam menciptakan kondisi untuk pengembangan kurikulum di sekolahnya. Ia merupakan figur kunci di sekolah, kepemimpinan kepala sekolah sangat mempengaruhi suasana sekolah dan pengembangan kurikulum.

Kedua, peranan ahli. Pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas perubahan tuntutan kehidupan dalam masyarakat, tetapi juga perlu dilandasi perkembangan konsep-konsep dalam ilmu. Mengacu pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah, baik kebijaksanaan pembangunan secara umum maupun pembangunan pendidikan, perkembangan tuntutan masyarakat, dan masukan-masukan dari pelaksanaan pendidikan dan kurikulum yang sedang berjalan, para ahli pendidikan dan kurikulum memberikan alternatif konsep pendidikan dan model

⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, (2013). *Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h, 155.

kurikulum yang dipandang paling sesuai dengan keadaan dan tuntutan di atas. Pengembangan kurikulum bukan hanya sekedar memilih dan menyusun bahan pelajaran dan metode magajar, tetapi meyangkut penentuan arah dan orientasi pendidikan, pemilihan sistem dan model kurikulum, baik model konsep, model desain, model evaluasinya, serta berbagai perangkat dan pedoman penjabaran serta pedoman implemntasi dari model-model tersebut.

Ketiga, peranan guru, guru memegang peranan yang cukup penting baik didalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Dia adalah perencana, pelaksana dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Sekalipun ia tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum, guru merupakan penerjemah kurikulum yang datang dari atas. Dia yang mengolah, meramu kembali kurikulum dari pusat untuk disajikan dikelasnya. Karena guru juga merupakan barisan pengembang kurikulum yang terdepan maka guru pulalah yang selalu melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap kurikulum. Peranan guru bukan hanya menilai perilaku dan prestasi belajar murid-murid dalam kelas, tetapi juga menilai implementasi kurikulum dalam lingkup yang lebih luas. Hasil-hasil penilaian demikian akan sangat membantu pengembangan kurikulum, untuk memahami hambatan-hambatan dalam implementasi kurikulum dan juga dapat membantu mencari cara untuk mengoptimalkan kegiatan guru.

Guru juga bukan hanya berperan sebagai guru di dalam kelas dia juga seorang komuniktor, pendorong kegiatan belajar, pengembang alat-alat belajar, pencoba, penyusun, organisasi, manajer sistem pengajaran, pembimbing baik di sekolah maupun dimasyarakat dalam hubungannya dengan pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Guru juga berperan sebagai pelajar dalam masyarakatnya, sebab ia harus selalu belajar struktur sosial masyarakat, nilai-nilai utama masyarakat, pola-pola tingkah laku dalam masyarakat. Hal-hal di atas diperlukan untuk mempersiapkan guru dalam berbagai situasi dan kagiatan pendidikan.

Keempat, peranan orang tua murid. Orang tua yang juga mempunyai peranan dalam pengembangan kurikulum. Peranan mereka dapat berkenaan dengan dua hal: pertama dalam menyusun kurikulum dan kedua dalam pelaksanaan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum mungkin tidak semua dapat ikut serta, hanya terbatsa pada beberapa orang saja yang cukup waktu dan mempunyai latar belakang yang memadai. Peranan

orang tua lebih besar dalam pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum diperlukan kerja sama yang sangat erat antara guru atau sekolah dengan para orang tua murid. Sebagian kegiatan belajar yang dituntut kurikulum dilaksanakan di rumah, dan orang tua sewajarnya mengikuti atau mengamati kegiatan belajar anaknya di rumah. Orang tua juga secara berkala menerima laporan kemajuan anak-anaknya dari sekolah dan sebagainya. Rapor juga merupakan suatu alat komunikasi tentang program atau kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Orang tua juga dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah melalui berbagai kegiatan seperti diskusi, lokakarya, seminar, pertemuan orang tua, guru, pameran sekolah dan sebagainya.⁸

Pengembangan kurikulum berdasarkan manajemen, berarti melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum berlandaskan pola pikir manajemen, atau berdasarkan proses manajemen sesuai fungsi-fungsi manajemen.⁹ Rangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi/pengawasan. Aktivitas manajemen kurikulum/pengajaran ini adalah kolaborasi kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah bersama guru-guru melaksanakan kegiatan manajerial dalam memaksimalkan pencapaian tujuan dalam pelaksanaan pembelajaran.

Dalam konteks ini penyusunan dan pengembangan kurikulum menjadi tugas strategis bagi pengelola pendidikan, baik pihak pemerintah maupun pihak swasta atau yayasan yang mengelola pendidikan formal di sekolah, pesantren dan madrasah. Prinsip utamanya adalah bahwa perubahan kurikulum harus mengacu kepada pencapaian tujuan secara maksimal. Sebab pencapaian tujuan pembelajaran adalah berkenaan dengan pengembangan potensi anak sebagai kebutuhan dasar dalam pendidikan agar anak benar-benar dewasa sesuai dengan tuntutan kebijakan pendidikan nasional.

B. PENGERTIAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Berbicara mengenai pengembangan kurikulum, banyak pendapat

⁸ Nana Syaodih Sukmadinata.*op.cit*, h. 157-158.

⁹Oemar Hamalik. (2008). *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Remaja Rosdakarya, h.133.

para ahli ilmu pendidikan dan kurikulum. Mengacu kepada pendapat Oemar Hamalik,¹⁰ pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa.

Zaman terus berubah. Kurikulum yang diterapkan terus menghadapi berbagai peluang dan hambatan. Lingkungan pendidikan baik internal maupun eksternal mengalami perubahan. Itu artinya pengembangan kurikulum menjadi satu keniscayaan. Kurikulum selain sebagai pedoman juga sebagai alat dalam membelajarkan anak didik. Dalam hal ini, membelajarkan anak didik di dalam kelas dan di luar kelas berhadapan dengan perubahan tuntutan sehingga diperlukan pengembangan kurikulum. Proses membelajarkan anak akan menjadi kurang terarah jika kurikulum tidak memenuhi harapan dan pemenuhan tugas perkembangan anak. Apalagi perkembangan anak sangat beragam yang perlu dilayani melalui kurikulum dan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Kesempatan belajar anak harus dilayani dengan sebaik-baiknya.

Pendapat lain menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum ialah mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh yang sifatnya positif yang datangnya dari luar atau dari dalam sendiri, dengan harapan agar peserta didik dapat menghadapi masa depannya dengan baik.¹¹

Dalam kajian ini dipahami bahwa kegiatan pengembangan adalah penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum. Istilah pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru. Selama kegiatan tersebut, penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan. Bila setelah mengalami penyempurnaan-penyempurnaan akhirnya alat atau cara tersebut dipandang cukup mantap untuk digunakan seterusnya, maka berakhirlah kegiatan pengembangan tersebut.

Pengertian pengembangan sebagaimana dimaksud berlaku pula

¹⁰ Oemar Hamalik. (2008). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h.97.

¹¹ Dakir. (2010). *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara, h.91.

dalam bidang kurikulum. Kegiatan pengembangan kurikulum mencakup kegiatan penyusunan kurikulum itu sendiri, pelaksanaan di sekolah-sekolah yang disertai dengan penilaian yang intensif, dan penyempurnaan-penyempurnaan yang dilakukan terhadap komponen-komponen tertentu dari kurikulum tersebut atas dasar hasil penilaian. Bila kurikulum itu sudah dianggap cukup matang, setelah mengalami penilaian dan penyempurnaan, maka berakhirlah tugas pengembangan kurikulum tersebut untuk kemudian dilanjutkan dengan tugas pembinaan. Jadi, pengembangan kurikulum atau disebut dengan *curriculum development* pada dasarnya adalah proses yang dimulai dari kegiatan menyusun kurikulum, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan memperbaiki sehingga diperoleh suatu bentuk kurikulum yang dianggap ideal.¹²

Menurut Sukmadinata mengembangkan suatu kurikulum banyak pihak yang turut berpartisipasi, yaitu: administrator pendidikan, ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli bidang ilmu pengetahuan, guru-guru, dan orangtua murid serta tokoh-tokoh masyarakat. Dari pihak tersebut yang secara terus-menerus turut terlibat dalam pengembangan kurikulum adalah: administrator, guru, dan orangtua.¹³

Istilah pengembangan kurikulum mencakup dimensi yang luas. Itu artinya pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif yang meliputi perencanaan, penerapan, dan evaluasi karena pengembangan kurikulum menunjukkan perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan. Peningkatan kurikulum sering digunakan bersinonim dengan pengembangan kurikulum meskipun dalam beberapa kasus dipandang sebagai hasil pengembangan setelah dilakukan evaluasi kurikulum dan kemudian dilakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Adapun pengembangan kurikulum dengan pendekatan fungsi manajemen seperti pendapat Hamalik yang dikutip oleh Wahyudin menjelaskan bahwa, pengembangan kurikulum berlandaskan manajemen berarti melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum berdasarkan pola pikir manajemen atau berdasarkan proses manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri atas : 1) perencanaan kurikulum; 2) pengorganisasian; 3) implementasi kurikulum; 4) ketenagaan dalam pengembangan kurikulum;

¹² Sukiman. *op.cit*, h. 5-6.

¹³ Nana Syaodih Sukmadinata.*op.cit*. h.155.

5) kontrol kurikulum yang mencakup evaluasi kurikulum; 7) mekanisme pengembangan kurikulum secara menyeluruh. Keenam fungsi manajemen pengembangan kurikulum di atas merupakan tahap-tahap dari proses manajemen pengembangan kurikulum.¹⁴

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum adalah proses memaksimalkan pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebagaimana dalam kurikulum yang ditetapkan pemerintah setelah dilaksanakan dalam waktu tertentu. Biasanya pengembangan kurikulum ini adalah proses pembaruan kurikulum setelah dilakukan evaluasi kurikulum setelah dilaksanakan, bisa saja dilakukan atas kebijakan pemerintah dan juga dapat dilakukan oleh pihak sekolah bersama dengan guru dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan kurikulum pendidikan di sekolah dan luar sekolah terhadap perkembangan anak didik.

C. PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM

Untuk melakukan tindakan pengembangan kurikulum sebagai pekerjaan yang sistematis, maka perlu dipedoman sejumlah prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Sukiman, dalam pengembangan kurikulum terdapat sejumlah prinsip umum yang dipakai sebagai rambu-rambu atau pedoman agar kurikulum yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan keinginan yang diharapkan semua pihak yakni peserta didik sendiri, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat dan juga pemerintah. Adapun prinsip-prinsip umum tersebut dapat dikemukakan yaitu:

1. Prinsip Berorientasi pada Tujuan

Prinsip berorientasi pada tujuan dimaksudkan agar perumusan unsur-unsur kurikulum lainnya serta semua kegiatan pembelajaran didasarkan dan mengacu pada tujuan yang akan dicapai. Tujuan merupakan suatu yang sangat esensial sebab sangat besar maknanya, baik dalam rangka perencanaan maupun dalam rangka penilaian. Dalam perencanaan, tujuan memberikan petunjuk untuk memilih dan menetapkan materi/ isi pelajaran, mengalokasikan waktu, memilih strategi pembelajaran,

¹⁴ Dinn Wahyudin. (2014). *Manajemen Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 73.

memilih media, dan menyediakan ukuran (standar) untuk mengukur prestasi belajar peserta didik. Tujuan-tujuan sekaligus merupakan kriteria untuk menilai mutu dan efisiensi pengajaran.

2. Prinsip Relevansi

Dalam pengembangan kurikulum, prinsip relevansi yang dimaksud adalah, adanya hubungan, kaitan, kesesuaian, atau keserasian antar unsur-unsur kurikulum sendiri dan antara isi kurikulum dengan tuntutan dan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat

3. Prinsip Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu kegiatan berhubungan dengan sejauh mana apa yang direncanakan atau diinginkan dapat terlaksana atau tercapai. Suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha itu mampu mendekati perencanaan yang telah ditentukan. Sebaliknya usaha itu tidak efektif jika usaha itu semakin dengan apa yang direncanakan.

4. Prinsip Efisiensi

Prinsip efisiensi adalah berhubungan dengan perbandingan antara hasil yang dicapai dengan usaha yang dijalankan atau biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya jika hasil yang dicapai tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan, maka dapat dikatakan tidak efisien. Dalam pengembangan kurikulum, prinsip efisiensi harus mendapat perhatian, termasuk efisiensi segi waktu, tenaga, peralatan, dan biaya. Efisiensi waktu perlu direncanakan, kegiatan belajar mengajar peserta didik agar tidak banyak membuang waktu di lembaga pendidikan.

5. Prinsip Kontinuitas (kesinambungan)

Kesinambungan dimaksud adanya semacam hubungan yang saling menjalin antara berbagai tingkat dan jenis program pendidikan terutama mengenai tujuan dan bahan pembelajaran. Kontinuitas ini dapat dilihat dari segi

a. Kontinuitas antara Berbagai Tingkat Lembaga Pendidikan

Dalam pengembangan kurikulum, hendaknya dipertimbangan hal-hal berikut ini: pertama, kemampuan/kompetensi dan bahan-bahan pelajaran yang dibutuhkan untuk belajar pada tingkat berikutnya hendaknya sudah diajarkan pada tingkat sebelumnya. Misalnya, pada tingkat Sekolah Dasar, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi harus ada kesinambungan kurikulum secara hierarkis fungsional menurut

bidang telaaahnya masing-masing. Kedua, kemampuan kompetensi dan bahan-bahan pelajaran yang sudah diajarkan pada tingkat lembaga pendidikan yang lebih rendah tidak perlu diajarkan lagi pada lembaga pendidikan yang lebih tinggi.

b. Kontinuitas antara Berbagai Mata Pelajaran

Kompetensi dan bahan yang diajarkan dalam berbagai mata pelajaran sering mempunyai hubungan satu sama lainnya. Untuk itu, urutan dalam penyajian berbagai mata pelajaran hendaknya diupayakan agar hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik. Misalnya, untuk memahami tentang mawaris (warisan) dalam mata pelajaran agama, sebelumnya perlu memahami mata pelajaran matematika

c. Prinsip Fleksibilitas

Prinsip fleksibilitas maksudnya adalah, hendaknya kurikulum memiliki sifat lentur dalam arti ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan dalam bertindak bagi guru/pendidik dan peserta didik. Fleksibilitas bagi peserta didik diwujudkan dalam bentuk kebebasan dalam memilih program pendidikan, dan fleksibilitas bagi guru adalah dalam bentuk pengembangan program pembelajaran. Fleksibilitas dalam memilih program pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk pengadaan program-program pilihan yang dapat dibentuk jurusan/program spesialisasi ataupun program-program pendidikan keterampilan yang dapat dipilih peserta didik atas dasar kemampuan dan minatnya.

d. Prinsip Belajar Seumur Hidup

Prinsip belajar seumur hidup (*long life learning*) merupakan konsep pendidikan yang mengarah pada ide pendidikan yang memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk mempunyai kesadaran dan kemauan untuk selalu membuka diri, mengembangkan kemampuan dan kepribadian melalui kegiatan belajar. Tidak harus terikat dengan sistem pendidikan sekolah (pendidikan formal), melainkan secara belajar mandiri sepanjang hidup.

e. Prinsip Sinkronisasi

Prinsip Sinkronisasi dimaksudkan adanya sifat yang searah dan setujuan dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh kurikulum. Kegiatan-kegiatan kurikuler yang diinginkan, bukan saling meng-

hambat kegiatan kurikuler yang lain sehingga dapat mengganggu keterpaduan. Kurikulum sebagai suatu sistem komponen-komponen kurikulum harus bersifat padu dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Dengan keterpaduan semua komponen yang ada dalam sistem itu, semua kegiatan yang diarahkan oleh satu komponen dengan yang lain tidak bertentangan kurikulum yang bersifat sinkron, pada gilirannya, akan memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.¹⁵

Sementara itu, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menurut Hamalik (2002) adalah sebagai berikut:

1. Berorientasi pada tujuan, artinya pengembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, yang bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikulum mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang selanjutnya menumbuhkan perubahan tingkah laku peserta didik yang mencakup ketiga aspek tersebut dan bertalian dengan aspek-aspek yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional.
2. Relevansi (kesesuaian) artinya pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi dan sistem penyampaiannya harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Efisiensi dan efektivitas, artinya pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisiensi dalam pendayagunaan daya, waktu, tenaga dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal.
4. Fleksibilitas (keluwesan) artinya kurikulum haruslah luwes, mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat, jadi tidak statis atau kaku.
5. Berkesinambungan (kontinuitas), artinya kurikulum disusun secara berkesinambungan dimana bagian-bagian, aspek-aspek, materi dari

¹⁵ Sukiman, *op.cit*,h. 40

bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna, sesuai dengan jenjang pendidikan struktur dalam satuan pendidikan, tingkat perkembangan peserta didik.

6. Keseimbangan, artinya penyusunan kurikulum harus memerhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan sub-program, antara semua mata ajaran dan antara aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan. Keseimbangan juga perlu diadakan antara teori dan praktek, antara unsur-unsur keilmuan sains, sosial humaniora dan keilmuan perilaku. Dengan keseimbangan tersebut diharapkan terjalin perpaduan yang lengkap dan menyeluruh.
7. Keterpaduan, artinya kurikulum dirancangkan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterpaduan. Perencanaan terpadu bertitik tolak dari masalah atau topik dan konsistensi antara unsur-unsurnya. Pelaksanaan terpadu dengan melibatkan semua pihak, baik dilingkungan sekolah maupun pada tingkat inter-sektoral. Dengan keterpaduan ini diharapkan terbentuknya pribadi yang bulat dan utuh. Di samping itu juga dilaksanakan keterpaduan dalam proses pembelajaran, baik dalam interaksi antara siswa dan guru maupun antara teori dan praktik.
8. Mutu, artinya pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu dan mutu pendidikan. Pendidikan mutu berarti pelaksanaan pembelajaran yang bermutu, sedangkan mutu pendidikan berorientasi pada hasil pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan/media yang bermutu. Hasil pendidikan yang bermutu diukur berdasarkan kriteria tujuan pendidikan nasional yang diharapkan.

Prinsip-prinsip tersebut perlu dipertimbangkan oleh para perancang kurikulum, baik dalam penyusunan kurikulum maupun dalam pengembangan kurikulum meskipun sudah ada drat kurikulum yang dilaksanakan sebelumnya. Namun karena perubahan sosial terjadi, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka prinsip-prinsip kurikulum diproses selanjutnya.

D. PENDEKATAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Proses pengembangan kurikulum tidak boleh dikerjakan dengan serampangan. Karena perubahan dan pengembangan kurikulum harus terencana, terarah dan terpadu. Mengingat potensi anak yang dikembangkan melalui optimalisasi pengembangan kurikulum maka kemajuan dan peningkatan kualitas pembelajaran dipastikan dapat diraih dengan semestinya.

Menurut Wahyudin, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dengan demikian, pendekatan pengembangan kurikulum menunjuk pada titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum¹⁶. Wahyudin juga berpendapat jika dilihat dari cakupan pengembangannya ada dua pendekatan yang dapat diterapkan dalam pengembangan kurikulum. Pertama, pendekatan *top down* atau pendekatan administratif, yaitu pendekatan dengan sistem komando dari atas ke bawah; dan kedua adalah pendekatan *grass root*, atau pengembangan kurikulum yang diawali oleh inisiatif dari bawah lalu disebarluaskan pada tingkat atau skala yang lebih luas. Istilah singkatnya sering dinamakan pengembangan kurikulum dari bawah ke atas. Berikut sekilas tentang kedua pendekatan tersebut.

1. Pendekatan *Top Down*

Dikatakan pendekatan *top down* karena pengembangan kurikulum muncul atas inisiatif para pejabat pendidikan atau para kepala kantor wilayah. Selanjutnya dengan menggunakan semacam garis komando, pengembangan kurikulum diteruskan ke bawah. Biasanya pendekatan ini banyak dipakai oleh negara-negara yang memiliki sistem pendidikan sentralisasi. Dilihat dari cakupan pengembangannya, pendekatan *top down* bisa dilakukan, baik untuk menyusun kurikulum yang benar-benar baru ataupun untuk penyempurnaan kurikulum yang sudah ada. Prosedur kerja atau proses pengembangan kurikulum model ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 1). Dimulai dengan pembentukan tim pengarah oleh pejabat pendidikan. Anggota tim biasanya terdiri dari

¹⁶ Wahyudin.2014. *Op.cit*, h.47

pejabat yang ada di bawahnya, seperti para pengawas pendidikan, ahli kurikulum, ahli disiplin ilmu, dan bisa juga ditambah dengan para tokoh dari dunia kerja. Tugas tim pengarah ini adalah merumuskan konsep dasar, garis-garis kebijakan, menyiapkan rumusan falsafah dan tujuan umum pendidikan. 2). Menyusun tim atau kelompok kerja untuk menjabarkan kebijakan atau rumusan-rumusan yang telah disusun oleh tim pengarah. Anggota kelompok kerja ini adalah para ahli kurikulum, para ahli disiplin ilmu dari perguruan tinggi, ditambah dengan guru-guru senior yang sudah berpengalaman. Tugas pokok tim adalah merumuskan tujuan-tujuan yang lebih operasional, dari tujuan-tujuan umum, memilih dan menyusun *sequence* bahan pelajaran, memilih strategi pengajaran dan alat untuk petunjuk evaluasi, serta menyusun pedoman-pedoman pelaksanaan kurikulum petunjuk evaluasi. 3). Apabila kurikulum sudah selesai disusun oleh tim atau kelompok kerja, selanjutnya hasilnya diserahkan kepada tim perumus untuk dikaji dan diberi catatan-catatan atau revisi. Jika dianggap perlu, kurikulum itu diujicobakan atau dievaluasi kelayakannya oleh suatu tim yang ditunjuk para administrator. Hasil uji coba itu digunakan sebagai bahan penyempurnaan. 4). Para administrator selanjutnya memerintahkan kepada setiap sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang telah disusun itu¹⁷.

2. Pendekatan *Grass Root*

Pemegang kebijakan kemudian turun ke stafnya atau dari atas ke bawah. Jadi, dalam model *grass root*, inisiatif pengembangan kurikulum dimulai dari lapangan atau dari guru-guru sebagai implementator, kemudian menyebar pada lingkungan yang lebih luas. Oleh karena sifatnya yang demikian, pendekatan ini lebih banyak digunakan dalam penyempurnaan kurikulum. Dalam kondisi yang bagaimana kira-kira guru dapat berinisiatif memperharui/menyempurnakan kurikulum dengan pendekatan semacam ini? Minimal ada syarat sebagai kondisi yang memungkinkan, yaitu: 1). Manakala kurikulum itu benar-benar bersifat lentur sehingga memberikan kesempatan kepada setiap guru secara lebih terbuka untuk memperbaharui atau menyempurnakan kurikulum yang sedang diberlakukan. Kurikulum

¹⁷ *Ibid*,h. 48

yang bersifat kaku, yang hanya mengandung petunjuk dan persyaratan teknis sangat sulit dilakukan pengembangannya dengan pendekatan ini. 2). Hanya mungkin terjadi manakala guru memiliki sikap profesional yang tinggi disertai kemampuannya yang memadai. Sikap profesional itu biasanya ditandai dengan keinginan untuk mencoba dan mencoba sesuatu yang baru dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Menurut Wahyudin, ada beberapa langkah penyempurnaan kurikulum yang dapat dilakukan manakala menggunakan pendekatan *grass roots* ini.

- (1) Menyadari adanya masalah. Pendekatan *grass roots* biasanya diawali dari keresahan guru tentang kurikulum yang berlaku. Misalnya dirasakan ketidakcocokan penggunaan strategi pembelajaran, atau masalah kurangnya motivasi belajar siswa sehingga kita merasa terganggu. Pemahaman dan kesadaran guru akan adanya suatu masalah merupakan kunci dalam *grass roots*. Tanpa adanya kesadaran masalah, tidak mungkin *grass roots* dapat berlangsung;
- (2) Mengadakan refleksi. Kalau kita merasakan adanya masalah maka selanjutnya kita berusaha mencari penyebab munculnya masalah tersebut. Refleksi dikaji dengan mengkaji literatur yang relevan dengan masalah yang kita hadapi atau mengkaji sumber informasi lain misalnya melacak sumber-sumber internet atau melakukan diskusi dengan teman sejawat dan mengkaji sumber dari lapangan, misalnya melakukan wawancara dengan siswa, orang tua, atau sumber lain;
- (3) Mengajukan hipotesis atau jawaban sementara. Berdasarkan hasil kajian refleksi, selanjutnya guru memetakan berbagai kemungkinan munculnya masalah dan cara penanggulangannya;
- (4) Menentukan hipotesis yang sangat mungkin dekat dan dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan;
- (5) Mengimplementasikan perencanaan dan mengevaluasi secara terus menerus sehingga terpecah masalah yang hadapi;
- (6) Membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pengembangan melalui *grass roots*. Langkah ini sangat penting dilakukan sebagai bahan publikasi sehingga memungkinkan dapat dimanfaatkan dan

diterapkan oleh orang lain yang pada gilirannya hasil pengembangan dapat tersebar.¹⁸

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan-pendekatan kurikulum adalah faktor yang digunakan dalam memahami hakikat kurikulum yang dilaksanakan sehingga dalam praktiknya, kurikulum benar-benar terealisasi menjadi pembelajaran aktif yang diharapkan. Dengan demikian, pelaksanaan kurikulum menghasilkan pembelajaran dan keluaran/prestasi belajar siswa yang nantinya akan dievaluasi secara menyeluruh sehingga menghasilkan pembelajaran baru yang lebih bermakna.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar

Tabel 7
Perubahan Paradigma Kurikulum

| Aspek | Kurikulum lama | Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Siswa | Pasif | Aktif-kreatif-produktif |
| Kurikulum | <i>Subject Based</i> | <i>Competency Based</i> |
| Guru | Instruktif | Fasilitatif |
| Sarana Prasarana | <i>Weaknessess</i> | <i>Adequate</i> |
| Pembelajaran | <i>Pasif Learning</i> | <i>Aktif Learning</i> |
| Evaluasi | <i>Subject Oriented</i> | <i>Competency</i> |
| Manajemen | <i>Sentralistik</i> | Desentralistik (MBS) |
| Supervisi dan pengawasan | Model tagihan | Model bimbingan dan pemberdayaan |
| Lingkungan dan Masyarakat | Cenderung pasif | Kondusif (peduli) |

Isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

¹⁸ Wahyudin. (2014). *Menejemen Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, h.49

1. Berpusat pada potensi, perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungan.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.

2. Beragam dan terpadu.

Kurikulum dikembangkan dengan mementingkan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal dan pengembangan diri secara terpadu serta disusun dalam berkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.

3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni.

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan.

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

5. Menyeluruh dan berkesinambungan.

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan

6. Belajar sepanjang hayat.

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum dikembangkan dengan memerhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto *Bhinneka Tunggal Ika* dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perubahan atau pengembangan kurikulum bukanlah pekerjaan yang mudah atau sederhana. Menurut Sudjana (2002), ada sepuluh langkah yang harus ditempuh dalam melakukan pembaharuan kurikulum, yakni:

1. Mengetahui atau mengidentifikasi kebutuhan perubahan kurikulum, artinya menilai ada tidaknya masalah-masalah pokok yang harus dilakukan perubahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian dan pengukuran pedahuluan terhadap kurikulum yang sedang berjalan.
2. Mobilisasi suatu perubahan kurikulum, artinya setelah ditemukan masalah pokok yang menjadi garapan perubahan kurikulum, barulah dipikirkan wadah yang akan mengorganisasi perubahan tersebut. Wadah tersebut bisa berupa badan atau komite yang bisa bekerja secara rutin.
3. Studi tentang masalah dan kebutuhan masyarakat, artinya dalam mengembangkan suatu kurikulum dilakukan analisis terhadap sektor-sektor masyarakat, baik masalahnya maupun kebutuhannya. Beberapa aspek yang perlu dianalisis dan diteliti untuk keperluan pembaharuan kurikulum antara lain: potensi sosial ekonomi, sistem nilai-nilai (sosial dan moral) yang berlaku, masalah dan kebutuhan masyarakat, lapangan pekerjaan (*job analysis*), masalah-masalah sosial, seperti ketegangan/konflik sosial, dan pengangguran.

4. Studi tentang karakteristik dan kebutuhan peserta didik, artinya dalam mengembangkan kurikulum harus memperhatikan perkembangan, pertumbuhan, bakat, minat, kesanggupan, dan kebutuhan peserta didik.
5. Formulasi tujuan pendidikan, artinya dalam mengembangkan kurikulum harus menjabarkan tujuan pendidikan secara umum yang bersifat filosofis, sosiologis, dan psikologis kedalam tujuan-tujuan institusional yang bersifat tingkah laku operasional sehingga mudah dipahami oleh para guru di lapangan.
6. Menetapkan aktivitas belajar dan mata pelajaran, artinya (sebagai isi kurikulum) yang memadai dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan tersebut. Pemilihan aktivitas belajar dan pemilihan mata-mata pelajaran yang serasi dengan tujuan, merupakan tugas berat dan memerlukan penghayatan yang tinggi terhadap nilai-nilai ilmu pengetahuan beberapa kriteria dalam memilih aktivitas belajar dan jenis mata pelajaran adalah: (1) mata pelajaran harus berorientasi dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan; (2) pengalaman belajar hendaknya sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik; (3) pengalaman belajar hendaknya mencakup berbagai aspek kegiatan belajar; (4) memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktikkan hal-hal yang telah dipelajarinya; (5) mata pelajaran yang dipilih harus berorientasi akademis, praktis, dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik; (6) mata pelajaran yang dipelajari berguna dan berhubungan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat ; (7) mata pelajaran dan aktivitas belajar mendorong minat dan pembentukan sikap peserta didik.
7. Mengorganisasi pengalaman belajar dan perencanaan unit-unit pelajaran, artinya pengembangan kurikulum harus memperhatikan pengorganisasian pengalaman belajar dan perencanaan unit-unit pelajaran secara tepat.
8. Pengujian kurikulum yang diperbaharui, artinya kurikulum yang telah diperbaharui sebelum dilaksanakan di lapangan harus diuji cobakan (*Tryout*) terlebih dahulu agar mempercepat hasil yang optimal. Hasil uji coba dianalisis, diamati untuk diadakan revisi seperlunya.
9. Pelaksanaan kurikulum baru, artinya kurikulum baru yang telah disusun, direvisi dan telah diujicobakan, hendaknya diterapkan dengan mengerahkan

seluruh opini masyarakat agar menerima ide-ide pembaharuan dalam kurikulum tersebut.

10. Evaluasi dan revisi berikutnya, artinya kurikulum baru yang sudah diberlakukan dievaluasi dan dimonitoring untuk melihat kualitas dan efektivitas kurikulum tersebut untuk selanjutnya dilakukan revisi kalau diperlukan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembaharuan kurikulum adalah suatu keniscayaan dan keharusan dalam rangka menuju mutu pendidikan yang berkualitas dan mampu merespon tuntutan terhadap kehidupan berdemokrasi, globalisasi dan otonomi daerah (SLTP 2001). Pemerintah melalui departemen pendidikan nasional kini melakukan pembaharuan kurikulum dengan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) merupakan hasil revisi dari kurikulum berbasis kompetensi untuk menggantikan kurikulum sebelumnya yang cenderung *content based*. Kurikulum baru tersebut menekankan aspek kompetensi yang diharapkan akan menghasilkan lulusan yang lebih baik dan siap menghadapi kehidupan di masyarakat. KTSP ingin memusatkan diri pada pengembangan seluruh kompetensi peserta didik. Peserta didik dibantu agar kompetensinya muncul dan berkembang secara maksimal. Melalui proses belajar mengajar yang menekankan kompetensi dengan pendekatan *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dan *lifeskil* diharapkan peserta didik akan menjadi pribadi yang unggul secara akademis maupun non akademis.

Ada beberapa alasan mengapa KTSP menjadi pilihan dalam upaya perbaikan kondisi pendidikan tanah air, antara lain: (1) potensi siswa sudah berbeda-beda dan potensi tersebut akan berkembang jika stimulusnya tepat; (2) mutu hasil pendidikan yang masih rendah serta mengabaikan aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, seni dan olahraga serta *lifeskil*; (3) persaingan global sehingga menyebabkan siswa/anak yang mampu akan berhasil/eksis dan yang kurang mampu akan gagal; (4) persaingan kemampuan SDM produk lembaga pendidikan; serta (5) persaingan terjadi pada lembaga pendidikan sehingga perlu rumusan yang jelas mengenai tandar kompetensi lulusan, yang selanjutnya standar kompetensi mata pelajaran perlu dijabarkan menjadi sejumlah kompetensi dasar.

Selama ini hasil pendidikan hanya tampak dari kemampuan peserta didik menghafal sejumlah fakta-fakta tanpa mengerti bagaimana hubungan

antara fakta yang ada dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan yang disinyalir pemerintah.

“Sebagian besar dari siswa tidak mampu menghubungkan antara yang mereka pelajari dan bagaimana pengetahuan tersebut akan dipergunakan atau dimanfaatkan. Siswa memiliki kesulitan untuk memahami konsep akademik sebagaimana mereka biasa diajarkan, yaitu menggunakan sesuatu yang abstrak dan metode ceramah. Mereka sangat butuh untuk memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan tempat kerja dan masyarakat pada umumnya di mana mereka akan hidup dan bekerja” (Depdiknas 2002).

Dalam melakukan pengembangan kurikulum, sulit bagi kita untuk melepaskan diri dari konsep model pengembangan kurikulum yang merupakan bagian integral dalam studi pengembangan kurikulum, bahkan sering dianggap sebagai bagian yang lebih penting dibandingkan dengan dimensi lain, karena produk akhir dari proses pengembangan kurikulum adalah suatu kurikulum yang siap pakai. Suatu model berkenaan dengan penyajian suatu objek tertentu, baik secara fisik maupun konseptual sehingga mudah dipahami oleh pengamat. Menurut Fred Percipal dalam Hamalik (2000: 2), “*Model aphysical or conceptual representation of an object or system, incorporating certain specific features of the original*”. Rumusan ini menunjukkan bahwa suatu model adalah suatu penyajian konseptual dari suatu objek atau sistem yang mengombinasikan atau menyatukan bagian-bagian khusus tertentu dari objek yang aslinya. Jadi suatu model bukan yang aslinya, melainkan semacam rancangan sebagai reproduksi dari bentuk yang asli.

Secara umum, ada dua pendekatan yang dapat diterapkan dalam pengembangan kurikulum. Pertama pendekatan *top down*, yaitu pendekatan dengan sistem komando dari atas ke bawah dan pendekatan kedua dari model *grassroots*, di mana pengembangan kurikulum diawali oleh inisiatif dari bawah lalu disebarluaskan pada tingkat atau skala yang lebih luas.

Model pengembangan kurikulum pendekatan *grassroot*/induktif dikembangkan dari guru sebagai pengembang kurikulum melalui lima tahap sampai pada penetapan kerangka kerja sebelum kemudian diimplementasikan di sekolah sebagai lembaga pendidikan.

Pengembangan kurikulum menurut cara yang tradisional, dilakukan

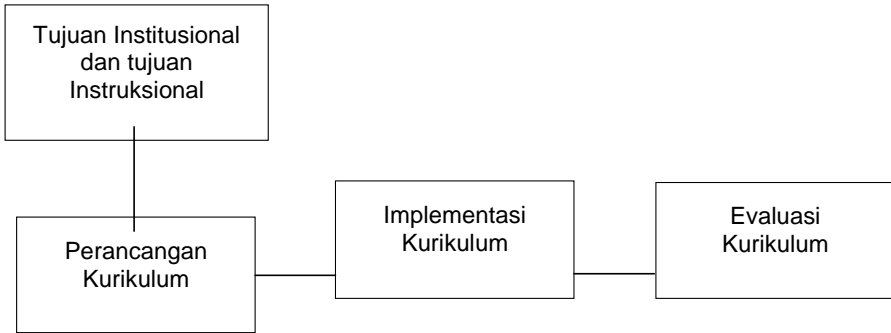
secara deduktif, dengan urutan: 1) Penentuan prinsip-prinsip dan kebijaksanaan dasar; 2) Merumuskan desain kurikulum yang bersifat menyeluruh didasarkan atas komitmen-komitmen tertentu; 3) Menyusun unit-unit kurikulum sejalandengan desain yang menyeluruh; dan 4) Melaksanakan kurikulum di kelas.

Sejatinya kurikulum merupakan sebuah perencanaan untuk menyediakan seperangkat kesempatan belajar bagi individu supaya menjadi terdidik. Perencanaan kurikulum merupakan beberapa rencana unit-unit kecil pada bagian-bagian tertentu dari sebuah kurikulum. Langkah-langkah pengembangan kurikulum model Saylor dkk adalah sebagai berikut.

1. Perumusan goals dan *objective*. Saylor, dkk. mengklasifikasikan tujuan menjadi empat domain, yaitu pengembangan pribadi, kompetensi sosial, keterampilan belajar yang berkesinambungan, dan spesialisasi.
2. Merancang kurikulum, yaitu tahapan dalam menentukan kesempatan belajar untuk setiap domain, bagaimana dan kapan kesempatan belajar itu diberikan.
3. Implementasi kurikulum, yaitu tahapan untuk menentukan metode dan strategi yang akan digunakan untuk menjalin hubungan dan berinteraksi dengan para siswa.
4. Evaluasi kurikulum, meliputi: 1) evaluasi program pendidikan sekolah secara keseluruhan, meliputi tujuan institusional, subtujuan institusional, tujuan instruksional, efektivitas instruksional, dan prestasi siswa dalam beberapa bagian program sekolah; 2) evaluasi program untuk menentukan apakah tujuan institusional dan tujuan instruksional sudah tercapai atau belum?

Bagan 1

Konsep proses pengembangan kurikulum model Saylor, Alexander, dan Lewis



BAB VII

KEBIJAKAN KURIKULUM 2013

A. PENGERTIAN KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur pengaturan dan/atau paksaan sehingga dalam pelaksanaannya, kebijakan yang diterapkan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan memerlukan kekuasaan (*power*) dan wewenang (*authority*) untuk membina kerjasama dan meredam serta menyelesaikan berbagai kemungkinan konflik sebagai akibat dari pencapaian kehendak.¹

Kebijakan dalam perspektif administrasi, kebijakan diartikan sebagai tindakan politik untuk memengaruhi perilaku orang lain.² Dalam pengertian operatifnya, kebijakan dapat diartikan bahwa:

1. Suatu penggarisan ketentuan-ketentuan,
2. Yang bersifat sebagai pedoman, pegangan atau bimbingan untuk mencapai kesepahaman dalam maksud, cara dan atau sarana,
3. Bagi setiap usaha dan kegiatan sekelompok manusia yang berorganisasi
4. Sehingga terjadi dinamisasi gerak tindak yang terpadu, sehaluan dan seirama mencapai tujuan bersama tertentu.³

¹Rahayu Kusuma Dewi, *Studi Analisis Kebijakan*, Bandung: Pustaka Setia, 2016, h. 16.

²Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori dan Model*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, h. 34.

³Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali, 2010, h. 37.

Kebijakan merupakan segala perbuatan yang dikehendaki pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang dirumuskan dalam suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui program-program pemerintah.⁴

Selanjutnya dapat dikemukakan bahwa kebijakan adalah proses politik sebagai kebutuhan, sasaran, dan maksud yang diterjemahkan ke dalam satu perangkat sasaran, hukum, kebijakan, dan program yang mempengaruhi alokasi sumberdaya, tindakan, dan keluaran yang menjadi dasar evaluasi, perbaikan, dan kebijakan baru.⁵

Secara konseptual, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, terminologi kebijakan dapat saja disebut sebagai serangkaian tindakan sebagai suatu arahan untuk mencapai tujuan. Hal yang berkaitan dengan kebijakan dalam sebuah organisasi merupakan komponen-komponen masukan yang perlu dimanfaatkan dalam usaha memperoleh setiap produk atau keluaran. Proses untuk mencapai produk atau keluaran tersebut senantiasa dilakukan melalui apa yang disebut kebijakan. Berdasarkan unsur-unsur tersebut maka setiap kebijakan akan selalu mengandung sesuatu yang oleh orang banyak diberikan makna yang prinsipil dan tidak merugikan orang banyak, karena setiap kebijakan selalu didasarkan atas peraturan perundang-undangan.

Kedua; dalam konteks tata negara dikemukakan bahwa:

1. Kebijakan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan;
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;
3. Kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah;
4. Kebijakan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;

⁴Yoyon, *Op.cit*, h. 34.

⁵Bruce S. Cooper, Lance D. Fusarelli, E. Vance Randall, *Better Policies, Better Schools: Theories and Applications*, USA: Pearson Education, Inc, 2004, h. 3.

5. Kebijakan pemerintah setidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (otoritatif).⁶

Pendapat lain menjelaskan bahwa konsep kebijakan negara, yaitu:

1. Kebijakan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak atau kebetulan. Kebijakan negara dalam sistem politik modern pada umumnya bukan merupakan tindakan yang serba kebetulan tetapi merupakan tindakan yang direncanakan lebih dahulu;
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri;
3. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dan bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan, ekonomi, perumahan rakyat, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya;
4. Kebijakan negara mungkin berbentuk positif mungkin juga negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan negara mungkin akan mencakup beberapa berbentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk memengaruhi masalah tertentu. Sedangkan dalam bentuk negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana sangat diperlukannya campur tangan pemerintah.⁷

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan keharusan dalam eksistensi suatu organisasi. Itu artinya, kebijakan merupakan produk organisasi dalam rangka merespon kebutuhan internal dan eksternal organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang dihadapi sehingga visi, misi dan tujuan organisasi dapat dicapai dengan

⁶Yoyon, *op.cit*,h.35.

⁷Hasbullah, *Op.cit*, h.40.

sebaik-baiknya. Dengan begitu, berbagai undang-undang, peraturan, keputusan, dan panduan organisasi dihasilkan sebagai kebijakan organisasi.

B. KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Kebijakan publik dalam pendidikan dibuat agar menjamin pendidikan menjadi kepentingan publik. Pada awalnya persekolahan, pendidikan merupakan urusan swasta yang disediakan oleh sebagian kecil masyarakat. Namun sekolah diciptakan pemerintah untuk seluruh warga. Selanjutnya kebijakan dalam pendidikan ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur pengelolaan sekolah pemerintah yang diatur tidak hanya kurikulum, pedagogi, dan penilaiannya, tetapi juga kondisi guru, dan pemeliharaan sarana fisik sekolah. Fungsi kebijakan dalam pendidikan adalah: 1) menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintah perlu ada dalam pendidikan, dan 2) melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru.⁸

Menurut Rahayu Kusuma Dewi, kebijakan adalah ketetapan yang memuat berbagai prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.⁹

Kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya.¹⁰

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dalam bidang pendidikan diwujudkan sebagaimana dituangkan dalam undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan presiden, peraturan dan atau keputusan Direktorat Jenderal pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi.

Sebagai perwujudan dari reformasi di Indonesia adalah desentralisasi termasuk otonomi dalam bidang pendidikan dengan mengeluarkan undang-undang tentang otonomi daerah.

Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan desentralisasi pendidikan adalah sebagai berikut:

⁸Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, h.132-133.

⁹Rahayu Kusuma Dewi, *op.cit.*, h.16.

¹⁰Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Suara Bebas, 2006, h.23.

- a. Kemungkinan daerah akan memanfaatkan kondisi yang ada untuk mendapatkan atau memperoleh pendapatan daerah. Tentu saja, hal ini sangat riskan dilakukan karena berhubungan langsung dengan masyarakat atau rakyat kecil akar rumput” (*grass roots*) yang semestinya mendapatkan pendidikan gratis dari pemerintah.
- b. Desentralisasi pendidikan ini memberi peluang kekuasaan yang cukup kuat dan besar bagi para kepala dinas pendidikan. Hal ini membuka peluang bagi terciptanya raja-raja kecil di daerah, khususnya ketika kontrol pemerintah provinsi dan pusat tidak lagi berperan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, para kepala dinas pendidikan pemerintah kota atau kabupaten tersebutlah yang secara individual memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan *decision making*.
- c. Kebijakan ini juga ada kemungkinan akan menimbulkan jurang yang semakin lebar Antara si kaya dan si miskin. Hal ini bisa terjadi karena daerah-daerah dengan PAD besar akan memberikan porsi dana pendapatannya itu untuk kesejahteraan guru-gurunya. Sementara daerah lainnya tidak mungkin melaksanakannya. Hal itu sampai terjadi karena mereka tidak memiliki dana yang cukup besar untuk menambah insentif bagi para guru-guru mereka.
- d. Desentralisasi pendidikan ini juga bisa berdampak negatif terhadap pemerataan pendistribusian tenaga guru. Dengan kata lain, daerah-daerah kaya akan menyedot tenaga guru yang berkualitas, sekaligus secara kuantitas guru-guru itu akan berkumpul di daerah yang kaya tersebut. Bagaimana halnya dengan daerah-daerah yang PAD-nya sangat kecil? Mereka akan ditinggalkan oleh guru-guru mereka. Akhirnya tempat-tempat tertentu di Indonesia ini akan kelebihan tenaga guru, sementara daerah lainnya akan mengalami kekurangan tenaga guru.
- e. Ada juga yang mengatakan bahwa desentralisasi ini hanya akan memindahkan praktik-praktik kotor korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dari pusat ke daerah. Praktik KKN dibidang pendidikan yang selama ini banyak dilakukan oleh para penguasa orde baru, ada kemungkinan akan bergerak secara perlahan, tetapi pastimenuju daerah-daerah yang ‘basah’ dan kaya. Bila daerah-daerah tersebut membuka peluang untuk mereka menjalankan misi dan visi malingnya, tidak

akan mustahil KKN akan menjadi semakin “sukses” berkembang di daerah tersebut.

- f. Selain penjelasan diatas, kita dapat juga memprediksi tentang kemungkinan beragamnya hasil belajar siswa. Hal ini disebabkan pembuatan silabus materi pembelajaran dibuat berdasarkan kebutuhan siswa, keadaan sekolah dan kondisi daerah. Perbedaan-perbedaan tersebut memberi kemungkinan terjadinya keberagaman hasil belajar siswa. Kalau kondisi sudah menjadi begini rupa, akan sulit bagi kita untuk mendapatkan angka-angka yang dapat berbicara dalam skala nasional. Pada akhirnya, kondisi ini akan mengarah pada titik meratanya mutu/kualitas hasil belajar/tamatan siswa kita.¹¹

Sebagai kebijakan publik, maka desentralisasi melalui analisis SWOT, maka ada beberapa dimensi analisis, yaitu:

1. Kekuatan Kebijakan Desentralisasi

Kekuatan kebijakan desentralisasi pendidikan adalah:

- a. Sudah merupakan kebijakan yang populis;
- b. Mendapat dukungan yang kuat dari berbagai pihak, khususnya dari wakil rakyat yang menduduki kursi DPR-RI;
- c. Sebagai hal yang telah lama ditunggu tunggu menyusul adanya perubahan social politik;
- d. Kesiapan anggaran yang cukup dengan ditetapkannya anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN tahun 2003;
- e. Efisiensi perjalanan anggaran sebagai wujud pemangkasan birokrasi.

Ketentuan di atas merupakan kebijakan yang populis, desentralisasi pendidikan pasti didukung oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan di daerah. Kekuatan lain yang juga amat mendukung bagi lahirnya kebijakan ini adalah dukungan dari pihak legislatif. Kekuatan lainnya adalah kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk menghadapi perubahan. Termasuk dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat menyikapi

¹¹ Sam M. Chan dan Tuti T. Sam, *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, h.10-11.

desentralisasi pendidikan. Anggota masyarakat amat dituntut partisipasinya dalam menjalani perubahan tersebut.

Kekuatan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dana anggaran pendidikan yang cukup tinggi dibandingkan anggaran sebelumnya yaitu kurang dari 4%. Kita berharap anggaran pendidikan yang disepakati 20% dari APBN dijadikan prioritas utama sebelum penganggaran bidang lainnya.

2. Kelemahan Kebijakan Desentralisasi

Adapun kelemahannya yang mungkin timbul dalam implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan melalui UU Otonomi Daerah adalah:

- a. Kurang siapnya SDM daerah terpencil;
- b. Tidak meratanya pendapatan asli daerah (PAD), khususnya daerah-daerah miskin;
- c. Mental korup yang telah membudaya dan mendarah daging;
- d. Menimbulkan raja-raja kecil di daerah surplus;
- e. Dijadikan komoditas;
- f. Belum jelasnya pos-pos pendidikan, sehingga akan cukup merepotkan Depdiknas dalam mengalokasikannya. Walhasil akan menguntungkan departemen-departemen lain yang mengelola pendidikan atau pelatihan, padahal departemen lain telah memperoleh dana dari APBN. Sementara itu, hasilnya masih diragukan karena ditangani bukan oleh para ahli/professional pendidikan.

Kelemahan-kelemahan di atas tentu harus dicarikan jalan keluarnya agar dapat diminimalisasi keberadaannya.

3. Peluang Implementasi Kebijakan

Setelah melihat kekuatan sekaligus kelemahan dari kebijakan desentralisasi pendidikan, harus dicarikan celah peluang keberhasilan dalam pelaksanaannya. Mengingat kebijakan ini lahir dari arus paling bawah (*grass roots*), walaupun baru terlaksana sekarang di era reformasi, kebijakan ini memiliki peluang yang cukup signifikan dalam hal keberhasilan pelaksanaannya karena telah menjadi fokus perhatian dari berbagai

pihak. Oleh karena itu, dukungan dan kontrol dari masyarakat dapat terus berjalan selama kebijakan ini digunakan.

4. Tantangan Implementasi

Adapun tantangan yang harus diperhitungkan dalam pengimplementasian kebijakan ini adalah munculnya individu-individu/ lembaga-lembaga serakah yang mencari kesempatan dalam kesempitana. Sekali lagi bagaimanapun harus diwaspadai mental-mental korup haus uang.

Tangan-tangan lainnya adalah memberi pengertian kepada lembaga di luar Depdiknas yang selama ini memperoleh *budget* dari Depdiknas untuk kepentingan kegiatan pelatihan/pendidikan. Hal ini harus dipertegas sehingga tidak terjadi dualisme dalam anggaran pendidikan yang pada akhirnya merugikan Depdiknas. Tentu ini akan mengurangi jatah bagi biaya pendidikan yang akan merugikan sekaligus mempengaruhi proses pembangunan masyarakat madani.

Dalam praktiknya, maka implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan melalui undang-undang otonomi daerah, pada kenyataannya menunjukkan bahwa terdapat proses implementasi kebijakan yang tidak melibatkan seluruh *stakeholders*, khususnya daerah-daerah yang secara finansial belum memiliki kemampuan untuk turut mengimplementasi kebijakan tersebut. Sesungguhnya masih ada daerah-daerah tertinggal di kabupaten-kabupaten yang harusnya menjadi bagian integral dalam proses pengimplementasian kebijakan. Namun ada kecenderungan yang kuat menciptakan pemekaran kabupaten baru, padahal dari segi kemampuan keuangan daerah sejatinya masih memerlukan dukungan pemerintah pusat, sehingga sangat dipaksakan untuk menjadi kabupaten baru sebagai upaya percepatan pembangunan, termasuk dalam bidang pendidikan.

C. STRATIFIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Dalam praktiknya, kebijakan dibuat oleh top manager atau top leader sehingga memiliki level dalam kebijakannya. Menurut M. Hasbullah,¹² kebijakan pendidikan merupakan produk sistem dan politik pendidikan,

¹²*Ibid*, h.47.

oleh karenanya stratifikasi kebijakan pendidikan pada dasarnya sangat luas dan beragam, dari yang bersifat makro seperti UUD 1945 (Konstitusi negara). Keputusan atau Peraturan presiden, Peraturan menteri Pendidikan, hingga yang bersifat mikro seperti Peraturan Desa, peraturan sekolah dan lain-lain.

Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah, kebijakan dan kewenangan pengelolaan pemerintahan daerah yang ada bersifat sentralistik, dalam artian kewenangannya ditentukan oleh pemerintah pusat, dan ada kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam pengelolaannya atau desentralisasi, termasuk dalam hal ini kebijakan di bidang pendidikan.

Stratifikasi kebijakan pendidikan juga dapat dilihat dari daya ikat terhadap wilayah pemberlakuan. Dalam konteks ini, ada kebijakan pendidikan yang bersifat nasional dan ada yang bersifat daerah, artinya ada kebijakan pendidikan yang hanya berlaku di suatu provinsi, atau berlaku di suatu kabupaten/kota tertentu saja. Sedangkan bila dilihat dari sisicakupannya, ada kebijakan pendidikan yang bersifat makro, ada juga kebijakan pendidikan yang bersifat makro.

Secara ringkas, stratifikasi kebijakan pendidikan meliputi:

1. Kebijakan pendidikan di tingkat pusat, yaitu kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah di tingkat pusat dan mempunyai ruang lingkup nasional. Karena ruang cakupannya secara nasional, maka kebijakan ini akan berlaku di semua wilayah NKRI. Contoh kebijakan ini seperti pelaksanaan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN), dan Ujian Nasional (UN).
2. Kebijakan pendidikan di tingkat daerah, yaitu kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dan mempunyai ruang lingkup daerah. Karena ruang cakupannya berada di tingkat daerah, maka hanya berlaku pada daerah yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Wujud kebijakan pendidikan di daerah ada dua macam; yaitu pertama, Peraturan Daerah (PERDA) tentang pendidikan yang perumusannya berada di tangan eksekutif (Bupati/Walikota) dan legislatif (DPRD), kedua; keputusan/peraturan bupati/walikota tentang pendidikan. Contoh; kebijakan pendidikan yang bersifat desentralisasi misalnya penerimaan siswa baru (PSB) mulai dari SD, hingga SMP/

MA/SMK, keputusan Bupati/walikota tentang hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan di daerahnya, dan lain-lain.

Secara umum ada empat tingkat kebijakan pemerintah, yaitu:

1. Tingkat kebijakan nasional (*national policy level*), biasanya sebagai penentu kebijakan pada level ini adalah MPR/DPR/DPD, berlaku secara nasional disebut juga sebagai kebijakan administratif. Salah satu produk MPR (bersama DPR dan DPD) adalah konstitusi UUD 1945 berikut amandemennya yang berisi pasal-pasal tentang pendidikan nasional, dan selalu menjadi konsideran bagi perumusan kebijakan pendidikan di bawahnya.
2. Tingkat kebijakan umum; tingkat kebijakan ini pada biasanya sangat ditentukan oleh pemerintah atau eksekutif, karenanya sering disebut sebagai kebijakan eksekutif. Sifat kebijakan pendidikan yang bersifat umum (*general policy level*), merupakan kebijakan pendidikan eksekutif. Oleh karena yang menentukan adalah mereka yang berada pada posisi eksekutif. Termasuk ke dalam kebijakan pendidikan eksekutif ini adalah:
 - a. Undang-undang
Kekuasaan membuat undang-undang berada di tangan Presiden meskipun harus dengan persetujuan DPR. Produk kebijakan pendidikan dalam bentuk UU antara lain: UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - b. Peraturan Pemerintah
Peraturan pemerintah merupakan kebijakan pendidikan yang dibuat dalam rangka mengoperasikan undang-undang, kekuasaan pembuatannya ada pada kepala pemerintahan, yaitu Presiden. Produk kebijakan pendidikan dalam bentuk PP antara lain: PP No. 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, PP No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, dan lain-lain.
 - c. Keputusan, Peraturan dan Instruksi Presiden
Berisikan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan yang kekuasaannya ada di tangan

Presiden. Contoh kebijakan pendidikan dalam kategori ini antara lain Kepres RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.

3. Tingkat kebijakan khusus (*special policy level*); sebagai penentu tingkat kebijakan ini adalah para Menteri sebagai pembantu Presiden, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bentuk kebijakannya seperti Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan Surat Edaran Menteri. Contoh kebijakan pendidikan yang bersifat khusus pada level kementerian antara lain:
 - a. Keputusan Mendiknas RI No. 056/P/2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru;
 - b. Permendiknas RI No. 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi bagi Guru;
 - c. Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BLN No. 03/V/PB/2010; Nomor 14 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 - d. Permendikbud RI No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013;
4. Tingkat kebijakan teknis (*technical policy level*); lazim disebut kebijakan operatif, karena kebijakan ini merupakan pedoman pelaksanaan. Penentu kebijakan ini berada pada Pejabat Eselon 2 ke bawah, seperti Direktorat Jenderal atau pimpinan lembaga non-departemen. Produk kebijakannya dapat berupa peraturan, keputusan dan instruksi pimpinan lembaga. Berdasarkan *technical policy level* inilah para gubernur, bupati, kepala dinas dan sebagainya, melaksanakan kebijakan sesuai dengan faktor kondisional dan situasional daerahnya.

D. KEBIJAKAN KURIKULUM 2013

1. Pengertian Kurikulum 2013

Pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan keputusan tentang kurikulum baru yaitu kurikulum 2013. Secara sederhana kurikulum 2013 merupakan kelanjutan dari kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Selain itu penataan kurikulum

2013 dilakukan sebagai amanah dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan peraturan presiden nomor 5 Tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional.¹³

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang terintegrasi dalam suatu model kurikulum yang dapat mengintegrasikan *skill, themes, concept, and topics* baik dalam bentuk *within singel disciplines, across several disciplines, and within and across learns*.¹⁴ Dengan kata lain bahwa kurikulum terpadu sebagai sebuah sistem dan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu atau mata pelajaran/bidang studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas terhadap peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam konsep kurikulum terpadu peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari itu secara utuh dan realistis. Serta dikatakan luas karena peserta didik tidak hanya dalam suatu ruang lingkup melainkan semua lintas disiplin yang dipandang berkaitan antara satu dengan yang lain.

Inti dari kurikulum 2013 ada pada upaya penyederhanaan dan sifatnya yang tematik-integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi tantangan masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi tantangan masa depan. Titik berat kurikulum 2013 adalah bertujuan agar peserta didik atau siswa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan:

- a. Observasi;
- b. Bertanya (wawancara);
- c. Bernalar; dan
- d. Mengkomunikasikan (Mempesentasikan) apa yang mereka peroleh atau yang mereka ketahui setelah menerima mata pelajaran.

Adapun objek pembelajaran kurikulum 2013 adalah fenomena alam, sosial, seni dan budaya. Melalui pendekatan tersebut peserta didik diharapkan memiliki kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan

¹³Loeloek Endah Poerwati, Sofan amri, *Panduan Memahami Kurikulum 2013*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2013, h. 68.

¹⁴*Ibid*, h. 28.

serta tantangan dimasa mendatang. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis karakter dan kompetensi (*outcomes-based curriculum*) dengan pengembangan menggunakan pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL) serta penilaian hasil belajar diukur dengan pencapaian kompetensi.

2. Tujuan dan Fungsi Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 tidak asing terdengar dikemukakan pada berbagai media massa, bahwa melalui pengembangan Kurikulum 2013 kita akan mampu menghasilkan insane Indonesai yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik berupa paduan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara kontekstual. Kurikulum 2013 memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap aa yang dipelajari. Oleh karena itu peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi dan karakter yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke tingkat penguasaan kompetensi dan karakter berikutnya.

Mengacu pada penjelasan UU No. 20 Tahun 2003 bagian umum dikatakan bahwa: Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi:... 2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi,...danpada pejelasan pasal 35 bahwa kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Maka diadakan perubahan kurikulum dengan tujuan untuk melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Untuk mencapai tujuan tersebut menuntut perubahan pada berbagai aspek lain terutama dalam implementasinya dilapangan. Pada proses pembelajaran, dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu, sedangkan pada proses penilaian, dari

berfokus pada pengetahuan melalui penilaian out put secara utuh dan menyeluruh, sehingga penambahan jam pelajaran.¹⁵

Itu artinya kurikulum 2013 sebagai kurikulum nasional lebih diperkaya dan dipermudah tata kelola dan implementasinya oleh para guru. Dalam hal ini tujuan utamanya adalah akselerasi pencapaian mutu pendidikan nasional supaya dapat lebih kompetitif dengan pendidikan bangsa lain yang lebih modern.

3. Implementasi Kurikulum 2013

Implementasi Kurikulum 2013 berbasis karakter dan kompetensi harus melibatkan semua komponen (*stakeholders*), termasuk komponen-komponen tersebut antara lain kurikulum, rencana pembelajaran, proses pembelajaran, mekanisme penilaian, kualitas hubungan, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan sekolah/madrasah, pelaksanaan pengembangan diri peserta didik, pengembangan sarana dan prasarana, pembiayaan, serta etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah/madrasah.

Implementasi kurikulum 2013 menuntut kerjasama yang optimal diantara para guru, sehingga memerlukan pembelajaran berbentuk tim, dan menuntut kerjasama yang kompak diantara para anggota tim. Kerjasama antar guru sangat penting dalam proses pendidikan yang akhir-akhir ini mengalami perubahan yang sangat pesat. Implementasi Kurikulum 2013 akan dilaksanakan secara terbatas seperti pada jenjang pendidikan sekolah dasar menengah dimulai dari kelas I dan IV untuk SD, kelas VII SMP dan kelas IX untuk SMA. Apa yang diungkapkan tersebut merupakan asumsi bahwa kurikulum 2013 dapat diterapkan dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan dan pada berbagai ranah pendidikan. Meskipun demikian kurikulum tidak dapat digunakan untuk memecahkan seluruh permasalahan pendidikan. Waktu terus berlalu tanpa kompromi.

Keberhasilan Kurikulum 2013 dapat diketahui dari perwujudan indikator standar kompetensi lulusan (SKL) dalam pribadi peserta didik secara utuh. Kata utuh perlu ditekankan, karena hasil pendidikan sebagai output dari setiap satuan pendidikan belum menunjukkan SKL pada per-

¹⁵E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013, h. 65-66.

mukaannya saja, atau kulitnya saja. Keberhasilan Kurikulum 2013 dalam membentuk kompetensi dan karakter disekolah dapat diketahui dari berbagai perilaku sehari-hari yang tampak dalam setiap aktivitas peserta didik dan warga sekolah lainnya. Perilaku tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk kesadaran, kejujuran, keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kepedulian, kebebasan dalam bertindak, kecermatan, ketelitian dan komitmen.

Keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 dapat dinilai dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Adanya lulusan yang berkualitas, produktif, kreatif dan mandiri;
2. Adanya peningkatan mutu pembelajaran;
3. Adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber belajar;
4. Adanya peningkatan perhatian serta partisipasi masyarakat;
5. Adanya peningkatan tanggungjawab sekolah;
6. Tumbuhnya sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara utuh dikalangan peserta didik;
7. Terwujudnya pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM);
8. Terciptanya iklim yang aman, nyaman, dan tertib, sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan tenang dan menyenangkan (*joyfull learning*);
9. Adanya proses evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan (*continous quality improvement*).

Dalam implementasi Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi bukan hanya tanggungjawab sekolah semata tetapi merupakan tanggungjawab semua pihak: orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu pengembangan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dimulai dari analisis karakter dan kompetensi yang akan dibentuk atau yang diharapkan muncul setelah pembelajaran. Bedanya kurikulum lain, kurikulum 2013 lebih fokus dan berangkat dari karakter serta kompetensi yang akan dibentuk kemudian memikirkan mengembangkan tujuan yang akan dicapai. Semua komponen lebih diarahkan pada pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik yang diharapkan, baik *real curriculum* maupun *hidden curriculum*. Dalam hal ini semakin banyak pihak yang terlibat dalam pembentukan karakter dan kompetensi akan semakin

efektif hasil yang diperoleh. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan program pendidikan dan meningkatkan kompetensi dalam Kurikulum 2013 diperlukan koordinasi, komunikasi dan jalinan kerjasama antara sekolah, orang tua, masyarakat dan pemerintah baik dalam pelaksanaan, maupun evaluasi dan pengawasan.¹⁶

Implementasi kurikulum dapat diwujudkan guru dituntut untuk secara profesional merancang pembelajaran efektif dan menyenangkan (bermakna), mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan.

a) Merancang pembelajaran efektif dan bermakna

Implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik, hal tersebut menuntut keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan. Saylor (1981) dalam Mulyasa (2002) mengatakan bahwa *“Instruction is thus the implementation of curriculum plan, usually, but not necessarily, involving teaching in the sense of student, teacher interaction in an educational setting”*. Dalam hal ini guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat ketika peserta didik ketika peserta didik belum dapat membentuk kompetensi dasar, apakah pembelajaran dihentikan, diubah metodenya atau mengulang dulu pembelajaran yang lalu. Guru harus menguasai prinsip-prinsip pembelajaran, pelatihan dan penggunaan media pembelajaran, pemilihan, dan penggunaan metode pembelajaran keterampilan menilai hasil-hasil belajar peserta didik, serta memilih dan menggunakan strategi atau pendekatan pembelajaran. Kompetensi-kompetensi tersebut merupakan bagian integral bagi seorang guru sebagai tenaga profesional yang hanya dapat dikuasai dengan baik melalui pengalaman praktik yang intensif.

Guru harus menyadari bahwa pembelajaran memiliki sifat yang sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagogis, psikologis, dan didaktis secara bersamaan. Aspek pedagogis menunjuk pada kenyataan

¹⁶*Ibid*, h. 7-12.

bahwa pembelajaran berlangsung dalam suatu lingkungan pendidikan. Untuk itu guru harus mendampingi peserta didik menuju kesuksesan belajar atau penguasaan sejumlah kompetensi tertentu. Aspek psikologis menunjuk pada kenyataan bahwa peserta didik pada umumnya memiliki taraf per-kembangan yang berbeda yang menuntut materi yang berbeda pula. Selain itu aspek psikologis menunjuk pada kenyataan bahwa proses belajar itu sendiri mengandung variasi seperti belajar keterampilan motorik, belajar konsep, belajar sikap, dan seterusnya Gagne, (1984) perbedaan tersebut menuntut pembelajaran yang berbeda sesuai dengan jenis belajar yang sedang berlangsung. Aspek didaktis menunjuk pada pengaturan belajar peserta didik oleh guru. Dalam hal ini guru harus menentukan secara tepat jenis belajar manakah yang paling berperan dalam proses pembelajaran tertentu, dengan mengingat kompetensi dasar yang harus dicapai. Kondisi eksternal yang harus diciptakan oleh guru menunjuk variasi juga dan tidak sama antara jenis belajar yang satu dengan yang lain, meskipun ada pula kondisi yang paling dominan dalam segala jenis belajar. Untuk kepentingan tersebut guru harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai jenis-jenis belajar, kondisi internal dan eksternal peserta didik serta cara melakukan pembelajaran yang efektif dan bermakna.

Pembelajaran menyenangkan efektif dan bermakna dapat dirancang oleh setiap guru, dengan prosedur sebagai berikut.

1. Pemanasan dan Apersepsi

Pemanasan dan apersepsi perlu dilakukan untuk menjajaki pengetahuan peserta didik dengan menyajikan materi yang menarik dan mendorong mereka untuk mengetahui berbagai hal baru. Pemanasan dan apersepsi ini dapat dilakukan dengan prosesur sebagai berikut.

- a. Pembelajaran dimulai dengan hal-hal yang diketahui dan dipahami peserta didik.
- b. Peserta didik dimotivasi dengan bahan ajar yang menarik dan berguna bagi kehidupan mereka
- c. Peserta didik digerakkan atau tertarik dan bernafsu untuk mengetahui hal-hal yang baru

2. Eksplorasi

Eksplorasi merupakan tahapan kegiatan pembelajaran untuk mengenalkan bahan dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah dimiliki

peserta didik. Hal tersebut dapat ditempuh dengan prosedur sebagai berikut.

- a. Perkenalkan materi standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik.
- b. Kaitkan materi standar dan kompetensi dasar yang baru dengan pengetahuan dan kompetensi yang sudah dimiliki oleh peserta didik
- c. Pilihlah metode yang paling tepat dan gunakan secara bervariasi untuk meningkatkan penerimaan peserta didik terhadap materi standar kompetensi baru.

3. Konsolidasi Pembelajaran

Konsolidasi merupakan kegiatan untuk mengaktifkan peserta didik dalam pembentukan kompetensi dan karakter, serta menghubungkannya dengan kehidupan peserta didik. Konsolidasi pembelajaran ini dapat dilakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Libatkan peserta didik secara aktif dalam menafsirkan dan memahami materi dan kompetensi baru.
- b. Libatkan peserta didik secara aktif dalam proses pemecahan masalah (*problem solving*) terutama dalam masalah-masalah actual.
- c. Letakkan penekanan pada kaitan struktural, yaitu kaitan antara materi standar dan kompetensi baru dengan berbagai aspek kegiatan dan kehidupan dalam kehidupan dalam masyarakat.
- d. Pilihlah metode yang paling tepat sehingga materi standar dapat diproses menjadi kompetensi dan karakter peserta didik.

4. Pembentukan sikap, kompetensi dan karakter

Pembentukan sikap, kompetensi, dan karakter peserta didik dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Dorong peserta didik untuk menerapkan konsep, pengertian, kompetensi dan karakter yang dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Praktekkan pembelajaran secara langsung, agar peserta didik dapat membangun sikap, kompetensi dan karakter baru dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pengertian yang dipelajari;

- c. Gunakan metode yang paling tepat agar terjadi perubahan sikap, kompetensi dan karakter peserta didik secara nyata.
5. Penilaian Formatif
- Penialain formatif perlu dilakukan untuk perbaikan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut.
- a. Kembangkan cara-cara untuk menilai hasil pembelajaran peserta didik
 - b. Gunakan hasil penilaian tersebut untuk menganalisis kelemahan atau kekurangan peserta didik dan masalah-masalah yang dihadapi guru dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik.
 - c. Pilihlah metodologi yang paling tepat sesuai dengan kompetensi yang ingin di capai.

Prosedur pembelajaran efektif dan bermakna sebagaimana diuraikan di atas dapat di lukiskan sebagai berikut.

| | ALOKASI WAKTU |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PEMANASAN APERSEPSI Tanya Jawab tentang pengetahuan dan Pengalaman | 5 - 10% |
| EKSPLORASI Memperoleh/mencari informasi baru | 25 – 30% |
| KONSOLIDASI PEMBELAJARAN Negoisasi dalam rangka mencapai pengetahuan baru | 35 - 40% |
| PEMBENTUKAN SIKAP DAN PERILAKU Pengetahuan diproses menjadi nilai, sikap dan perilaku. | 10 - % |
| PENILAIAN FORMATIF | 10% |

Dalam pembelajaran efektif dan bermakna peserta didik perlu dilibatkan secara aktif, karena mereka adalah pusat dari kegiatan pembelajaran serta pembentukan kompetensi dan karakter. Peserta didik harus dilibatkan dalam tanya jawab yang terarah dan mencari pemecahan terhadap berbagai masalah pembelajaran. Peserta didik harus didorong untuk menafsirkan informasi yang diberikan oleh guru, sampai informasi tersebut dapat diterima oleh akal sehat. Strategi seperti ini memerlukan pertukaran pikiran, diskusi dan perdebatan dalam rangka mencapai pengertian yang samaterhadap setiap materi standar. Melalui pembelajaran efektif dan bermakna, kompetensi dapat diterima dan tersimpan lebih baik, karena masuk otak dan membentuk karakter melalui proses yang logis dan sistematis.

Dalam pembelajaran efektif dan bermakna setiap materi pelajaran yang baru harus dikaitkan dengan berbagai pengalaman sebelumnya. Materi pembelajaran baru disesuaikan secara aktif dengan pengetahuan yang sudah ada, sehingga pembelajaran harus dimulai dengan hal yang sudah di kenal dan dipahami peserta didik, kemudian guru menambahkan unsur-unsur pembelajaran dan kompetensi baru yang disesuaikan dengan pengetahuan dan kompetensi yang sudah dimiliki peserta didik.

Agar peserta didik belajar secara aktif guru perlu menciptakan strategi yang tepat guna, sedemikian rupa, sehingga mereka mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. Motivasi yang seperti ini akan dapat tercipta kalau guru dapat meyakinkan peserta didik akan kegunaan materi pembelajaran bagi kehidupan nyata peserta didik. Demikian juga, guru harus dapat menciptakan situasi sehingga materi pembelajaran selalu tampak menarik dan tidak membosankan. Untuk kepentingan tersebut, guru harus mampu bertindak sebagai fasilitator yang perannya tidak terbatas pada penyampaian informasi kepada peserta didik. Sesuai kemajuan dan tuntutan zaman, guru harus memiliki kemampuan untuk memahami peserta didik dengan berbagai keunikannya agar dapat membantu mereka dalam menghadapi kesulitan belajar. Untuk itu guru dituntut memahami berbagai pendekatan agar pembelajaran agar dapat membimbing peserta didik secara optimal.

b) Mengorganisasikan Pembelajaran

Dalam mengorganisir pembelajaran guru dituntut memperhatikan yang berkaitan dengan pengorganisasian pembelajaran dalam implementasi

kurikulum 2013 seperti: pelaksanaan pembelajaran, pengadaan dan pembinaan tenaga ahli, pendayagunaan lingkungan dan sumber daya masyarakat, serta pengembangan dan penataan kebijakan.

c) Memilih dan menentukan Pendekatan Pembelajaran

Implementasi kurikulum 2013 berbasis kompetensi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Pendekatan tersebut antara lain pendekatan pembelajaran kontekstual *teaching learning (contextual teaching and learning)*, bermain peran, pembelajaran partisipatif (*participative teaching and learning*), belajar tuntas (*mastery learning*), dan pembelajaran konstruktivisme (*constructivism and Learning*).

d) Melaksanakan pembelajaran pembentukan kompetensi dan karakter

Pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013 merupakan keseluruhan proses belajar, pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik yang direncanakan. Untuk kepentingan tersebut, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar dan waktu yang diperlukan harus ditetapkan sesuai dengan kepentingan pembelajaran sehingga peserta didik diharapkan memperoleh kesempatan dan pengalaman belajar yang optimal. Dalam hal ini, pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor yang mempengaruhinya baik faktor internal yang datang dari dalam diri individu maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan. Pada umumnya kegiatan pembelajaran mencakup kegiatan awal atau pembukaan, kegiatan inti atau pembentukan kompetensi dan karakter, serta kegiatan akhir atau penutup.

e) Menetapkan Kriteria Keberhasilan

Keberhasilan implementasi kurikulum 2013 dalam pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik dapat dilihat dari segi proses dan dari segi hasil. Dari segi proses dan dari segi hasil. Dari segi proses pembentukan kompetensi dan karakter dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat secara aktif,

baik fisik, mental, maupun sosial dalam pembelajaran, disamping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri sendiri. Sedangkan dari segi hasil, proses pembentukan kompetensi dan karakter dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%). Lebih lanjut menentukan kompetensi dan karakter dikatakan berhasil dan berkualitas apabila masukan merata, menghasilkan output yang banyak dan bermutu tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat dan pembangunan. Untuk itu, keberhasilan implementasi kurikulum 2013 berbasis kompetensi dan karakter dapat dilihat dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.¹⁷

E. LANDASAN DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013

Pengembangan kurikulum 2013 dilandasi secara filosofis, yuridis dan konseptual sebagai berikut:

1. Landasan filosofis
 - a. Filosofis pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan.
 - b. Filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat.
2. Landasan yuridis
 - a. RPJMM 2010-2014 sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan INPRES Nomor 1 tahun 2010, tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa.
3. Landasan Konseptual
 - a. Relevansi Pendidikan (*link and match*);

¹⁷*Ibid*, h. 99-134.

- b. Kurikulum berbasis kompetensi dan karakter;
- c. Pembelajaran konseptual (*conceptual teaching and learning*);
- d. Pembelajaran aktif (*student active learning*);
- e. Penilaian yang valid, utuh dan menyeluruh.

Seperti yang dikemukakan diberbagai media massa, bahwa melalui pengembangan kurikulum 2013 kita akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif dan efektif melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang berintegrasi. Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, berupa paduan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara konseptual. Kurikulum 2013 memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari. Oleh karena itu, peserta didik perlu mengetahui kriteria penguasaan kompetensi dan karakter yang akan dijadikan sebagai standar penilaian hasil belajar, sehingga para peserta didik dapat mempersiapkan dirinya melalui penguasaan terhadap sejumlah kompetensi dan karakter tertentu, sebagai prasyarat untuk melanjutkan ketinggian penguasaan kompetensi dan karakter berikutnya.

Mengacu kepada penjelasan UU No. 20 Tahun 2003, bagian umum dikatakan, bahwa: “Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi: ... 2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi...” dan pada penjelasan pasal 35, bahwa “kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.” Maka diadakan perubahan kurikulum dengan tujuan untuk “Melanjutkan Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.”

Untuk mencapai tujuan tersebut menuntut perubahan pada berbagai aspek lain, terutama dalam implementasinya di lapangan. Berbagai aspek lain, terutama dalam implementasinya dilapangan pada proses pembelajaran dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu, sedangkan pada proses penilaian, dari berfokus pada pengetahuan melalui penilaian output menjadi

berbasis kemampuan melalui penilaian proses, portofolio dan penilaian output secara utuh dan menyeluruh, sehingga memerlukan penambahan jam pelajaran.

F. KURIKULUM 2013 BERBASIS KOMPETENSI

Dalam rangka mempersiapkan lulusan pendidikan memasuki era globalisasi yang penuh tantangan dan ketidak pastian, diperlukan pendidikan yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata dilapangan. Untuk kepentingan tersebut pemerintah melakukan penataan kurikulum. Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang pernah diuji coba pada tahun 2004. KBK atau (*Competency Based Curriculum*) dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksana pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan (pengetahuan, keterampilan dan sikap) dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan khususnya pada jalur pendidikan sekolah.

Pada hakikatnya kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Burke (1995) mengemukakan bahwa kompetensi: “...is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, afektive, and psychomotor behaviors”. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Pengertian tersebut mengandung arti bahwa kompetensi merupakan penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu. Dengan demikian terdapat hubungan (*link*) antara tugas-tugas yang dipelajari peserta didik di sekolah dengan kemampuan yang diperlukan oleh dunia kerja. Untuk itu, kurikulum menuntut kerjasama yang baik antara pendidikan dengan dunia kerja terutama dalam mengidentifikasi dan menganalisis kompetensi yang perlu diajarkan kepada peserta didik disekolah.

Kompetensi yang harus dikuasai peserta didik perlu dinyatakan sedemikian

rupa agar dapat dinilai, sebagai hasil wujud belajar peserta didik yang mengacu pada pengalaman langsung. Peserta didik perlu mengetahui tujuan belajar dan tingkat-tingkat penguasaan yang akan digunakan sebagai kriteria pencapaian secara eksplisit, dikembangkan berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan memiliki kontribusi terhadap kompetensi-kompetensi yang sedang dipelajari. Penilaian terhadap pencapaian kompetensi perlu dilakukan secara objektif, berdasarkan kinerja peserta didik dengan bukti penguasaan mereka terhadap pengetahuan, keterampilan nilai dan sikap sebagai hasil belajar. dengan demikian dalam pembelajaran yang dirancang berdasarkan kompetensi, penilaian tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan yang bersifat subyektif.

Beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pengetahuan (*knowledge*); yaitu kesadaran dalam bidang kognitif, misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhannya.
2. Pemahaman (*understanding*); yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya seorang guru yang akan melaksanakan pembelajaran harus memiliki pemahaman yang baik terhadap karakteristik dan kondisi peserta didik agar dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien.
3. Kemampuan (*skill*); adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya kemampuan guru dalam memilih dan membuat alat peraga sederhana untuk memberi kemudahan belajar kepada peserta didik.
4. Nilai (*value*); adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku guru dalam pembelajaran (*kejujuran*, keterbukaan, demokratis dan lain-lain).
5. Sikap (*attitude*); yaitu perasaan (sering tidak senang, suka-tidak-suka) atau reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan upah/gaji dan sebagainya.
6. Minat (*interest*); adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan

sesuatu perbuatan. Misalnya minat untuk mempelajari atau melakukan sesuatu.

Berdasarkan analisis kompetensi di atas kurikulum 2013 berbasis kompetensi dapat dimaknai sebagai sesuatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Kurikulum ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat peserta didik, agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan dan keberhasilan dengan penuh tanggungjawab.

Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Kegiatan pembelajaran perlu diarahkan untuk membantu peserta didik menguasai sekurang-kurangnya tingkat kompetensi minimal, agar mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan konsep belajar tuntas dan pengembangan bakat, setiap peserta didik harus diberi kesempatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing.

G. LANDASAN KURIKULUM 2013

Paling tidak terdapat dua landasan teoretis yang mendasari kurikulum 2013 berbasis kompetensi. Pertama, adanya pergeseran dari pembelajaran kelompok ke arah pembelajaran individual. Dalam pembelajaran individual setiap peserta didik dapat belajar sendiri sesuai dengan cara dan kemampuan masing-masing. Untuk itu, diperlukan pengaturan kelas fleksibel baik sarana maupun waktu, dimungkinkan peserta didik belajar dengan kecepatan yang berbeda, penggunaan alat yang berbeda serta mempelajari bahan ajar yang berbeda pula. Kedua, pengembangan konsep belajar tuntas (*mastery learning*) atau belajar sebagai penguasaan (*learning for mastery*) adalah salah satu falsafah pembelajaran yang mengatakan bahwa dengan

sistem pembelajaran yang tepat semua peserta didik dapat mempelajari semua bahan yang diberikan dengan hasil yang baik dengan demikian setiap peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, jika diberikan waktu yang cukup. Jika asumsi tersebut diterima maka perhatian harus dicurahkan kepada waktu yang diperlukan untuk kegiatan belajar. Dalam hal ini perbedaan antara peserta didik yang pandai dengan yang kurang (bodoh) memerlukan waktu yang cukup lama untuk mempelajari sesuatu atau memecahkan suatu masalah sementara yang pandai bisa lebih cepat melakukannya.

Landasan pemikiran di memberikan beberapa implikasi dalam pembelajaran. *Pertama*, meskipun secara klasikal pembelajaran harus lebih menekankan pada kegiatan individual dengan memperhatikan perbedaan peserta didik. Dalam hal ini misalnya tugas diberikan secara individu bukan secara kelompok. *Kedua*, perlu diupayakan lingkungan belajar yang kondusif, dengan metode dan media yang bervariasi sehingga memungkinkan setiap peserta didik belajar dengan tenang dan menyenangkan. *ketiga*, agar setiap peserta didik dapat mengerjakan tugas dengan yang baik dalam pembelajaran perlu diberikan waktu yang cukup terutama dalam penyelesaian tugas dan praktek. Jika alokasi waktu yang tersedia di sekolah tidak mencukupi, maka berilah kebebasan pada peserta didik untuk menyelesaikan tugas diluar kelas pada kegiatan ekstra kurikuler.

Sedikitnya dapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum 2013 berbasis kompetensi yaitu penetapan kompetensi yang akan dicapai, pengembangan strategi untuk mencapai kompetensi dan evaluasi. Kompetensi yang ingin dicapai merupakan pernyataan tujuan (*goal statement*) yang hendak diperoleh peserta didik, menggambarkan hasil belajar (*learning outcomes*) pada aspek pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Strategi mencapai kompetensi adalah upaya untuk membantu peserta didik dalam menguasai kompetensi yang ditetapkan, misalnya: membaca, menulis, mendengarkan, berkreasi dan mengobservasi, sampai terbentuk suatu kompetensi. Sedangkan evaluasi merupakan kegiatan penilaian terhadap pencapaian kompetensi bagi setiap peserta didik.

Kurikulum 2013 berbasis kompetensi antara lain mencakup seleksi kompetensi yang sesuai; spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan kesuksesan pencapaian kompetensi; dan pengembangan sistem pembelajaran. Disamping itu, kurikulum berbasis kompetensi

memiliki sejumlah kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, penilaian dilakukan berdasarkan standar khusus sebagai hasil demonstrasi kompetensi yang ditunjukkan oleh peserta didik, pembelajaran lebih menekankan pada kegiatan individual personal untuk menguasai kompetensi yang dipersyaratkan, peserta didik dapat dinilai kompetensinya kapan saja bila mereka telah siap, dan dalam pembelajaran peserta didik dapat maju sesuai dengan kecepatan dan kemampuan masing-masing.

Dari berbagai sumber sedikitnya dapat diidentifikasi lima karakteristik kurikulum berbasis kompetensi, yaitu; mendayagunakan keseluruhan sumber belajar; pengalaman lapangan; strategi individual personal; kemudahan belajar dan belajar tuntas. Kelima hal tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Mendayagunakan keseluruhan sumber belajar

Suatu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran antara lain belum dimanfaatkannya sumber belajar secara maksimal, baik oleh guru maupun oleh peserta didik. Hal tersebut lebih dipersulit lagi oleh suatu kondisi yang turun temurun yang mana guru mendominasi kegiatan pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 berbasis kompetensi, guru hendaknya tidak lagi berperan sebagai aktor/aktris utama dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran dapat dilakukan dengan mendayagunakan aneka ragam sumber belajar. Dengan demikian, tidak ada lagi anggapan bahwa kegiatan pembelajaran baru dikatakan sempurna kalau ada ceramah dari guru. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal peserta didik dituntut tidak hanya mengandalkan diri dari apa yang terjadi di dalam kelas, tetapi harus mampu dan mau menelusuri aneka ragam sumber belajar yang diperlukan.

Pendayagunaan sumber belajar memiliki arti yang sangat penting, selain melengkapi, memelihara, dan memperkaya khasanah belajar, sumber belajar juga dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas belajar, yang sangat menguntungkan baik bagi guru, maupun bagi peserta didik. Dengan didayagunakannya sumber belajar secara maksimal, dimungkinkan orang yang belajar menggali berbagai jenis ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya, sehingga pengetahuannya senantiasa aktual, serta mampu mengikuti akselerasi teknologi dan seni yang senantiasa berubah.

Pada hakikatnya tidak ada satu sumber belajar pun yang dapat memenuhi segala macam keperluan belajar mengajar dengan demikian, berbicara sumber belajar perlu dipandang dalam arti luas jamak dan beraneka ragam. Momentum pemilihan sumber suatu belajar, perlu dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain sumber belajar dipilih dan digunakan dalam proses belajar apabila sesuai dan menunjang tercapainya tujuan. Dalam keanekaragaman sifat dan kegunaan sumber belajar secara umum dapat dirumuskan kegunaan sebagai berikut:

- a. Merupakan pembuka jalan dan pengembangan wawasan terhadap proses belajar mengajar yang akan ditempuh. Disini sumber belajar merupakan peta dasar yang perlu dijajaki secara umum agar wawasan terhadap proses pembelajaran yang akan dikembangkan dapat diperoleh lebih awal.
- b. Merupakan pemandu secara teknis dan langkah-langkah operasional untuk menelusuri secara lebih teliti menuju pada penguasaan keilmuan secara tuntas.
- c. Memberikan berbagai macam ilustrasi dan contoh-contoh yang berkaitan dengan aspek-aspek bidang keilmuan yang dipelajari dengan berbagai bidang keilmuan yang dipelajari dengan berbagai bidang keilmuan lainnya.
- d. Memberikan petunjuk dan gambaran kaitan bidang keilmuan lainnya.
- e. Menginformasikan sejumlah penemuan baru yang pernah diperoleh orang lain yang berhubungan dengan bidang keilmuan tertentu.
- f. Menunjukkan berbagai permasalahan yang timbul yang merupakan konsekuensi logis dalam suatu bidang keilmuan yang menuntut adanya kemampuan pemecahan dari orang yang mengabdikan diri dalam bidang tersebut.

H. KURIKULUM 2013 SEBAGAI UPAYA MEREALISASIKAN SNP

Kedudukan guru profesional merupakan garda terdepan dan ujung tombak implementasi kurikulum dan pembelajaran yang berhadapan langsung dengan anak didik. Dengan kata lain, tanpa guru profesional

perubahan kurikulum tidak akan memberikan sumbangan yang berarti terhadap kualitas pembelajaran dan mutu lulusan pada umumnya.¹⁸

Di samping Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengatur kebijakan dan arah praktik pendidikan nasional, maka Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah digulirkan oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005. Keberadaan SNP tersebut merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) yang berlaku dari Sabang sampai Merauke. Sesungguhnya dengan ditetapkannya SNP dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, agar sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, serta akselerasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS). Penataan terhadap empat standar dilakukan terutama dalam kaitannya dengan implementasi kurikulum 2013. Hasil penataan tersebut dituangkan dalam PP Nomor 32 tahun 2013 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudoyono tanggal 7 Mei 2013. Penataan dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap perkembangan zaman, akselerasi IPTEKS yang berdampak kepada kebutuhan peserta didik.¹⁹

Penetapan standar kompetensi dan standar mutu pendidikan nasional merupakan jaminan bagi laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas nasional. Di samping itu, merupakan acuan penyelenggaraan serta bentuk akuntabilitas sekolah dan pemerintah daerah kepada masyarakat, yang memberikan kebebasan kepada guru dan kepala sekolah untuk berkreasi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jika standar kompetensi dan standar mutu pendidikan telah dikembangkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan nasional, kemudian dituangkan kedalam kurikulum serta ditunjang oleh guru dan kepala sekolah profesional maka pendidikan dapat diharapkan menghasilkan SDM berkualitas, mampu membawa Indonesia keluar dari krisis yang berkepanjangan serta dapat mengikuti percepatan informasi dalam era globalisasi.²⁰

Berkaitan dengan itu, Pemerintah telah melakukan berbagai penataan

¹⁸E. Mulyasa, *Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, h.1.

¹⁹*Ibid*, h.21.

²⁰E. Mulyasa, *Pengembangan dan Impelementasi.... Op.cit*,h.23.

dalam standarisasi pendidikan, seperti yang dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. dan PP Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Dalam kedua peraturan tersebut dikemukakan bahwa :”standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia”. Standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat”.

Lebih lanjut Mulyasa menjelaskan bahwa perubahan standar nasional pendidikan dimaksud adalah diselaraskan untuk mengimbangi dinamika perkembangan masyarakat, baik lokal, nasional maupun global sehingga fungsi dan tujuan pendidikan nasional dapat diwujudkan secara optimal. Perwujudan fungsi dan tujuan pendidikan nasional terutama untuk meningkatkan sumberdaya manusia agar masyarakat dan bangsa kita memiliki nilai tambah dan nilai jual sehingga dapat bersaing, bersanding dan bertanding dengan negara-negara lain dalam tatanan global dan internasional.

Penataan standar juga dilakukan dalam rangka pengembangan dan perubahan kurikulum yang secara periodik perlu penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Oleh karena itu penataan lebih difokuskan kepada empat standar dan pasal-pasal yang berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran. Empat elemen perubahan tersebut adalah standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses dan standar penilaian, sedangkan standar pendidik dan standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan tidak dilakukan perubahan secara signifikan. Dengan demikian, kedua peraturan tersebut, baik PP no.19 tahun 2005 dan PP No.32 tahun 2013 masih berlaku dan harus dijadikan pedoman pelaksanaan serta direalisasikan secara efektif, produktif. Penataan pelaksanaan tersebut tidak menambah maupun mengurangi jumlah standar, jumlahnya masih delapan, standarnya pun masih sama seperti semula.

Delapan standar nasional pendidikan tersebut, garis besarnya sebagai berikut: (Diadaptasi dari PP. No. 32 tahun 2013).

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL). SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan,

dan keterampilan. SKL tersebut digunakan sebagai acuan utama pengembangan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan. SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau mata kuliah, yang mencakup sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan.

2. Standar Isi (SI). SI adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. SI mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi. Ruang lingkup materi dirumuskan dengan mempertimbangkan muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; konsep keilmuan; dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik; Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI); dan penguasaan kompetensi secara berjenjang.
3. Standar Proses (SP). SP adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai SKL. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Setiap satuan pendidikan harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, serta melakukan pengawasan secara efektif, agar pembelajaran dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien.
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SPTK). SPTK adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Secara garis besar standar pendidik dan tenaga kependidikan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:
 - a. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

- b. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
 - 1) Kompetensi Pedagogik;
 - 2) Kompetensi Kepribadian;
 - 3) Kompetensi Profesional; dan
 - 4) Kompetensi Sosial.

Di samping itu, dan yang paling penting mereka juga harus memiliki kompetensi spiritual dan moral secara proporsional.
 - d. Seseorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
 - e. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
5. Standar Sarana dan Prasarana (SPS). SPS adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar sarana dan prasarana dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri, antara lain sebagai berikut:
- a. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
 - b. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruangan pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat ber-

- main, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- c. Standar keragaman jenis peralatan laboratorium, ilmu pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.
 - d. Standar buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.
6. Standar Pengelolaan (SPe). SPe adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Garis besar standar pengelolaan yang perlu diketahui antara lain sebagai berikut:
- a. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
 - b. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional pengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.
 - c. Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang:
 - 1) Kurikulum tiap satuan pendidikan dan silabus;
 - 2) Kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun, dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
 - 3) Struktur organisasi satuan pendidikan;
 - 4) Pembagian tugas di antara pendidik;

- 5) Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan;
 - 6) Peraturan akademik;
 - 7) Tat tertib satuan pendidikan yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - 8) Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;
 - 9) Biaya operasional satuan pendidikan.
- d. Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun.
 - e. Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja tahunan harus disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah/madrasah, sedangkan untuk pendidikan tinggi harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
7. Standar Pembiayaan (Spem). Spem adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Standar pembiayaan ini antara lain sebagai berikut:
- a. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
 - b. Biaya investasi meliputi biaya pembelian sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
 - c. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

- d. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: (1) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (2) Bahan atau peralatan habis pakai; (3) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya.
 - e. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP
8. Standar Penilaian Pendidikan (SPP). SPP adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik dan nilai pencapaian SKL untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik untuk semua mata pelajaran dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

I. ASUMSI DAN KEUNGGULAN KURIKULUM 2013

Dalam Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi, asumsi merupakan parameter untuk menentukan tujuan dan kompetensi yang akan dispesifikasikan. Konsistensi dan validitas setiap kompetensi harus sesuai dengan asumsi, meskipun tujuannya selalu diuji kembali berdasarkan masukan yang memungkinkan terjadinya perubahan.

Sedikitnya terdapat tujuh asumsi yang mendasari Kurikulum 2013 berbasis karakter dan kompetensi. Ketujuh asumsi tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama: banyak sekolah yang memiliki sedikit guru profesional, dan tidak mampu melakukan proses pembelajaran secara optimal. Oleh Karena itu, penerapan kurikulum berbasis kompetensi menuntut peningkatan kemampuan professional guru.

Kedua: banyak sekolah yang hanya mengoleksi sejumlah mata pelajaran dan pengalaman, sehingga mengajar diartikan sebagai kegiatan menyajikan materi yang terdapat dalam setiap mata pelajaran.

Ketiga: peserta didik bukanlah tabung kosong atau kertas putih bersih yang dapat diisi atau ditulis sekehendak guru, melainkan individu yang memiliki sejumlah potensi yang perlu dikembangkan. Pengembangan potensi tersebut menuntut iklim kondusif yang dapat mendorong peserta didik belajar bagaimana belajar (*learning how to learn*), serta menghubungkan kemampuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat: peserta didik memiliki potensi yang berbeda dan bervariasi, dalam hal tertentu memiliki potensi tinggi, tetapi dalam hal lain mungkin biasa-biasa saja, bahkan rendah. Di samping itu, mereka memiliki tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru, sehingga guru harus dapat membantu menghubungkan pengalaman yang sudah dimiliki dengan situasi baru.

Kelima: pendidikan berfungsi mengkondisikan lingkungan untuk membantu peserta didik mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya secara optimal. Dalam hal ini (Sukmadinata: 2000) memberikan ilustrasi dengan mengumpamakan pendidikan ibarat bertani, petani menyediakan lahan yang gembur, mengatur air, udara, cahaya yang diperlukan tanaman, memupuk, menyayangi dan mencegah tanaman dari hama-hama. Guru seperti petani yang penuh rasa sayang dan perhatian, dengan tekun dan telaten merawat tanaman kesayangannya. Petani tidak perlu menarik-narik pohon supaya tinggi, membeber-beberkan daun supaya lebar, memberi parfum supaya wangi. Kalau pohon tersebut punya potensi tinggi, daun lebar, bunga, atau buahnya wangi, ciri-ciri tersebut akan dicapainya sendiri asalkan diciptakan kondisi dan perlakuan lingkungannya tidak mendukung para peserta didik, seperti halnya tanaman bisa menjadi bonsai.

Keenam: kurikulum sebagai rencana pembelajaran harus berisi kompetensi-kompetensi potensial yang tersusun secara sistematis, sebagai jабaran dari seluruh aspek kepribadian peserta didik, yang mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan.

Ketujuh: kurikulum sebagai proses pembelajaran harus menyediakan berbagai kemungkinan kepada seluruh peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensinya secara optimal. Dalam hal ini tugas guru adalah memberikan kemudahan dan kesempatan belajar kepada peserta didik

untuk menemukan id dan menerapkan strategi belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing.

Implementasi kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan yang produktif, kreatif, dan inovatif. Hal ini dimungkinkan, karena Kurikulum ini berbasis karakter dan kompetensi, yang secara konseptual memiliki beberapa keunggulan. *Pertama*: Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan bersifat alamiah (kontekstual), karena berangkat, berfokus, dan bermuara pada hakekat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing. Dalam hal ini peserta didik merupakan subjek belajar, dan proses belajar berlangsung secara alamiah dalam bentuk bekerja dan mengalami berdasarkan kompetensi tertentu, bukan transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*).

Kedua: Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Penguasaan ilmu pengetahuan, dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu.

Ketiga: ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan.

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, dalam implementasi kurikulum 2013 dilakukan penambahan beban belajar pada semua jenjang pendidikan, sebagai berikut.

Beban belajar di SD/MI

Kelas I, II, dan III masing-masing 30, 32, 34 sedangkan untuk kelas IV, V, dan VI masing-masing 36 jam setiap minggu, dengan lama belajar untuk setiap jam belajarnya yaitu 35 menit.

Beban belajar di SMP/MTs

Dari semula 32 menjadi 38 jam untuk masing-masing kelas VII, VIII, dan IX, dengan lama belajar untuk setiap jam belajarnya yaitu 40 menit.

Beban belajar di SMA/MA

Kelas X bertambah dari 38 jam menjadi 42 jam belajar, dan untuk kelas XI dan XII bertambah dari 38 jam menjadi 44 jam belajar, dengan lama belajar untuk setiap jam belajarnya yaitu 45 menit.

Kebijakan penambahan jam ini dimaksudkan agar guru memiliki waktu yang lebih leluasa untuk mengelola dan mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik atau mengembangkan pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Implikasi dari penambahan beban belajar ini, guru dituntut untuk memiliki keterampilan mengembangkan berbagai pendekatan dan metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar dan membentuk kompetensi dirinya. Dalam pada itu, guru juga dituntut untuk secara kreatif menciptakan lingkungan yang kondusif, dengan manajemen kelas yang efektif, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga peserta didik dapat belajar dengan menyenangkan (*joyfull teaching and learning*). Di samping penambahan jam pembelajaran, dalam implementasi kurikulum 2013 juga rencananya akan dilakukan pendampingan, terutama pendampingan bagi guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran tematik integratif.

J. PERBANDINGAN KURIKULUM 2013 DENGAN KTSP 2006

Tema Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang: produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Beberapa keunggulan kurikulum ini telah dibahas dalam subbab terdahulu, namun demikian untuk lebih memantapkan pemahaman tentang inovasi kurikulum ini dirasakan perlu untuk mengkaji dan menganalisis beberapa hal mendasar yang dikembangkan dalam kurikulum 2013. Oleh karena itu, dalam subbab ini disajikan secara khusus bagaimana perbandingan kurikulum 2013 dengan KTSP 2006. Perbandingan tersebut disajikan dalam bentuk tabel berikut (Kemdiknas, 2013).

Tabel 1
Perbandingan Tata Kelola Pelaksanaan Kurikulum

| Elemen | Ukuran Tata Kelola | KTSP 2006 | Kurikulum 2013 |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Guru | Kewenangan | Hampir mutlak | Terbatas |
| | Kompetensi | Harus tinggi | Sebaiknya tinggi. Bagi yang rendah masih terbantu dengan adanya buku |
| | Bebasan | Berat | Ringan |
| | Efektivitas waktu untuk kegiatan pembelajaran | Rendah (banyak waktu untuk persiapan) | Tinggi |
| Buku | Peran Penerbit | Besar | Kecil |
| | Variasi Materi dan Proses | Tinggi | Rendah |
| | Variasi harga/bebas siswa | Tinggi | Rendah |
| Siswa | Hasil pembelajaran | Tergantung sepenuhnya pada guru | Tidak sepenuhnya tergantung guru, tetapi juga buku yang disediakan pemerintah |
| Peman-tauan | Titik Penyimpangan | Banyak | Sedikit |
| | Besar Penyimpangan | Tinggi | Rendah |
| | Pengawasan | Sulit, hampir tidak mungkin | Mudah |

Tabel 2

Perbandingan Tata Kelola Pelaksanaan Kurikulum

| Proses | Peran | KTSP 2006 | Kurikulum 2013 |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Penyusunan Silabus | Guru | Hampir mutlak (dibatasi hanya SK-KD) | Pengembangan dari yang sudah disiapkan |
| | Pemerintah | Hanya sampai SK-KD | Mutlak |
| | Pemerintah Daerah | Supervisi penyusunan | Supervisi pelaksanaan |
| Penyediaan Buku | Penerbit | Kuat | Lemah |
| | Guru | Hampir mutlak | Kecil, untuk buku pengayaan |
| | Pemerintah | Kecil, untuk kelayakan penggunaan di sekolah | Mutlak untuk buku teks, kecil untuk buku pengayaan |
| Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran | Guru | Hampir mutlak | Kecil, untuk pengembangan dari yang ada pada buku teks |
| | Pemerintah Daerah | Supervisi penyusunan dan pemantauan | Supervisi pelaksanaan dan pemantauan |
| Pelaksanaan Pembelajaran | Guru | Mutlak | Hampir mutlak |
| | Pemerintah Daerah | Pemantauan kesesuaian dengan rencana (variatif) | Pemantauan kesesuaian dengan buku teks (terkendali) |
| Penjaminan Mutu | Pemerintah | Sulit, karena variasi terlalu besar | Mudah, karena mengarah pada pedoman yang sama |

Adapun langkah penguatan tata kelola dilakukan dengan: (1) Menyiapkan buku pegangan pembelajaran yang terdiri dari buku siswa, dan buku guru; (2) Menyiapkan guru supaya memahami pendayagunaan sumber belajar yang telah disiapkan dan sumber lain yang dapat mereka manfaatkan; (3) Memperkuat peran pendampingan dan pemantauan oleh pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembelajaran. Perbedaan esensial kurikulum tersebut dapat dipahami dalam subbab di bawah ini.

K. PERBEDAAN ESENSIAL KURIKULUM 2013 DENGAN KTSP 2006

Perubahan dan pengembangan kurikulum mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dilakukan untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah agar peserta didik mampu bersaing di masa depan, dalam konteks nasional maupun global. Perubahan dan pengembangan Kurikulum 2013 dapat dikaji perbedaannya dengan KTSP 2006, dalam tabel-tabel berikut ini (dimodifikasi dan dikembangkan dari materi sosialisasi kurikulum 2013).

Tabel 3
Perbedaan Esensial Kurikulum SD

| KTSP 2006 | Kurikulum 2013 | Status |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu | Tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi (sikap, keterampilan, pengetahuan) | Benarnya |
| Mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar | Mata pelajaran yang dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas | Benarnya |
| Bahasa Indonesia sejajar dengan mapel lain | Bahasa Indonesia sebagai penghela mapel lain (sikap dan keterampilan berbahasa) | Idealnya |
| Tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan berbeda | Semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama (saintifik) melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar, | Idealnya |
| Tiap jenis konten pembelajaran diajarkan terpisah (<i>separated curriculum</i>) | Berbagai jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain (<i>cross curriculum</i> atau <i>integrated curriculum</i>) | Baiknya |
| | Konten ilmu pengetahuan diintegrasikan dan dijadikan penggerak konten pembelajaran lainnya | |
| Tematik untuk kelas III (belum integrative) | Tematik Integratif untuk kelas I-VI | Baiknya |

Kurikulum sekolah dasar 2013 lebih ditekankan pada aspek afektif, dengan penilaian yang ditekankan pada nontes dan portofolio.

Dalam implementasi kurikulum yang berbasis kompetensi dan karakter ini, murid SD idealnya tidak lagi banyak menghafal, karena kurikulum ini dirancang untuk mempersiapkan peserta didik memiliki budi pekerti atau karakter yang baik, sebagai bekal untuk mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya. Berikut adalah perbedaan lebih lanjut kurikulum 2013 untuk sekolah dasar.

1. Tematik Integratif

Pembelajaran tematik integratif sebelumnya hanya dilaksanakan pada kelas rendah saja, dan kelas tinggi setiap mata pelajaran terkesan terpisah atau berdiri sendiri. Dalam implementasi kurikulum 2013, murid sekolah dasar tidak lagi mempelajari masing-masing mata pelajaran secara terpisah. Pembelajaran berbasis tematik integrative yang diterapkan pada tingkatan pendidikan dasar ini menyuguhkan proses belajar berdasarkan tema untuk kemudian dikombinasikan dengan mata pelajaran lainnya.

2. Delapan Mata Pelajaran

Untuk tingkat SD, saat ini ada 10 mata pelajaran yang diajarkan, yaitu Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya dan Keterampilan, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, serta Muatan Lokal dan Pengembangan Diri. Dalam kurikulum 2013, mata pelajaran untuk anak SD yang semula berjumlah 10 mata pelajaran dipadatkan menjadi delapan mata pelajaran, yaitu Agama, PPKn, Matematika, Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Seni Budaya, IPA, dan IPS. Bahkan semula rencananya hanya enam mata pelajaran saja, karena IPA dan IPS rencananya diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lainnya.

3. Pramuka sebagai Ekstra Kurikuler Wajib

Dalam implementasi kurikulum 2013, Pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib dan itu diatur dalam undang-undang. Pramuka ini menjadi ekstrakurikuler wajib pada satuan pendidikan dasar dan menengah, untuk berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Untuk meningkatkan layanan

secara profesional, maka dalam implementasi pramuka, Kemendikbud bekerja sama dengan Kemenpora.

4. Bahasa Inggris hanya Ekskul

Sebelumnya terjadi polemik mengenai bahasa Inggris di SD, yaitu bahasa Inggris akan dihapus dari kurikulum. Rencana penghapusan bahasa Inggris dari kurikulum SD ini didasari kekhawatiran akan membebani siswa dan memprioritaskan terhadap penguasaan Bahasa Indonesia. Ternyata untuk tingkat SD ini, dalam kurikulum baru 2013 Bahasa Inggris termasuk dalam kegiatan ekstra kurikuler bersama dengan Palang Merah Remaja (PMR), UKS, dan Pramuka.

5. Belajar di Sekolah Lebih Lama

Pemadatan mata pelajaran dalam kurikulum 2013 bukan mengurangi jam belajar, justru membuat lama belajar anak di sekolah bertambah. Metode baru pada kurikulum ini mengharuskan anak-anak untuk ikut aktif dalam pembelajaran dan mengobservasi setiap tema yang menjadi bahasan. Untuk kelas I-III yang awalnya belajar selama 26-28 jam dalam per minggu bertambah menjadi 30-32 jam per minggu. Sedangkan untuk kelas IV-VI yang semula belajar selama 32 jam per minggu di sekolah bertambah menjadi 36 jam per minggu.

Itulah isi perubahan kurikulum baru yang rencananya akan diterapkan pada tahun ajaran baru Juli 2013 untuk anak-anak SD. Sistem pembelajaran berbasis tematik integrative ini telah dijalankan di banyak negara, seperti Inggris, Jerman, Perancis, Finlandia, Skotlandia, Australia, Selandia Baru, Sebagian Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, Hongkong, dan Filipina. Penambahan jam belajar di sekolah dianggap masih sesuai karena dibandingkan dengan negara lain, Indonesia terbilang masih singkat durasinya untuk anak usia 7-9 tahun. Dengan pemadatan mata pelajaran dan pembelajaran berbasis tematik, anak-anak jga tidak akan lagi kerepotan membawa buku yang banyak dalam tasnya.

Selanjutnya, perbedaan esensial dari kurikulum SMP adalah sebagai berikut ini.

Tabel 4

Perbedaan Esensial Kurikulum SMP

| KTSP 2006 | Kurikulum 2013 | Status |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu | Tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi (sikap, keterampilan, dan pengetahuan) | Benarnya |
| Mata pelajaran dirancang sendiri berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri | Mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas | Benarnya |
| Bahasa Indonesia sebagai pengetahuan | Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan <i>carrier of knowledge</i> | Idealnya |
| Tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda | Semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar,.... | Idealnya |
| TIK adalah mata pelajaran sendiri | TIK merupakan sarana pembelajaran, dipergunakan sebagai media pembelajaran mata pelajaran lain | Baiknya |

Adapun perbedaan esensial kurikulum SMA/SMK dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5

Perbedaan Esensial Kurikulum SMA/SMK

| KTSP 2006 | Kurikulum 2013 | Status |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu | Tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi (Sikap, keterampilan, pengetahuan) dengan penekanan yang berbeda | Benarnya |
| Mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri | Mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas | Benarnya |

| | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Bahasa Indonesia sebagai pengetahuan | Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan <i>carrier of knowledge</i> | Idealnya |
| Tiap mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang berbeda | Semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar,.... | Idealnya |
| Untuk SMA, ada penjurusan sejak kelas XI | Tidak ada penjurusan SMA. Ada mata pelajaran wajib, peminatan, antar minat, dan pendalaman minat. | Idealnya |
| SMA dan SMK tanpa kesamaan kompetensi | SMA dan SMK memiliki mata pelajaran wajib yang sama terkait dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap. | Baiknya |
| Penjurusan di SMK sangat detail (Sampai keahlian) | Penjurusan di SMK tidak terlalu detail (sampai bidang studi), di dalamnya terdapat pengelompokan peminatan dan pendalaman | Baiknya |

Kurikulum 2013 dipastikan sebagai pembaharuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran. Menghadapi berbagai perbedaan tersebut, dilakukan langkah penguatan tata kelola dengan cara menyiapkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Buku pedoman pembelajaran yang terdiri dari Buku Siswa dan Buku Guru.
2. Guru dilatih untuk memahami pendayagunaan sumber belajar yang telah disiapkan dan sumber lain yang dapat dimanfaatkan.
3. Pendampingan dan pemantauan oleh pusat dan daerah terhadap pelaksanaan pembelajaran.

Menurut E. Mulyasa dalam rangka menyukseskan implementasi Kurikulum 2013, dan menyiapkan guru yang siap menjadi fasilitator pembelajaran sebagaimana diuraikan di atas,; hendaknya diadakan musyawarah antara kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, pengawas sekolah, dan komite sekolah. Musyawarah tersebut diperlukan, terutama untuk menganalisis, mendiskusikan, dan memahami buku pedoman dan berbagai hal yang terkait dengan implementasi Kurikulum 2013, sebagai berikut:

1. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

2. Pedoman Implementasi Kurikulum 2013
3. Pedoman Pengelolaan
4. Pedoman Evaluasi Kurikulum
5. Standar Kompetensi Lulusan
6. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
7. Buku Guru
8. Buku Siswa
9. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
10. Standar Proses dan Model Pembelajaran
11. Dokumen Standar Penilaian
12. Pedoman Penilaian dan Rapor
13. Buku Pedoman Bimbingan dan Konseling.²¹

Mencermati kelengkapan kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud, nampak jelas bahwa keberadaan kurikulum 2013 merupakan kebijakan pembaharuan pendidikan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga setiap lulusan mampu berkompetisi dengan kemajuan pendidikan yang sudah dicapai oleh bangsa lain.

L. KURIKULUM 2013 DAN TUPOKSI GURU

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita menyaksikan orang-orang yang suka mengkritisi pekerjaan orang lain, padahal pekerjaannya sendiri belum tentu benar. Layaknya seorang komentator sepak bola, yang sangat piawai mengomentari berbagai kekurangan dan peluang-peluang dalam setiap pertandingan, padahal kalau dia disuruh bermain/bertanding belum tentu bisa. Ini jangan terjadi pada diri kita, dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun, apalagi dilakukan oleh guru. Oleh karena itu, sebelum mengomentari pekerjaan orang lain, mengkritisi orang lain, eloknya memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kita sebagai guru dan merealisasikannya dengan baik dan bermutu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi kinerja. Apa yang diilustrasikan di atas perlu mendapat perhatian, karena pada umumnya banyaknya percekocokan, perselisihan di

²¹*Ibid*, h. 44-45.

setiap lembaga, disebabkan oleh kurang pemahamnya setiap orang yang terlibat dalam organisasi/lembaga terhadap tupoksinya; boleh jadi juga tidak tahu hak dan kewajiban yang berujung pada menuntut hak tetapi tidak melakukan kewajiban.

Tupoksi guru yang paling utama berkaitan dengan pembelajaran, yakni merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, serta menilai/memonitor hasil pembelajaran. Oleh karena itu, terdapat tiga peran atau tugas utama yang harus dilakukan oleh setiap guru, baik guru senior maupun guru yang masih baru. Ketiga tugas pokok dan fungsi guru tersebut menyangkut tiga fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

1. Perencanaan menyangkut penetapan tujuan, kompetensi, dan karakter yang akan dibentuk, serta memperkirakan cara mencapainya. Perencanaan merupakan fungsi sentral dari manajemen pembelajaran dan harus berorientasi ke masa depan. Dalam pengambilan dan pembuatan keputusan tentang proses pembelajaran, guru sebagai manajer pembelajaran harus melakukan berbagai pilihan menuju tercapainya tujuan. Guru sebagai manajer pembelajaran harus mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengelola berbagai sumber, baik sumber daya, sumber dana, maupun sumber belajar untuk membentuk kompetensi dasar, dan mencapai tujuan pembelajaran.
2. Pelaksanaan atau sering juga disebut implementasi adalah proses yang memberikan kepastian bahwa pembelajaran telah memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan, sehingga dapat membentuk kompetensi, karakter dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam fungsi pelaksanaan ini termasuk pengorganisasian dan kepemimpinan yang melibatkan penentuan berbagai kegiatan, seperti pembagian pekerjaan ke dalam berbagai tugas khusus yang harus dilakukan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam fungsi manajerial pelaksanaan proses pembelajaran, selain tercakup fungsi pengorganisasian terdapat pula fungsi kepemimpinan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dubrin (1990), bahwa fungsi pelaksanaan merupakan fungsi manajerial yang mempengaruhi pihak lain dalam upaya mencapai tujuan, yang akan melibatkan berbagai proses antarpribadi, misalnya bagaimana memotivasi dan memberikan ilustrasi kepada peserta didik, agar mereka dapat mencapai

tujuan pembelajaran dan membentuk kompetensi pribadinya secara optimal.

3. Pengendalian atau ada juga yang menyebut evaluasi dan pengendalian bertujuan menjamin kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses manajerial terakhir ini perlu dibandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang telah ditetapkan (kinerja standar). Guru sebagai manajer pembelajaran harus mengambil langkah-langkah atau tindakan perbaikan apabila terdapat perbedaan yang signifikan atau adanya kesenjangan antara proses pembelajaran aktual di dalam kelas dengan yang telah direncanakan.

Pembelajaran dapat dikatakan efektif dan efisien, apabila dapat mencapai dan merealisasikan hasil yang diharapkan, membentuk kompetensi dan karakter sesuai dengan kompetensi Inti (KI) dan kompetensi dasar (KD). Untuk kepentingan tersebut diperlukan manajemen sistem pembelajaran, sebagai keseluruhan proses untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien.

Guru diharapkan membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan pembelajaran secara efektif, serta melakukan pengembangan program, dan pengawasan dalam pelaksanaannya. Dalam proses pengembangan program, guru hendaknya tidak membatasi diri pada pembelajaran dalam arti sempit, tetapi harus menghubungkan program-program pembelajaran dengan seluruh kehidupan peserta didik, kebutuhan masyarakat, dunia usaha, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pengembangan program juga harus dilakukan secara adaptif, fleksibel, dan situasional; agar senantiasa dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun. Hal ini penting, karena guru merupakan seorang manajer pembelajaran, yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap perubahan dan perbaikan program pembelajaran. Untuk kepentingan tersebut, sedikitnya terdapat empat langkah yang harus dilakukan, yakni menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan peserta didik, meningkatkan perencanaan program, memilih dan melaksanakan program, serta memonitor dan mengevaluasi perubahan program.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi guru maka diperlukan kompetensi. Itu artinya tupoksi bisa dilakukan dengan baik, apabila ditunjang

oleh kompetensi yang memadai, serta mengacu pada kemampuan dalam melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan. dalam hal ini, kompetensi guru menunjuk kepada performansi dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Dikatakan rasional karena mempunyai arah dan tujuan, sedangkan performansi merupakan perilaku nyata, yang tidak hanya dapat diamati, tetapi mencakup sesuatu yang tidak kasat mata.

Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi di samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. Kompetensi dimaknai sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsi yang mengarahkan seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kompetensi bukanlah suatu titik akhir dari suatu upaya melainkan suatu proses yang berkembang dan belajar sepanjang hayat (*lifelong learning process*).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sejalan dengan itu, *Finch and Crunkilton, (1992: 220)* mengemukakan bahwa: “*Competencies are those tasks, skills, attitudes, values, and appreciation that are deemed critical to successful employment.*” Kalimat tersebut mengandung makna bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, nilai, dan apresiasi yang diungkapkan secara kritis untuk keberhasilan kerja. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kompetensi merupakan perpaduan antara sikap, kemampuan, dan pengetahuan yang diterapkan dalam melaksanakan tugas di tempat kerja.

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, emosional, dan spiritual yang secara *kaffah* membentuk standar profesi, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme. Penguasaan materi meliputi pemahaman karakteristik dan substansi ilmu sumber bahan pembelajaran, pemahaman disiplin ilmu yang bersangkutan dalam konteks yang lebih luas, penggunaan

metodologi ilmu yang bersangkutan untuk memverifikasi dan memantapkan pemahaman konsep yang dipelajari, penyesuaian substansi dengan tuntutan dan ruang gerak kurikuler, serta pemahaman manajemen pembelajaran. Hal ini menjadi penting dalam memberikan dasar-dasar pembentukan kompetensi dan profesionalisme guru di sekolah. Dengan menguasai materi pembelajaran, guru dapat memilih, menetapkan, dan mengembangkan alternatif strategi dari berbagai sumber belajar yang mendukung pembentukan kompetensi inti dan kompetensi dasar (KI-KD). Pemahaman terhadap peserta didik meliputi berbagai karakteristik, tahap-tahap perkembangan dalam berbagai aspek dan penerapannya (kognitif, afektif, dan psikomotor) dalam mengoptimalkan perkembangan dan pembelajaran. Guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dihadapkan pada sekelompok individu yang memiliki karakteristik berbeda sesuai dengan jumlahnya. Pemahaman terhadap karakteristik peserta didik oleh para guru menjadi prasyarat dalam pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing individu peserta didik. Pembelajaran yang mendidik terdiri atas pemahaman konsep dasar proses pendidikan dan pembelajaran bidang studi yang bersangkutan serta penerapannya dalam pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran. Pembelajaran yang mendidik merupakan upaya memfasilitasi perkembangan potensi individu secara optimal dan bersinergi antara pengembangan potensi pada setiap aspek kepribadian. Upaya memfasilitasi perkembangan setiap aspek kepribadian dalam pembelajaran dilakukan dengan mengacu pada pembentukan individu yang utuh dalam kompetensi kecakapan hidup yang bertakwa, bermartabat, bermoral, dan bertanggung jawab. Pengembangan pribadi dan profesionalisme mencakup pengembangan instuisi keagamaan, kebangsaan yang berkepribadian, sikap dan kemampuan mengaktualisasi diri, serta sikap dan kemampuan mengembangkan profesionalisme kependidikan. Guru dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap terbuka, dan kritis untuk mengaktualisasi penguasaan isi bidang studi, pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, dan melakukan pembelajaran yang mendidik. Di samping itu, guru perlu dilandasi sifat ikhlas dan bertanggung jawab atas profesi pilihannya, sehingga berpotensi menumbuhkan kepribadian yang tangguh dan memiliki jati diri.

Keempat standar kompetensi guru tersebut masih bersifat umum

dan perlu dikemas dengan menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang beriman dan bertakwa, serta sebagai warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengembangan keempat standar kompetensi guru tersebut perlu didasarkan pada landasan konseptual, landasan teoretik, dan peraturan perundangan yang berlaku; landasan empirik dan fenomena pendidikan yang ada, kondisi, strategi, dan hasil di lapangan, serta kebutuhan *stakeholders*. Standar kompetensi guru merupakan jabaran tugas dan fungsi guru dalam merancang, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, serta mengembangkan pribadi peserta didik secara utuh dan menyeluruh, sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Standar kompetensi di atas, selanjutnya harus dijabarkan ke dalam indikator standar kompetensi: rumpun kompetensi, butir kompetensi, dan indikator kompetensi; serta pengalaman belajar dan asesmen sebagai tagihan konkret yang dapat diukur dan diamati untuk setiap indikator kompetensi.

Dalam perkembangannya; pemerintah merumuskan empat kompetensi guru, yang mencakup kompetensi profesional, kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut, meskipun secara teoretis konseptual dapat dikaji secara terpisah satu dengan yang lainnya; tetapi dalam pelaksanaannya menyatu membentuk kepribadian guru, yang satu sama lain saling terintegrasi membentuk pribadi guru. Seperti dikemukakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga guru antara lain: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*, Jakarta: Suara Bebas.
- Ali, Muhammad. dkk.2007. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, Bandung: Pedagogiana Press.
- Arends, Richard L.2004. *Learning to Teach*, New York: McGraw Hill.
- Arifin, M. 1996. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arifin, Zainal. 2016. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remajarosdakarya.
- Bennett, Neville dan Clive Carre, Ed. 1993. *Learning*, London: Routledge.
- Burton, Neil and Mark Brundrett. 2005. *Leading the Curriculum in the Primary School* ,London: Paul Chapman.
- Cooper, Bruce S., Lance D. Fusarelli, E. Vance Randall. 2004. *Better Policies, Better Schools: Theories and Applications*, USA: Pearson Education, Inc.
- Cyriacou, Chris, ed. 2009. *Effective Teaching in School: Theory and Practice*. UK: Stanley Thornes (Publishers) Ltd.
- Daft, Richard L.2010. *Management*. New Jersey: Prentice Hall.
- Daft, Richard L dan Dorothy Marcic.2009. *Understanding Management*, London:South Western.
- Dakir. 2010. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*, Bandung: Pustaka Setia.

- Everard, K.B Geoffrey Morris, dan Ian Wilson. 2004. *Effective School Management*, London: Paul Chapman Publishing.
- Fattah, Nanang. 2013. *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hamalik, Oemar. 2008. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remajarsdakarya.
- Hamalik, Oemar. 2008. *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Remaja Rosdakarya.
- Hargreaves, David H and David Hopkins. 1994. *Development Planning for School Improvement*, London: Cassel Viliers House.
- Hasballah. 2016. *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Irianto, Yoyon Bahtiar. 2011. *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori dan Model*, Jakarta: Rajawali Press.
- Jamaris, Martini. 2013. *Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kunandar. 2011. *Guru Profesional: Implementasi kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajawali Press.
- M. Chan, Sam, dan Tuti T. Sam. 2005. *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Majid, Abdul. 2006, *Perencanaan Pembelajaran dalam Mengembangkan Kompetensi Guru*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. 2005. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyasa, E. 2015. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remajarsdakarya.
- Mulyasa, E. 2014. *Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2014. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musfah, Jejen. 2017. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

- Nata, Abudin.2012. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada.
- Neill, John O and Neil Kitson, ed,1996. *Effective Curriculum Management*, London: Routlegde.
- Ornstein, Allan C dan Francis P Hunkins.1978. *Curriculum Foundations, Principles, and Issues*. New Jersey; Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Poerwati, Loeloek Endah dan Sofan Amri. 2013. *Panduan Memahami Kurikulum 2013*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya.
- Ramayulis. 2005. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Rivai, Veithzal dan Sylviana Murni.(2010). *Education Managemen Analisis Teori dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 2.
- Rusman.2009. *Manajemen Kurikulum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Reksoatmodjo, Tedjo Narsoyo. 2010. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Teknologi Kejuruan*, Bandung: Refika Aditama.
- Schermerhorn, John R.2010. *Introduction to Management*, New Jersey: John Willey & Sons, Inc.
- Siswanto, H.B.2015.*Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudjana, Nana.2002. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sukiman. 2015. *Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Rosda Karya.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. *Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, Nana Saodih.2007. *Kurikulum dan Pembelajaran dalam Muhammad Ali,dkk, Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: Pedagogiana Press.
- Suryadi, Ace.2014. *Pendidikan Indonesia Menuju 2025*, Bandung: Rosdakarya.
- Tilaar, H.A.R. 2014. *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka cipta.
- Triwiyanto, Teguh.2015. *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Uno, Hamzah. B. 2006. *Perencanaan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyudin, Dinn. 2014. *Menejemen Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Watkins,Chris, Eileen Carnell & Caroline Loodge. 2007. *Effective Learning in Classroom*. London: Paul Chapman Publishing.

Zais, Robert S.1976. *Curriculum Principles and Foundation*. New York: Harper and Row Publishers.

TENTANG PENULIS

Prof. Dr. Syafaruddin M.Pd, lahir di Asahan-Sumatera Utara, 16 Juli 1962, delapan bersaudara putra kedua dari bapak Mahmud Siahaan dan Ibu Nurhani Siregar. Menyelesaikan Sekolah Dasar tahun 1975, Madrasah Tsanawiyah tahun 1979, Madrasah Aliyah tahun 1982 di Pulau Rakyat Kabupaten Asahan. Kemudian menyelesaikan Strata Satu (S.1) program Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara tahun 1987.

Selanjutnya menyelesaikan strata dua (S.2) program Administrasi pendidikan meraih gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) pada PPS Universitas Negeri Padang tahun 2000, kemudian tahun 2008 menyelesaikan program Doktor bidang Manajemen Pendidikan pada PPS Universitas Negeri Jakarta.

Menikah dengan Dra. Gusnimar, MA. tahun 1990. Sekarang dianugerahi anak tiga orang, yaitu: Ahmad Taufik Al Afkari, S.Pd, M.Kom (26 tahun), Dina Nadira Amelia, S.PdI (24 tahun), Ahdiana Fadwani Maulafia (21 tahun).

Bertugas pada Fakultas Tarbiyah IAIN SU sejak tahun 1990 sebagai tenaga pengajar, mengasuh mata kuliah Ilmu Pendidikan, Manajemen Pendidikan. Pada tahun 2000 menjabat Ketua Progam Studi Diploma II, Pendidikan Agama Islam di Fakultas Tarbiyah IAIN SU. Pada tahun 2003 bertugas mengajar mata kuliah Metodologi Penelitian pada Akademi Pengajian Dakwah Sungai Patani Kedah Darul Aman Malaysia. Sejak tahun 2008-2011 dipercaya menjadi Pembantu Dekan I Fakultas Tarbiyah IAIN SU, kemudian terpilih sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN SU (2011-2015), kembali diamanahkan memimpin Fakultas Ilmu tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan, (2015-2016), dan tahun

2016 diangkat sebagai Wakil Rektor I UIN Sumatera Utara Medan sampai sekarang.

Pernah Latihan Orientasi Kehumasan Departemen Agama di Jakarta tahun 1990, dan pada tahun 1993 mengikuti Pelatihan pengembangan Tenaga Edukatif (PPTE) di IAIN Sumatera Utara. Semasa mahasiswa mengikuti *Basic Training*, dan *Intermediate Training* di HMI Cabang Medan. Kemudian aktif sebagai Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Tarbiyah IAIN SU (1985), dan Lembaga Dakwah Islam Divisi Pendidikan HMI Cabang Medan (1986), Pengurus Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) Sumatera Utara (1987). Saat ini aktif sebagai Ketua Penyunting Jurnal Tarbiyah IAIN SU (2004), Wakil Sekretaris Jenderal DPP Al-Ittihadiyah (2004-2011), Ketua Pengurus Daerah Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) Provinsi Sumatera (2010-2015), ketua DPP Ikatan Sarjana Pendidikan Agama Islam Indonesia (2010-2015), dan Ketua Majelis Pendidikan DPP Al-Ittihadiyah, tahun 2013 -2015, diangkat sebagai Plt. Ketua Umum DPW Al Ittihadiyah Sumayatera Utara, dan terpilih menjadi Ketua Umum DPW Al Ittihadiyah periode (2015-2020).

Karya penulis yang diterbitkan, di antaranya: *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan* (Grasindo,2002), *Sistem Pengambilan Keputusan Pendidikan* (Grasindo, 2004), *Visi Baru Al-Ittihadiyah* (Citapustaka Media, 2004), *Pengantar Filsafat Ilmu* (Citapustaka Media, 2005), *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Ciputat Press, 2005), *Ilmu Pendidikan: Rekonstruksi Budaya Abad XXI* (Citapustaka Media, 2005), *Manajemen Pembelajaran* (Ciputat Press, 2005), *Al-Ittihadiyah: Menjalin Kebersamaan, Membangun Bangsa*, (Hijri Pustakautama, 2006), *Pendidikan Bermutu Unggul* (Citapustaka Media, 2006), *Ilmu Pendidikan Islam: Melejitkan Potensi Budaya Umat*, (Hijri Pustakautama, 2006), *Kepemimpinan Pendidikan* (Citapustaka Media, 2007), *Efektivitas Kebijakan Pendidikan* (Rinekacipta, 2008), *Kepemimpinan Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Quantum Teaching Press, 2010), *Kepemimpinan dan Kewirausahaan*, (Media Perintis Publishing, 2010), dan *Pendidikan Pra Sekolah* (Media Perintis Publishing, Medan, 2011), *Pengelolaan Pendidikan* (Media Perintis Medan, 2010), *Inovasi Pendidikan* (Perdana Publishing, 2012), *Manajemen Organisasi Pendidikan* (Perdana Publishing, 2015), *Sosiologi Pendidikan* (Perdana Publishing, 2016), dan *Administrasi Pendidikan* (Perdana Puiblishing, 2016).

Dr. H. Amiruddin MS. MA, Lahir 28 Agustus 1955 di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Galang, dalam satu desa Kampung Pulau Tagor. Ayahnya bernama H. Muhammad Sareh dan Ibunya bernama Hj. Siti Djahimah. Pada masa sekolah belajar di Sekolah Rakyat Pulo Hali sampai kelas tiga, kemudian setelah kelas 4 pindah ke Sekolah Dasar Negeri Dua, Kota Galang dan ujian kelas enam lulus dari Sekolah Dasar Negeri Satu, Galang Kota. Melanjutkan pendidikan PGA 4 tahun dan PGA 6 Tahun, tamat tahun 1972. Seterusnya melanjutkan Kuliyah ke Fakultas Tarbiyah IAIN Sumut Tahun 1973 dan memperoleh gelar Sarjana Muda Tahun 1977. Sembari kuliyah, Amiruddin MS mempelajari dan mendalami Bahasa Inggris sehingga mulai tanggal 7 Maret 1977 dipercaya mengajar Bahasa Inggris di Lembaga Bahasa IAIN Sumatera Utara, mata kuliyah Bahasa Inggris. Disamping itu juga mengajar Bahasa Inggris di beberapa kursus Bahasa Inggris seperti Ganesha English Course, Tropical English Course, Vidya English Course dan lain-lain. Pada Tahun 1982, menyelesaikan Program S-1 dengan gelar Doktorandus di Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara dan Tahun 2008 menyelesaikan Program S-2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Riwayat Keluarga, bersaudara Sembilan orang, yaitu Siti Rapeah, Siti Raniah, Hasan Basri, Siti Mahida, Juraidah, Erniyati MS, Evi Zulinda, Budy Kurniawan dan Alm, Amsaruddin. Tahun 1977 menikah dengan Hj. Siti Supiati, putri Alm.H.B.Suarno dan Hj. Mujinem. Dari pernikahannya mendapatkan empat orang anak yaitu Mhd. Azmi Jauhari SH, Muhammad Dhuha Shalihin SE, Fitri Amriati dan dokter Yunita Wulandari dan empat orang menantu yaitu Minda Mora Harahap, S.Pd, M.Hum, Khairani Nasution, SE, Denny Ardiansyah, SH dan Bima Pranachitra, S.S, M.Hum. Tahun 2007 mendapat anak angkat Hj. Fauliza Syafriani istri dari DR.Ir.H.Firdaus CES di Pekan Baru. Saat ini memiliki cucu delapan orang yaitu Mhd. Nanda Afithra, Farhani Amanda Mumtas, Mhd. Zikri Akbar, Mhd. Fathir Azra, Mhd. Imad Aqel, Mhd. Alfarisi Duhuran, Sulthan Muhammad Pranatama, Asy-Syifa Qalby Rizki. Disamping itu beliau sangat suka member peluang kepada pelajar/mahasiswa yang berprestasi menjadi Anak atau Mahasiswa asuh.

Riwayat Pekerjaan, Tahun 1974, mengajar Bahasa Inggris di beberapa Kursus Bahasa Inggris di Medan, memberi kuliyah sebagai dosen Bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah & Ushuluddin UMSU, di Fakultas Hukum

Universitas Amir Hamzah mengajar Hukum Islam dan di Universitas Darmawangsa mengajar Hukum Islam. Pada tahun 1976 mengajar di SMA Yayasan Persit Chandra Kirana Kodam I/BB sampai menjadi Kepala Sekolah SMA selama 10 tahun yaitu tahun 1986. Diangkat menjadi PNS tahun 1986 bulan Maret di tugaskan di MAN I Medan sampai tahun 1986, dan sejak tahun 2000 sampai saat ini bertugas sebagai dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan.

Perjalanan ke luar negeri menunaikan Ibadah Haji dan Umrah ke Tanah Suci Makkah dan Madinah. Berdakwah ke Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong, China dan beberapa kawasan di Asia Tenggara. Tadabur Alam dan Dakwah ke Dubai, Timur Tengah dan ASEAN.

Riwayat Organisasi, menjadi Pengurus Pelajar PGA Galang tahun 1970-an, menjadi pengurus HMI Komisariat Fak. Tarbiyah IAIN Sumut, Tahun 1992-1996 memimpin Pesantern Nurul Hakim Tembung Medan, menjadi Wakil Ketua Golkar Kota Medan Tahun 1998-1999, menjadi Ketua IPHI Kota Medan Tahun 1997 sampai dengan 2007, menjadi Pengurus IPHI Jakarta tahun 2001 sampai 2010 dan mendirikan Majelis Zikir Tazkira tahun 2004, Tahun 2012 menjadi Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sumatera Utara. Tahun 1997, menjadi anggota DPRD di Kota Medan dari Fraksi Golkar dan menjadi wakil Ketua Komisi E dan Tahun 2001 kembali bertugas sebagai dosen PNS di Fakultas Tarbiyah IAIN Sumut, dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, Bahasa Inggris dan Perbandingan Pendidikan Akhlak dan Tasawuf, Pendidikan Karakter dan Psychologi Agama Islam.

Disamping menjadi Guru dan Dosen, Amiruddin MS adalah penceramah mulai berkarir dari 19 Mei 1976 di Pasar Lima Jalan Darussalam Medan dan terus menjadi Muballigh sampai saat ini mengasuh 127 Majelis Taklim di Medan Sumatera Utara dan berbagai Daerah dan Instansi Swasta, Pemerintah, ABRI, Polisi, BUMN dan Ormas Islam.

Karya-karya yang pernah di tulis oleh Amiruddin MS sebagai berikut: *Pendidikan Budi Pekerti Berbasis Islam* (2011), *Mengenal dan Beramal bersama Majelis Zikir Tazkira* (2009), *Melestarikan Nilai-nilai Ramadhan* (2012), *Makna Hablumminallah dan Hablumminannas pada Ibadah Qurban* (1425 H), *Dalam Dekapan "Idul Fitri"* (1431 H), *Iman, Ilmu dan Amal "Tiga Pilar Muhammad SAW Membangun Peradaban"* (2008), *Pilar-pilar Peradaban Islam* (2010), *Hijri, Jurnal Manajemen Kependidikan dan*

Keislaman (2012), Muharran dan Hijrah Rasulullah Muhammad SAW, Peringatan Maulid Rasulullah Muhammad SAW & Zikir Akbar bersama Majelis Zikir Tazkira Sumatera Utara, Dimensi Kecerdasan Emosional dan Spiritual pada Pendidikan Pesantren (2008), Dahsyatnya Muhasabah dan Tafakkur (2011), Nasehat Perkawinan (2006), Pendidikan dan Pengamalan Ibadah Haji dan Umroh (Teori dan Praktek) (2012).

Sedangkan artikel yang ditulis diantaranya; *Nilai Sosial Ibadah Haji (Waspada, Agustus 2009), Marhaban Ya Ramadhan (Waspada, Agustus 2009), Teologi Konservasi Lingkungan Menurut Islam (Waspada, 2010), Islam Versus Radikalisme (Waspada, Maret 2010), Islam dan Keadilan (Waspada, Mei 2010), Falsafah Iqro' (Waspada, Juni 2010), Menumbuhkembangkan Pilar Peradaban Islam dalam Konteks Kekinian (Analisa, Agustus 2010), Dalam Dekapan Idul Fitri (Waspada, September 2010), Indahnya Halal Bi Halal (Waspada, September 2010), Dimensi Sosial Ibadah Haji (Waspada, November 2010), Memahami Hidup (Analisa, Maret 2011), Berdiamlah Sejenak dan Bermuhasabahlah ! (Waspada, Maret 2011), Menangkap Spirit Hijrah (Waspada, November 2012), Maulid dan Spirit Kesadaran Sosial (Waspada, Februari 2013), Belajar dari Kepemimpinan Umar Bin Khattab (Waspada, Maret 2013), Hijrah sebagai Momentum Perubahan (Waspada, November 2013), Cermin Kejujuran (Waspada, Juli 2013), Membangun Kebersamaan & Jiwa Relu Berkorban.*